

**TANTANGAN DAN RONGRONGAN  
TERHADAP KEUTUHAN NEGARA  
DAN KESATUAN RI:  
Kasus Republik Maluku Selatan**

**DEPARTEMEN PENDIKIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIDEKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIDEKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1993**

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan

# TANTANGAN DAN RONGRONGAN TERHADAP KEUTUHAN NEGARA DAN KESATUAN RI : Kasus Republik Maluku Selatan

Tim Penulis :

**RZ. Leirissa**

**GA. Ohorella**

**P. Suryo Harjono**

**Triana Wulandari**

Penyunting :

**Sri Sutjiatiningih**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1983**

**TANTANGAN DAN RONGRONGAN TERHADAP KEUTUHAN  
NEGARA DAN KESATUAN RI :**

**Kasus Republik Maluku Selatan**

Tim Penulis : RZ. Leirissa  
GA. Ohorella  
P. Suryo Harjono  
Triana Wulandari

Penyunting : Sri Sutjiatiningsih

Koreksi Naskah: Soejanto

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah  
Nasional

Jakarta 1993

Cetakan Pertama 1993

Dicetak oleh : CV. MANGGALA BHAKTI, Jakarta - Indonesia

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan memperoleh serta dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai yang terungkap dari rangkaian peristiwa yang digambarkan dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan dari karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



---

Prof. Dr. Edi Sedyawati  
NIP. 130 202 962

## PENGANTAR

Buku "*Tantangan dan Rongrongan Terhadap Negara dan Kesatuan Republik Indonesia: Kasus Republik Maluku Selatan*" merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1992/1993.

Buku ini muat uraian tentang mengapa dan bagaimana timbulnya Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1950, bagaimana pemerintah mengatasinya dan perkembangan RMS di Negeri Belanda.

Penelitian dan penulisan *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan negara dan Kesatuan RI: Kasus RMS*" ini dimaksudkan untuk melengkapi penulisan tentang penulisan kasus-kasus tantangan dan rong-rongan terhadap keutuhan negara dan kesatuan RI di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk pada kajian lebih lanjut.

Jakarta, Juli 1993  
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan  
Dokumentasi Sejarah Nasional



Sri Sutjiatiningsih  
NIP. 130 422 397

## PENGANTAR

Buku ini mencoba membahas lagi mengapa dan bagaimana timbulnya "RMS" pada tahun 1950 dan bagaimana pemerintah mengatasinya. Selain itu terdapat pula satu bab mengenai perkembangan RMS di Negeri Belanda.

Studi mengenai peristiwa ini memang sudah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, baik oleh para ilmuwan maupun oleh khalayak ramai. Berbagai surat kabar juga menyimpan sejumlah berita yang sedikit banyaknya sudah dimanfaatkan dalam tulisan-tulisan itu, namun belum ada studi yang tuntas berdasarkan dokumen-dokumen Pemerintah Indonesia maupun Belanda yang sampai kini masih dirahasiakan.

Studi-studi mengenai RMS di Maluku terutama terdapat dalam karya Leirissa dan Ben van Kaam. Ben van Kaam mendasarkan bukunya pada serangkaian wawancara dan pengambilan video yang telah diputar di TV Belanda beberapa tahun yang lalu. Buku itu sangat mendetail melaporkan kronologi proklamasi RMS. Kemudian terdapat pula studi yang lebih umum yang didasarkan pada perspektif perubahan sosial dan bahan-bahan kearsipan di Negeri Belanda yang dihasilkan oleh R. Chauvel sebagai disertasi dan yang sudah diterbitkan pula oleh KITLV.

Mengenai perkembangan di Negeri Belanda terdapat pula sejumlah buku yang dihasilkan baik oleh para ilmuwan maupun oleh khalayak. Selain orang Belanda dan orang Maluku terdapat pula sejumlah pakar asing. Perlu disebut khusus di sini adalah Dr. Dieter Bartels, seorang antropolog Amerika yang juga pernah mengadakan studi di Maluku mengenai "pela". Sejumlah sejarawan Maluku di Negeri Belanda yang tergabung dalam Museum Maluku di Utrecht juga telah menghasilkan sejumlah tulisan dan buku mengenai keadaan orang Maluku di Negeri Belanda terutama dalam tahun-tahun 1950 an. Studi tersebut terakhir didasarkan pada dokumen-dokumen otentik pemerintah sehingga menghasilkan pengetahuan yang cukup menarik dan baru. Berbagai brosur dihasilkan pula oleh khalayak di Negeri Belanda, tetapi tidak digunakan di sini karena sangat subjektif sifatnya.

Selain itu perkembangan di Negeri Belanda selama tahun-tahun 1970 an dan 1980 an juga diperoleh dari serangkaian pembicaraan yang dilakukan Dr. RZ. Leirissa ketika berkunjung ke Amsterdam pada bulan April-Mei 1991 atas undangan "Yayasan Tjengke". Masalah yang dibicarakan ketika itu tidak banyak berbeda dengan yang dibicarakan oleh Dieter Bartels dalam bukunya tersebut di atas. Pada pokoknya kesimpulannya tidak jauh berbeda sekalipun Dieter Bartels sebagai antropolog lebih banyak menekankan aspek budaya, terutama budaya keluarga.

Pada kesempatan ini perlu disampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang memungkinkan ditulisnya buku ini. Selain team penulis dari Depdikbud, perlu juga disampaikan terima kasih kepada "Yayasan Tjengke", khususnya Herman Keppy, Anis de Fretes, Nina Wattimena, Bals Sahetary dan lain-lain. Merekalah yang memberi kesempatan luas untuk memepelajari orang Maluku di Negeri Belanda. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Dieter Bartels yang telah berbaik hati untuk memberikan sebuah buku mengenai hasil studinya di Negeri Belanda selama tahun-tahun 1983-1985. Terima kasih pula kepada pimpinan Museum Maluku di Utrecht. Drs. W. Manuhutu dan

Drs H. Smeets, yang demikian berbaik hati untuk menjelaskan isi museum tersebut dan rencana-rencana selanjutnya; juga kepada tim ahli bahasa di museum tersebut atas sumbangan buku-buku mengenai bahasa "Melayu Sini". Terima kasih juga kepada Drs. Habiboe dari Musuem Maluku. (calon doktor di Universitas Leiden), atas sumbangan buku-bukunya mengenai sejarah orang Maluku tahun 1951.

Jakarta, Januari 1993

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Politik Kepala Daerah Maluku Selatan Periode 16--31 Desember 1948 oleh AM. Pellaupessy, 6 Januari 1949 (Laporan Departemen Seberang Laut Belanda).
2. Laporan Politik Kepala Daerah Maluku Selatan Periode 1--15 Mei 1949 oleh AM. Pellaupessy, 20 Mei 1949 (Arsip Departemen Seberang Laut Belanda).
3. Laporan Politik Kepala Daerah Maluku Selatan Periode 16--31 Mei 1949 oleh AM. Pellaupessy, 4 Juni 1949 (Arsip Departemen Seberang Laut Belanda).
4. Surat Perwakilan Kerajaan Belanda (Lovink) pada Pemerintah Belanda 27 Juni 1949 (Arsip Departemen Luar Negeri Belanda).
5. Laporan Perwakilan Kerajaan Belanda (Dr. L.B. Van Straten) 15 Maret 1950 (Arsip Kementerian Luar Negeri Belanda).
6. Laporan Pj. Perwakilan Kerajaan di Makasar (Dr. L.B. Van Straten) 13 Mei 1950 (Arsip Kementerian Luar Negeri Belanda).
7. surat Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda (Hirschfeld), 18 Mei 1950 (Arsip Departemen Luar Negeri Belanda).

8. Surat Pemerintah Belanda Kepada Perdana Menteri RI. Hatta, 21 Juni 1950 (Arsip Departemen Luar Negeri Belanda).
9. Surat Pemerintah Belanda kepada KTN, 21 Juni 1950 (Arsip Departemen Luar Negeri Belanda).
10. Surat Pemerintah Belanda kepada Perdana Menteri RI. Hatta, 15 Juli 1950 (Arsip Departemen Luar Negeri Belanda).
11. Surat Pemerintah Belanda kepada KTN, 15 Juli 1950 (Arsip Departemen Luar Negeri Belanda).
12. Surat Perdana Menteri Drees kepada Perdana Menteri RI. Natsir, 3 Oktober 1950 (Arsip Departemen Luar Negeri Belanda).
13. Surat Perdana Menteri RI. Natsir kepada Perdana Menteri Belanda Drees (Arsip Departemen Luar Negeri Belanda).

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan</b> .....	iii
<b>Pengantar</b> .....	v
<b>Pengantar Penulis</b> .....	vii
<b>Daftar Lampiran</b> .....	xi
<b>Daftar Isi</b> .....	xiii
<b>Bab I Maluku dalam Masa Perang Kemerdekaan</b> .....	1
1.1 Perkembangan Kekuasaan Republik Selama Perang Kemerdekaan .....	1
1.2 Gerakan-gerakan dalam Masyarakat yang Me- nentang Republik .....	15
<b>Bab II Kesepakatan Konferensi Meja Bundar</b> .....	26
2.1 Pokok Kesepakatan yang mempengaruhi Ke- kuasaan RI .....	26
2.2 Pemikiran Soumokil Cs. tentang Pembentukan RIS .....	33
<b>Bab III Timbulnya Republik Maluku Selatan RMS</b> .....	40
3.1 Pembentukan RIS/Pembubaran NIT .....	40
3.2 Misi Putuhena yang Dikirim Menteri Pertahanan RIS .....	43

3.3	Tindakan Soumokil .....	44
3.4	Pembentukan (RMS) .....	47
<b>Bab IV Penumpasan RMS .....</b>		<b>58</b>
4.1	Penyelesaian Secara Damai .....	59
4.2	Pelaksanaan Operasi Militer .....	65
4.3	Pembentukan Aparat Kekuasaan RI di Maluku Berupa Pemda dan Kodim .....	78
<b>Bab V RMS Di Negeri Belanda .....</b>		<b>80</b>
5.1	Berangkat ke Negeri Belanda .....	80
5.2	Timbulnya RMS di Belanda .....	84
5.3	Pemukiman di Negeri Belanda .....	88
5.4	Generasi Baru .....	92
5.5	Semangat Baru .....	102
<b>Daftar Pustaka .....</b>		<b>110</b>
<b>Lampiran .....</b>		<b>112</b>

## BAB I MALUKU DALAM MASA PERANG KEMERDEKAAN

### *1.1 Perkembangan Kekuasaan Republik Selama Perang Kemerdekaan.*

Proklamasi 17 Agustus 1945, melahirkan Republik Indonesia sebagai negara baru, yang berhasil mencapai kemerdekaannya setelah melalui berbagai periode perjuangan melawan penjajah. Perjuangan mana kemudian dilanjutkan melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tentara Jepang pada 29 Mei 1945 dan berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar Negara, namun setelah tersusunnya Undang Undang Dasar, badan tersebut dibubarkan dan dibentuk badan lain yang kita kenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945 diketuai Ir. Soekarno. Badan ini ditugaskan untuk membuat rancangan suatu negara baru, tetapi sebelum keinginan Jepang itu terlaksana, mereka telah menyatakan takluk pada tentara Sekutu pada 15 Agustus 1945; dengan demikian Jepang tidak dapat memenuhi "Janji" nya.<sup>1</sup>

Badan tersebut tetap dipertahankan oleh pemimpin Indonesia, yang anggotanya meliputi para tokoh dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Atas kerja sama semua unsur dan setelah melalui berbagai tahapan dan persiapan, kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, dengan wilayah kekuasaannya meliputi wilayah bekas kekuasaan

Hindia Belanda. Proklamasi diikuti dengan pembentukan alat perlengkapan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah.

Pada 19 Agustus terbentuklah kementerian-kementerian dan delapan provinsi dengan para gubernurnya. Maluku merupakan salah satu dari delapan provinsi yang terbentuk ketika itu dengan gubernurnya Mr. Johannes Latuharhary anggota PPKI yang mewakili daerah Maluku. Namun demikian karena sulitnya komunikasi antara daerah dewasa itu, terutama daerah-daerah di luar Jawa (dan situasi yang belum mantap), maka roda pemerintahan belum dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu negara yang baru diproklamasikan, mulai menghadapi tantangan dan rongrongan dari berbagai pihak baik intern maupun ekstern. Tantangan ekstern yang utama adalah dari pihak Belanda yang sejak semula menolak legalitas kekuasaan Republik Indonesia. Pemerintah Belanda membentuk *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang berkedudukan di Brisbane Austrasia. Mereka mempersoalkan masalah Indonesia dan menuntut pengembalian kekuasaan Hindia Belanda ke bekas wilayah jajahannya. Sementara Inggris yang datang ke Indonesia untuk menerima penyerahan tentara Jepang, mendorong Belanda untuk mengadakan pendekatan terhadap pemerintah Republik.

Pada bulan September 1945 Kabinet Presidensial di bawah pimpinan Presiden Soekarno, harus menghadapi Tentara Inggris yang mewakili Tentara Sekutu dan Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Untuk menghadapi Belanda itu, Pemerintah RI menggariskan strategi perjuangan yang berdasarkan diplomasi untuk memperoleh pengakuan atas berdirinya negara baru. Jalan ini diambil karena pemerintah melihat, bahwa kekuatan militer Republik belum cukup terkonsolidasi untuk menghadapi kolonialisme Belanda. Berdasarkan strategi itu pemerintah menyatakan kesediaan untuk berunding dengan Belanda. Mula-mula Belanda menolak berunding dengan Soekarno-Hatta yang dianggapnya sebagai kolaborator dengan pemerintah pendudukan Jepang.

Sementara itu, kelompok yang ada zaman Jepang melakukan perjuangan di bawah tanah, tidak senang terhadap pimpinan negara dan para menteri yang pernah berkolaborasi dengan fasisme Jepang. Para pemuda dan mahasiswa yang mendapat dukungan Sutan Syahrir dan Sukarni merasa tidak puas terhadap Kabinet Presidensial peimpinan Soekarno yang menampakkan gejala-gejala otoriter.<sup>2</sup>

Kelompok tersebut berusaha mengubah kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer yang akan bertanggung jawab kepada suatu lembaga perwakilan. Lembaga yang telah berbentuk adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang pada saat terbentuknya adalah penasihat presiden, tidak merupakan lembaga perwakilan. Dalam perkembangannya kemudian, KNIP berubah menjadi lembaga perwakilan dengan kekuasaan legislatif. Untuk menjalankan kekuasaan sehari-hari KNIP kemudian membentuk sebuah badan pekerja (BP) KNIP. Badan ini terbentuk dalam Sidang KNIP 17 Oktober, dipimpin ketua II Mr. Johannes Latuharhary. Di dalam sidang itu St. Syahrir dan Amir Syarifuddin terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BPKNIP.<sup>3</sup>

Presiden kemudian membubarkan Kabinet Presidensial dan menunjuk Syahrir menjadi formatur untuk membentuk Kabinet Parlementer. Sutan Syahrir sebagai perdana menteri yang pertama dalam Kabinet Parlementer itu merangkap mendari dalam Negeri dan luar negeri.

Perkembangan selanjutnya BPKNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk partai-partai politik. Usul ini dinyatakan dalam pengumuman BPKNIP Nomor 3 tanggal 30 Oktober 1945.<sup>4</sup> Hal ini mendorong lahirnya partai-partai politik di tingkat nasional yang saling memperebutkan peranan di lembaga KNIP dan kabinet. Hal itu mengakibatkan ketidakstabilan kekuasaan negara dan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet dalam waktu yang relatif singkat.

Sementara itu pembentukan suatu kekuatan pertahanan keamanan belum dapat dilakukan. Usaha untuk mempertahankan republik dari tekanan Belanda dan Sekutu dilakukan oleh

para pemuda dengan mendirikan badan-badan perjuangan atau laskar-laskar dan Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang oleh Pemerintah kemudian diakui sebagai salah satu organ dalam pemerintahan. Selain di pusat, BKR juga dibentuk di daerah-daerah sebagai organ dari Komite Nasional Indonesia Daerah.

Di Jakarta para pemuda membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API), Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), dan lain-lain. Para pemuda Maluku sendiri yang terdiri atas Indoensia Ambon (API-Ambon) yang dipimpin H. Tanasale dan J. Patty, L. Polhaupessy, D. Pelupessy, P. Poetiray, F. Latumeten, F. Pattisina dan lain-lain. Bertindak sebagai penasihat adalah Gubernur Maluku J. Latuharhary.

Pada 19 Oktober 1945 para pemuda mengadakan rapat di kediaman Gubernur Latuharhary. Di dalam rapat tersebut dicetuskan suatu pernyataan bahwa, "Perserikatan Pemuda Ambon" membentuk barisan yang aktif serta membantu barisan-barisan lain untuk membela dan mempertahankan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu khusus kepada masyarakat Maluku, mereka juga serukan :

- (1) Kami orang Ambon bertanah air Indonesia,
- (2) Kami berjuang bersama-sama saudara lain golongan bangsa Indonesia untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia.
- (3) Kami tidak mau saudara-saudara kena ditipu muslihat Belanda, karena itu kami minta supaya jangan sekali-kali mau dipakai sebagai alat Belanda. Para bekas militer Belanda juga mereka yang masih aktif dalam tentara Belanda janganlah menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Ingat, bahwa Republik Indonesia menjamin keselamatan rakyat Indonesia pada umumnya dan golongan Ambon pada khususnya. Siapa di antara saudara-saudara yang belum dapat mengerti dan turut dengan cita-cita kita Indonesia Ambon, untuk membentuk Indonesia merdeka baiklah diam saja asal jangan turut Belanda. Jika saudara-saudara tidak memperhatikan yang tersebut di atas maka saudara-saudara sen-

diri membawa bahaya atas 30.000 jiwa orang Ambon di Jawa dan Madura".<sup>5</sup>

Mereka menyadari bahwa tidak semua orang Maluku sependapat dengan mereka. Dari jumlah 30.000 orang Ambon yang ada di Jawa tidak semuanya memihak Republik. Ada sementara orang-orang Ambon dapat bekerjasama dengan Belanda. Akibatnya banyak orang-orang Ambon yang tidak mengerti akan perkembangan politik mendapat kelusitan. Kesulitan-kesulitan yang dimaksud telah mulai muncul dalam bulan September 1945 yaitu dengan datangnya NICA dan KNIL.

Pada waktu yang bersamaan NICA juga masuk ke daerah Indonesia Timur di Sulawesi dan Maluku yang secara berangsur-angsur menggantikan kedudukan Tentara Australia (Sekmen) di Ambon dan Makasar

Di Jakarta dan kota-kota lain di Pulau Jawa dan juga Sumatera mulai terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata. Para pemuda Ambon (Maluku) di Bandung dan Surabaya ikut bergabung dalam badan-badan perjuangan seperti Persatuan Perjuangan dan PRIMA (Pemuda Republik Indonesia Maluku), namun ada penduduk yang memandang pemuda Ambon ini antek-antek Belanda, sedangkan di antara mereka sendiri timbul pertentangan antara mereka yang cenderung memihak Belanda dengan mereka yang memihak Republik.

Perkembangan situasi yang kurang menguntungkan itu, menyebabkan Latuharhary sebagai gubernur dan beberapa kepala pemerintahan daerah Indonesia Timur belum dapat menduduki posnya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana mestinya. Namun demikian hal itu tidak berarti gubernur tak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan daerah Maluku.

Pada 25 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pertama gubernur Maluku tentang dibukanya Kantor Gubernur Maluku di Jakarta, disusul dengan pengumuman pembukaan kantor-kantor pembantu gubernur di 13 kota lain di Jawa dan Sumatera.<sup>6</sup> Meester Latuharhary sendiri di samping sebagai

gubernur, ia berhasil menyadarkan orang-orang Maluku yang ada di Jawa dan Sumatera, agar mereka mengerti perkembangan politik baru untuk menghapuskan ilusi bahwa Belanda akan memerintah Indonesia lagi. Mereka itu antara lain adalah para pegawai dan bekas murid dari *Ambonsche School* di Jawa, yang dahulu dididik dan ditekan untuk taat kepada pemerintah kolonial Belanda.<sup>7</sup>

*Ambonsche School* tersebut merupakan tempat persemaian bibit pegawai dan tentara kolonial, dengan sistem pendidikan yang mempertajam ketegangan antara masyarakat Ambon dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di sekitarnya. Usaha Gubernur Latuharhary di atas merupakan manifestasi dari gagasan dan cita-citanya yang pernah dikemukakan dalam salah satu "Konferensi Nasional Indonesia". Ia menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memupuk idealisme kemerdekaan Indonesia di kalangan orang-orang Ambon.<sup>8</sup> namun di pihak lain, sejak tahun 1928 telah nampak perbedaan di kalangan orang-orang Ambon (Maluku) sendiri. Ada yang mendambakan persatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia dan ada pula yang bersikap menentang atau ragu-ragu. Mereka yang tidak mau digolongkan sebagai bangsa Indonesia mendirikan organisasi-organisasi lain. Sementara yang mendambakan persatuan nasional bergabung dalam Sarekat Ambon yang berturut-turut dipimpin AJ. Patty, Dr. Kayadu, dan Mr. J. Latuharhary.

Di antara tujuan organisasi-organisasi itu ada satu segi yang sama, yaitu memajukan dan mengutamakan kepentingan sosial ekonomi bagi masyarakat Ambon, dan memperjuangkan perluasan otonomi bagi Maluku Tengah (Maluku Selatan). Lebih jauh lagi ada di antara mereka ingin menjadikan Maluku sebagai suatu negara tersendiri ataupun suatu provinsi dari Nederland. Keinginan ini selalu ditonjolkan pada setiap kesempatan resmi maupun tidak resmi. Ini merupakan pikiran-pikiran dari para intelektual yang tidak besar jumlahnya seperti Dr. Apituley wakil Ambon dalam *Volksraad* atau Manusama yang kemudian menjadi guru MULO di Ambon. Masalah persatuan nasional dan

kemerdekaan Indonesia menjadi pangkal pertentangan mereka, sehingga sering timbul konflik-konflik terbuka. Ketika Sarekat Ambon meningkatkan perjuangan bersama organisasi nasional lainnya untuk mewujudkan persatuan dan kemerdekaan Indonesia, kelompok yang lain tetap berpendirian dan berpihak kepada Hindia Belanda. Mereka inilah yang kemudian menjadi penyokong-penyokong yang gigih dari Negara Indonesia Timur ciptaan Belanda dan mereka juga yang kemudian berperan dalam menciptakan dan mempertahankan Republik Maluku Selatan (RMS).

Sementara itu di Pulau Jawa dukungan pemuda dan masyarakat Indonesia terhadap Republik nampak meluap di mana-mana. Namun demikian kembalinya NICA yang dipimpin HJ. Van Mook dan Pemerintah Belanda merasa yakin akan dapat menciptakan tertib hukum keamanan, dan kesejahteraan di Indonesia sehingga mereka yang berlindung di bawah naungan Pemerintah Belanda akan dapat menikmati kebahagiaannya.<sup>9</sup>

Keyakinan mereka segera goyah ketika terjadi pertempuran 10 November di Surabaya yang menewaskan Jenderal Malaby, pimpinan pasukan Inggris. Kenyataan itu mengubah persepsi Inggris dan Sekutu terhadap Indonesia. Atas dorongan Inggris, pada 17 November 1945 Pemerintah RI bersedia berunding dengan Belanda. Delegasi RI yang dipimpin Perdana Menteri Syahrir, Perundingan pada waktu itu belum menghasilkan sesuatu, yang berarti.

Dalam perundingan lanjutan pada Februari 1946, Van Mook yang sejak semula mempunyai konsep federal mengajukan konsep yang suatu Negara Indonesia yang bukan republik, yang akan dibentuk beberapa puluh tahun lagi. Sementara itu kekuasaan Belanda atas Indonesia harus diakui. Pihak Indonesia menolak konsep tersebut karena bertolak atas dasar kemerdekaan 100%: dengan demikian perundingan berlangsung berulang-ulang dengan saling mempertahankan tuntutannya.

Pada akhirnya PM. Syahrir mundur dari tuntutannya semula, dan harus puas dengan menerima pengakuan *de facto*,

kekuasaan Republik atas Jawa dan Sumatera saja dan bersama Belanda bersedia membentuk suatu negara federal di Indonesia, di mana RI berstatus negara bagian bersama negara-negara bagian Kalimantan dan Indonesia Timur. Hal ini dituangkan dalam Persetujuan Linggajati.

Kenyataannya persetujuan ini hanya merupakan hasil proses diplomasi pada forum resmi, karena selama masa perundingan dengan RI, Belanda (Van Mook) juga mengadakan perundingan dengan daerah-daerah Indonesia lain secara sistematis. Ia mengadakan Konferensi Malino, Konferensi Pangkalpinang, dan



*Konferensi Den Pasar. Berdirinya NIT*

Konferensi Denpasar. Di dalam konferensi-konferensi itu ia menciptakan negara-negara kecil sebagai negara federal, tanpa mengikutsertakan Republik Indonesia dalam pembentukan tersebut. Dalam Konferensi Denpasar pada Desember 1946 terbentuk Negara Indonesia Timur dengan pusatnya di Makasar (Ujung Pandang).

Persetujuan Linggarjati yang ditandatangani pada bulan Maret 1947, terdiri atas 17 pasal. Ada yang menerimanya (pro) dan ada yang menolak (kontra), sehingga terjadilah pertentangan antara pro dan kontra sebelum penandatanganan berlangsung. Pertentangan semakin berkembang lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden/Maklumat Nomor 6 tanggal 30 Desember 1946, yang berisi tentang penambahan jumlah anggota KNIP yang bertujuan mengubah perimbangan kekuatan di dalam KNIP supaya cenderung bersikap pro kepada Persetujuan Linggarjati.<sup>10</sup> Karena pertentangan itu, maka Perdana Menteri Syahrir tidak mendapat dukungan lagi sehingga ia menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal dalam persetujuan Linggarjati menimbulkan ketegangan-ketegangan baru. Hal ini ditambah lagi dengan pelanggaran-pelanggaran oleh Belanda atas gencatan senjata yang telah diumumkan dan agresi militer pertama yang dilancarkan pada Juli 1947. Terhadap keadaan itu Dewan Keamanan PBB menyerukan untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan pertikaian dengan cara perwasitan (*arbitrase*) atau dengan damai.



*Suasana di Malino rad itu*



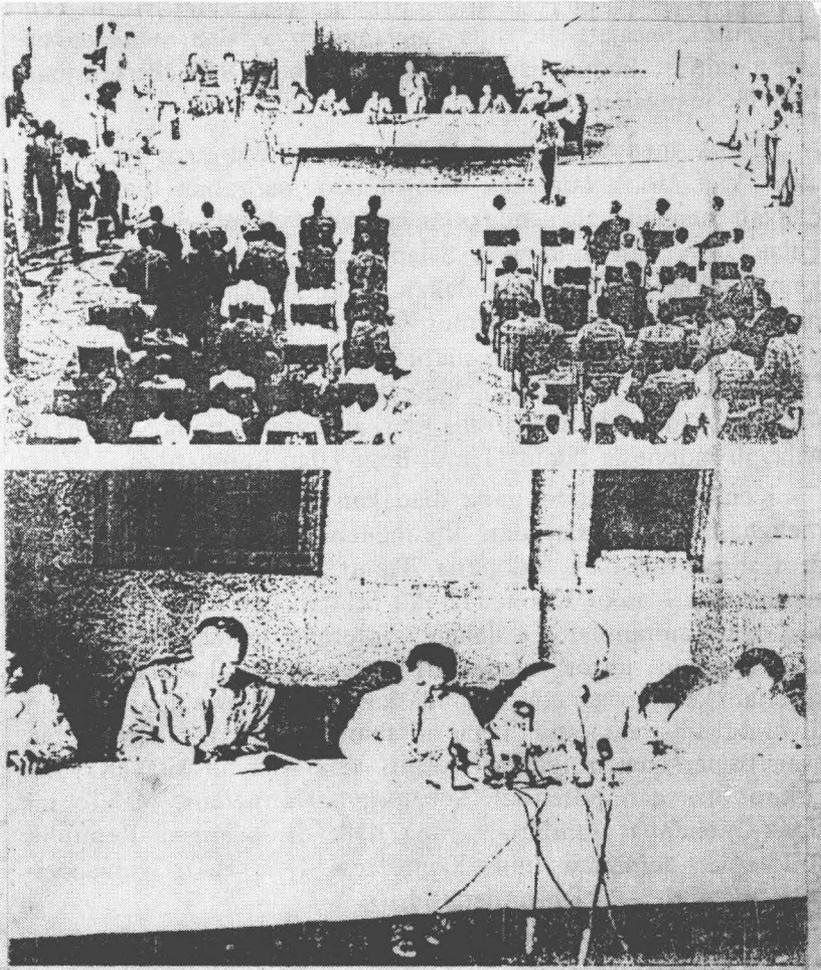
*Van Mook sedang memimpin konferensi Malino*

Dengan demikian perundingan dilanjutkan lagi berkat jasa baik KTN, di atas kapal Renville. Perundingan dimulai pada 8 Desember dan berakhir 17 Januari 1948. Perundingan ini lebih mempersempit lagi daerah kekuasaan Republik, tetapi persetujuan ini pun mengalami nasib yang sama dengan Persetujuan Linggajati. Belanda melanggarnya dan mengadakan agresi militer kedua pada bulan Desember 1948. Persetujuan Renville mengalami kegagalan.

Untuk menutupi kegagalan-kegagalan diplomasi itu, sejak awal Van Mook berusaha mengalihkan perhatian luar negeri dengan mengadakan pendekatan terhadap daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya Van Mook menjajaki kemungkinan untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia Timur (*Grote Oost*) dan Kalimantan dengan maksud menyusun suatu struktur ketatanegaraan baru. Usahnya tidak mendapat banyak rintangan karena dibantu panglima dan tentara Australia (dari angkatan perang Sekutu) di wilayah Indonesia Timur (Timur Besar) dan Kalimantan.

Konferensi Malino yang diadakan pada 16–25 Juli 1946 menghadirkan utusan dari kurang-lebih 18 daerah yang ada di Kalimantan dan Indonesia Timur termasuk Maluku yang terdiri atas Mauku Utara, Maluku Selatan dan Kepulauan Aru, Kei dan Tanimbar. Di dalam konferensi tersebut Van Mook menyarankan untuk menganut sistem federal dalam suatu susunan ketatanegaraan. Ditandaskan pula bahwa apabila akan diwujudkan suatu sistem pemerintahan federal harus diputuskan agar bagian-bagian federasi terdiri atas wilayah-wilayah yang cukup luas dan potensial. Sebaliknya Konferensi Malino ini tidak mendapat sambutan yang baik di kalangan Republik Indonesia, demikian pula Konferensi Den Pasar yang berlangsung dari 7–24 Desember 1946.

## PERUNDINGAN LINGGAJATI



Bertolak dari hasil dua konferensi itu dan terutama karena belum etorganisasinya secara baik pemerintahan Republik sendiri, berdirilah negara-negara boneka hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya Negara Indonesia Timur NIT) di mana Maluku Selatan termasuk di dalamnya.

Dengan adanya persetujuan Linggarjati dan kemudian Renville, "Propinsi Maluku" bersama beberapa daerah propinsi lainnya dibubarkan.

Di daerah Maluku sendiri, masuknya NICA bersama tentara Australia merupakan awal dari pergolakan baru. Berita mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terlambat diterima, sehingga rakyat pun kurang mengerti mengenai situasi dewasa itu. Propaganda NICA dapat menghilangkan keragu-raguan tentang terjadinya proklamasi. Propaganda tersebut ialah, bahwa di Jawa telah terjadi suatu pemberontakan oleh gerombolan bernama "Merah Putih" yang menimbulkan kesan buruk.



*E U Pupella pimpinan  
PIM Maluku*



*Alexander Jacob Patty  
pimpinan Sarekat Ambon*

Para raja pati (kepala pemerintah desa) yang dalam masa penjajahan setia kepada Belanda mengambil kesimpulan bahwa mereka harus berdiri di belakang NICA. Hal itu diperkuat lagi dengan tersiarnya berita bahwa pihak Belanda akan melaksanakan janji Ratu Belanda tahun 1942, untuk membentuk suatu Indonesia yang otonom dan demokratis, dan sebagai mitra sejajar dalam lingkungan kerajaan Belanda. Dengan demikian NICA berhasil mengajak pemimpin-pemimpin rakyat untuk bekerja sama dalam suatu Dewan Penasihat. Selanjutnya selama enam bulan berikutnya, kelompok-kelompok yang loyal terhadap Belanda, mempersiapkan suatu gagasan dan mengusulan untuk membentuk suatu *Gemenebest Molukken* atau Persemakmuran Maluku yang terdiri atas Maluku Utara, Irian Barat, dan Maluku Selatan.<sup>11</sup>

Sementara itu ada sekelompok masyarakat Maluku yang pro-Republik. Mereka itu terutama yang dipimpin EU. Pupella dan Win Reawaru dari Partai Indonesia Merdeka (PIM). Partai ini didirikan pada 17 Agustus 1946, tepat pada ulang tahun pertama Proklamasi Kemerdekaan RI. Partai Indonesia Merdeka diartikan juga sebagai Pemuda Indonesia Maluku yang mempunyai anggota cukup banyak terutama di kalangan desa-desa muslim. Pada rapat pengesahannya, Pupella menguraikan garis-garis besar tujuan partainya, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Pupella yang semula ditangkap NICA dibebaskan kembali. Karena pengikutnya cukup banyak di kalangan rakyat pedesaan, maka dengan dalih demi kestabilan politik ia diajak masuk menjadi anggota Dewan Penasihat Residen (*Adviesraad*). Anggota lainnya adalah Dr. Tahitu, J. Picauli, AS. Seharlawan, Imam Hatala, Hamid bin Hamid, dan Hong Bun Hiong.<sup>12</sup>

Para anggota Dewan kemudian mengusulkan untuk membentuk suatu dewan yang lebih besar dan luas berdasarkan pemilihan. Partai Indonesia Merdeka yang dipimpin Pupella telah mengorganisasi dirinya pada saat yang tepat sehingga siap mengikuti pemilihan umum yang disponsori Belanda awal November 1946. Selain Partai Indonesia Merdeka, kon-testan lainnya adalah para raja, pendeta dan kaum veteran yang

tergabung dalam Sembilan Serangkai, tetapi dalam kampanye pemilihan itu dibentuk suatu Komite Pemilihan Khusus. Di samping dua kontestan ini ada sejumlah calon bebas, di antaranya Tahitu dan Wairisal yang mengadakan kampanye bersedia mendukung rencana Belanda untuk membentuk negara federal. Pemilihan itu berhasil membentuk dewan yang diinginkan, dengan nama "Dewan Maluku Selatan" yang pada dasarnya sama dengan *Ambon Raad* di masa lalu. Hanya diperluas sehingga mencakup wikil-wakil dari Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (pulau-pulau Kei, Aru, dan Tanimbar).

Salah satu keputusan politik yang terpenting dari Dewan Maluku Selatan adalah bergabung dengan Indonesia Timur. Keputusan ini pada mulanya disokong oleh kelompok yang mencita-citakan negara kesatuan, terutama PIM dan unsur-unsur lainnya yang seide. Namun demikian di kemudian hari, mereka ini menyokong pula pembubaran negara-negara bagian di dalam RIS termasuk NTT dan menginginkan persatuan dengan Republik Indonesia

### ***1.2 Gerakan-gerakan dalam Masyarakat yang Menentang Republik***

Sejak tahun pertama lahirnya Republik, telah nampak adanya gerakan-gerakan yang cenderung menentang kekuasaan negara. Meskipun pihak para pendukung proklamasi menyambut gembira dan berusaha keras untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, namun masih ada anasir-anasir lain yang berusaha merusak Republik dari dalam. Gejala-gejala inilah yang mengurangi kekuatan dan kekuasaan Republik dalam masa Perang Kemerdekaan baik itu dalam bidang politik pemerintahan negara, maupun militer.

Perkembangan politik di Indonesia Timur sangat berbeda. Berita proklamasi yang diterima disambut gembira, tetapi segera menggiring mereka dalam keragu-raguan, karena hubungan dengan para pemimpin republik di Jakarta sangat lambat. Keadaan itu ditambah lagi dengan adanya

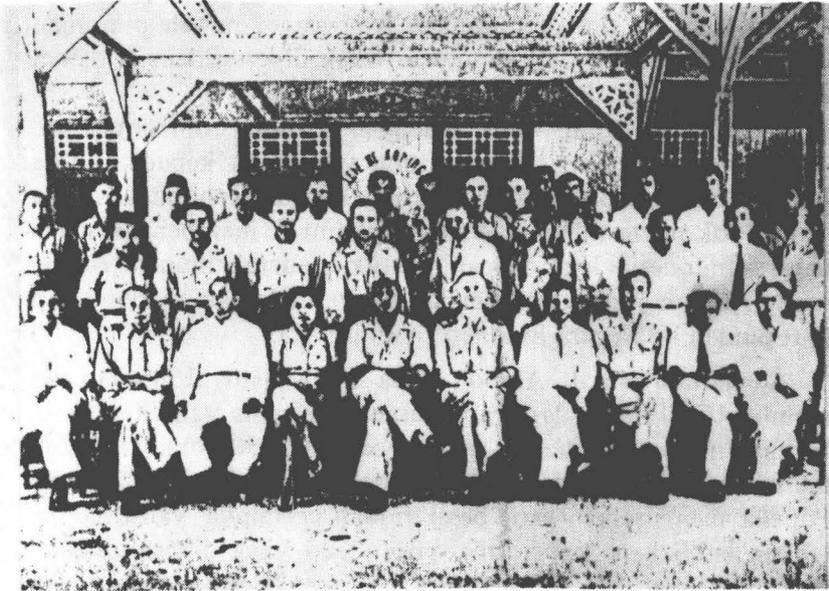
kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang pro-republik dan yang lain menginginkan keadaan kembali sebagaimana sebelum PD. II, yakni dalam pemerintahan Hindia Belanda.

Sementara itu pada 24 Agustus 1945 dibuat suatu perjanjian antara Inggris dan Belanda. Dalam perjanjian itu pemerintah pelarian Belanda (NICA) di Brisbane diizinkan sekutu (Inggris dan Australia) masuk ke Indonesia Timur. Secara berangsur-angsur mereka membangun aparat kekuasaannya di sana yang berpusat di Makasar (Ujung Pandang). Selanjutnya secara berangsur-angsur pula berusaha mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Inilah yang menimbulkan pertentangan dan ketegangan antara Republik dan Pemerintah Belanda (NICA).

Ketegangan-ketegangan politik itu diikuti dengan kekacauan-kekacauan karena tidak adanya jaminan keamanan. Tentara KNIL bertindak sekehendak hati mereka di kota-kota besar seolah-olah tidak pernah ada proklamasi Kemerdekaan. Tindakan-tindakan mereka kemudian dibalas oleh para pemuda yang tergabung di dalam badan-badan perjuangan. Dengan demikian terjadi pertempuran-pertempuran di dalam kota maupun di pinggiran kota sehingga banyak orang tak dapat bergerak dengan bebas. Masyarakat Ambon dan Minahasa yang berdiam di kota-kota besar di Jawa merasakan akibatnya. Mereka dianggap cenderung memihak Belanda sehingga pertentangan-pertentangan antara kedua belah pihak tidak dapat dielakkan. selama kurang-lebih enam bulan dari saat proklamasi, kelompok-kelompok loyalis yang kolot di Ambon memegang inisiatif. Gagasan-gagasan yang paling kongkret yang mereka usulkan ialah membentuk *Gemeenebest Molukken* (Persemakmuran Maluku).<sup>13</sup> Persemakmuran tersebut terdiri atas Maluku Utara, Irian Barat, dan Maluku Selatan.

Usul itu ternyata mendapat dukungan luas dari para raja patih dan para elit (intelektual) di Ambon dan lingkungan intelektual (emigran) di Jawa, tetapi gagasan Persemakmuran Maluku itu kemudian tak dapat diwujudkan, karena sultan

*Dewan Maluku Selatan (1946 --1948)*

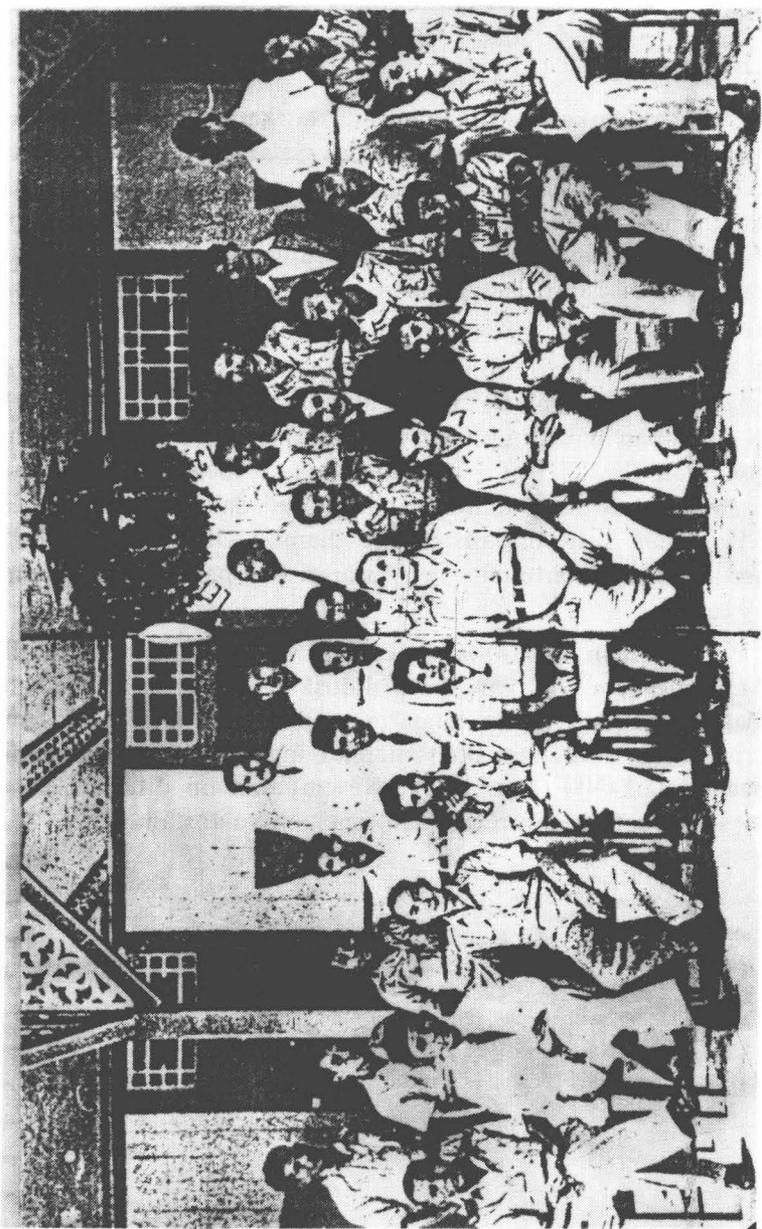


*Tentara KNIL*

Ternate sebagai kepala swapraja di Maluku Utara tidak menyetujui usul-usul tersebut. Usul dan gagasan itu diajukan kepadanya oleh suatu tim perundingan Ambon, di bawah pimpinan Tahitu. Gagasan ini pun kemudian tidak diperdulikan di dalam konferensi Malino dan terlantar begitu saja.

Pada awal tahun 1946 di tengah suasana konfrontasi terhadap Belanda, orang-orang Ambon yang setia kepada Hindia Belanda mengadakan protes nyaring kepada Republik. Ketika Van Mook mengembangkan siasatnya untuk membentuk suatu negara Indonesia lain dengan bentuk federal, muncul orang-orang Ambon yang loyal semakin banyak. Mereka ini kemudian ikut pindah ke Negara Indonesia Timur (NIT).

Sementara itu di Ambon pada 17 Agustus 1946 Pupella membentuk PIM. Dalam rapat umum pertama yang diadakan, berhasil menarik perhatian masa sebanyak 1.500 orang. Jumlah ini merupakan 3/4 bagian dari keseluruhan anggota, di mana Pupella menguraikan garis besar tujuan pertainya, yaitu menjalankan kebijakan koperatif pro-federal yang diperhitungkan secara hati-hati. Hal ini erat kaitannya dengan kepentingan Indonesia di kawasan yang dikuasai Belanda. Juga masih terdapat pengaruh kelompok-kelompok yang berpegang erat pada pemikiran loyalis terhadap Belanda. Sementara di pihak lain ada kelompok Wim Reawaru yang beroposisi terhadap Pupella. sifat pragmatisme Pupella yang agak berbeda dengan dukungan terbuka reawaru kepada RI, menjadi sumber



ketegangan yang tiada hentinya dalam tubuh PIM sendiri. Selain itu saingan PIM adalah raja-raja para pendeta Protestan dan kaum Veteran (KNIL).

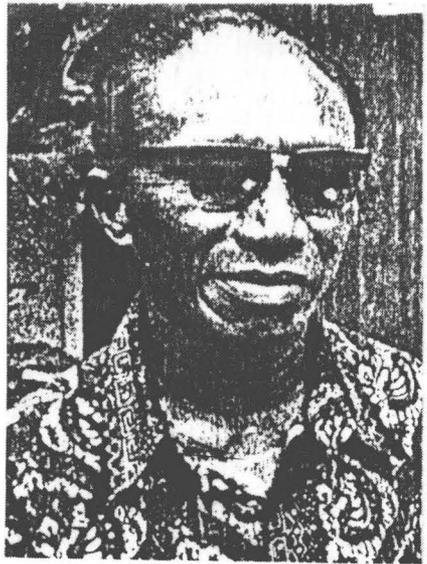
PIM diizinkan untuk mengadakan kampanye dalam rangka pemilihan anggota Dewan Maluku Selatan (DMS). Kampanye diadakan sampai ke desa-desa, kemudian pemilihan diadakan dalam dua tahapan. Hasilnya adalah kemenangan besar buat PIM yang menggondol empat dari tujuh kursi yang diprerebutkan. Dokter Tahitu mendapat satu kursi dan para raja mendapat dua kursi.<sup>14</sup>

Hasil Pemilihan tersebut memperlihatkan keadaan masyarakat yang terpecah-belah dan ada yang tak merasa yakin akan masa depan dan pimpinannya terutama kaum loyalis. Namun demikian Dewan Maluku Selatan tetap terbentuk sebagai badan perwakilan Ambon di tingkat terbawah dalam struktur federal NIT. Salah satu tindakan yang diambil DMS adalah memilih perutusan ke Konferensi Den Pasar di Bali pada bulan Desember 1946.

Tiga bulan kemudian dewan ini mengukuhkan kedudukan Ambon dalam NIT yang baru didirikan. Ditetapkan juga bahwa Maluku Selatan harus tetap menjadi bagian dari NIT sampai rapat menentukan apakah mereka ingin meneruskan menjadi bagian dari NIT atau tidak. Kesempatan ini diterima dengan 37 suara setuju lawan tiga dan tiga lainnya abstain.<sup>15</sup>



*J. de Fretes*



*Dr Frans Patrasina*



*J. Taliya*



*Mayjen J Muskita*

Sesudah pertemuan dewa, kurang-lebih selama dua bulan padat dengan kegiatan politik. Diantaranya ialah kunjungan Presiden NIT Tjokorda Sukowati, dan serentetan rapat yang diadakan oleh kaum loyalis. Di samping itu ada kelompok lain yang tidak menetap di Ambon atau Sulawesi, tetap melancarkan kampanye agar Maluku Selatan cepat menarik diri dari NIT. Demikian pula beberapa raja pati yang termasuk "kolot" yang dipelopori Gasperz dan Pelu. Mereka juga menginginkan supaya Maluku Selatan keluar dari NIT. Sebaiknya Partai Indonesia Merdeka dan Pupella justru menjadi pembicara utama yang setuju tetap di dalam NIT.

Kelompok yang seide dengan Pupella ini merupakan golongan mayoritas dalam Dewan Maluku Selatan (DMS) dan masyarakat Pulau Ambon sehingga tidak mengherankan jika para raja dan kaum intelektual (elit lama) merasa kurang diwakili, baik di DMS sendiri maupun di parlemen NIT. Sementara itu muncul pula kelompok lain yang terdiri atas raja-raja, pastor-pastor/Pendeta dan kaum veteran yang bekerjasama dengan perhimpunan guru dan suatu perhimpunan Kristen membentuk sebuah federasi dengan dengan nama Gabungan Lima atau Pata Lima yang kemudian berubah menjadi Gabungan Sembilan atau Pata Siwa, Selanjutnya menjadi Gabungan Sembilan atau Pata Siwa, selanjutnya menjadi Siwa Lima yang disebut Gabungan Sembilan Serangkai (GSS).<sup>16</sup> Federasi ini menentang kemerdekaan dan lebih menyukai Pemerintah Belanda yang kekal di Maluku Selatan. Mereka juga berpendapat kelak orang-orang ambon dapat menerima tanggung jawab pemerintahan, tetapi Ambon akan tetap berada dalam lingkungan Kerajaan Belanda.

Selain itu paham GSS ini erat kaitannya dengan Persatuan Timur Besar (PTB) yang berpusat di Jakarta. PTB juga berusaha memisahkan Ambon, Menado dan Timor dari Indonesia agar dapat bergabung membentuk kesatuan sendiri dalam Kerajaan Belanda dengan status seperti Suriname dan Curasao.

Selain itu kesatuan-kesatuan KNIL baik yang bermarkas di Penteng Rotterdam Makassar (Ujung Pandang), maupun yang

bermarkas di Benteng Victoria Ambon memainkan peranan penting. Mereka itu menganggap daerah-daerah ini masih dikuasai Belanda sehingga mereka merupakan tentara resmi. Persoalan yang timbul kemudian, tentu pertentangan antara mereka dengan penduduk. Di Ambon sendiri timbul pertentangan-pertentangan antara mereka dengan orang-orang Maluku/Ambon yang memihak republik. Keadaan semacam ini bisa meletus menjadi pertumpahan darah.

Setelah disahkannya Negara Indonesia Timur pada awal 1947, dibentuk aparat pemerintahan Parlemen dengan dua kamar, tetapi kekuasaan sebenarnya berada pada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia.<sup>16</sup> Tentara NIT misalnya adalah KNIL yang dipimpin dari Batavia. Demikian pula kepolisian walau secara teoritis berada di bawah kekuasaan Jaksa Agung NIT.

Persoalan ketentaraan ini baru dapat diselesaikan dalam Konferensi Meja Bundar 17, namun persoalan di Makasar tidak mudah. Tokoh-tokoh federasi yang ekstrim menolak masuknya TNI ke wilayah Indonesia Timur. Mereka menginginkan agar penyelesaian persoalan tentara itu didasarkan pada ketentuan-ketentuan KMB. Terutama Dr. Soumokil yang pada waktu itu selain menjabat menteri kehakiman, juga bertindak sebagai wakil perdana menteri NIT, sehingga usaha-usaha untuk membentuk kesatuan-kesatuan APRIS selalu mendapat tantangan dari pihak-pihak yang tidak menyukainya. Ditambah lagi persoalan-persoalan ketentaraman ini juga merambat sampai ke Maluku.

## CATATAN

- 1) Kan Po. No. 70 di dalam Nugroho Notosusanto (Ed) *Sejarah Nasional Indonesia VI*, dan R.Z. Leirissa. *Maluku Dalam Perjuangan Nasional*, hlm. 100.
- 2) I.O. Nanulaita. *Johannes Latuharhary Karya dan Pengabdiannya* : Ditjarnitra, IDSN, 1982/1983. hlm. 132–133.
- 3) *Ibid.*
- 4) Makrus Irsyam cs. *Sejarah Kepartaian di Indonesia*, Ditjarnitra, IDSN, 1985. hlm. 8–9.
- 5) Leirissa RZ. *Maluku Dalam Perjuangan Nasional* F. Sastra, U.I. Jakarta, 1975 hal 104.
- 6) R.Z. Leirissa., *Ibid.*
- 7) R.Z. Leirissa, *Pemberontakan RMS, Prisma* Agustus 1978. hal. 27
- 8) *Ibid.*
- 9) Nugroho Notosusanto. *SNI. VI*. hal. 104–105.
- 10) Leirissa, R.Z. *op. cit*
- 11) R. Chanvil, *Bukan Revolusi Melainkan Kontra Revolusi, Pergerakan Daerah pada awal Kemerdekaan*, Grafiti Jakarta, 1989. hal. 249.

- 12) *Ibid.*, hal. 252.
13. *Ibid.* ,
- 14) Nama ini berasal dari Gabungan Lima (Pata Lima) dan Gabungan Siswa (Pata Siwa) = Sembilan yang dirangkai menjadi Siwa Lima, yang artinya Gabungan dari bermacam-macam kelompok (kelompok lima dan kelompok sembilan).
- 15) RZ. Leirassa., *Pemberontakan RMS* di dalam, *Prisma* Nomor 7, Agustus LP3ES, Jakarta, hal. 31.

## BAB II KESEPAKATAN KONFERENSI MEJA BUNDAR

### *2.1 Pokok-pokok Kesepakatan yang Mempengaruhi Kekuasaan RI*

Situasi sosial politik di masyarakat, baik itu di Maluku, NIT, maupun Republik mempunyai hubungan keterikatan yang erat. Pemerintah Belanda yang bermaksud membentuk pemerintahan federal di Indonesia, senantiasa berusaha keras mempengaruhi golongan-golongan tertentu. Kelompok-kelompok tersebut seperti yang sudah diutarakan di muka, adalah kaum politisi yang cenderung menghendaki adanya kekuasaan Belanda di Indonesia. Sementara itu Pemerintah Republik dan kaum nasionalis Indonesia, juga berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dan eksistensi negara, demikian pula kedaulatannya atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.

Segala upaya yang telah ditempuh kedua belah pihak ternyata selalu menemui kegagalan. Masing-masing pihak tetap pada prinsipnya. Pihak Indonesia menggunakan media perundingan untuk mempertahankan prinsipnya dan memenangkan diplomasi. Belanda pun demikian, yakni dengan "menghalalkan" berbagai cara, antara lain dengan aksi-aksi militernya yang

sekalipun mendapat tanggapan yang negatif dari dunia internasional terutama setelah tindakan aksi militer kedua pada 19 Desember 1948.

Melihat perkembangan tersebut, Pemerintah Belanda merasa bahwa, "adalah merupakan suatu keharusan untuk merumuskan suatu kebijaksanaan mengenai masalah Indonesia". Sehubungan dengan itu Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia Dr. LJM. Beel, tetap mempertahankan pendiriannya yang telah diajukan kepada pemerintahnya sebelum terjadinya aksi militer, yakni sehari sebelum aksi militer yang direncanakan itu. Beel memberlakukan Peraturan Tatapraja dalam Masa Peralihan di Indonesia. Peraturan itu telah disepakati di Den Haag, yang bertujuan membentuk "Pemerintah Federal Sementara" tanpa Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Sementara itu pemerintah NIT yang juga telah mengetahui rencana aksi militer itu, menolak turut serta dalam pembentukan suatu Pemerintahan Federal Sementara, karena berdasarkan permufakatan yang dirumuskan dan dicapai dalam muktamar Den Haag, pemerintahan federal tidak dapat dibentuk bila didahului oleh suatu aksi militer. Namun demikian Beel terus memaksakan kehendaknya,<sup>2</sup> oleh sebab itu ia meminta Perdana Menteri Belanda Dr. W. Drees untuk datang ke Jakarta dan merundingkannya. Beel juga mengundang Pertemuan Musyawarah Federal (BFO) dalam perundingan itu, pada bulan Januari 1949.

Perkembangan selanjutnya adalah penentuan "Kebijaksanaan" pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Kebijakan ini menjadi mendesak setelah diketahui, bahwa Dr. JLM. Beel merumuskan suatu gagasan baru, mengenai pembentukan tertib hukum baru di Indonesia, setelah ternyata ia gagal dalam usahanya membentuk suatu Pemerintahan Federal Sementara, tanpa ikut sertanya Republik Indonesia. Gagasan itu, yang kemudian diperkenalkan oleh pemerintah Belanda sebagai "gagasan Beel", mendapat perhatian

dari berbagai pihak. Pokok gagasan adalah, untuk mempercepat penyerahan kedaulatan di Indonesia. Untuk itu harus mengadakan persiapan di segala bidang termasuk hubungan antara kedua negara dalam bentuk UNI, dan Rencana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. <sup>3</sup>

Kebijaksanaan ini kemudian dibicarakan dalam KMB yang dimulai pada 23 Agustus 1949. Konferensi yang berlangsung selama dua bulan lebih berjalan alot, karena berbagai kebijaksanaan yang menyangkut kekuasaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Selain masalah Irian Barat yang merupakan pokok pembicaraan yang serius, persoalan NIT pun tidak kurang pentingnya.

Dalam memorandum 22 Juni 1949 disebutkan mengenai "kepentingan lain yang besar artinya". Memorandum ini telah menimbulkan kesulitan besar dalam proses penyelesaian KMB, karena wakil-wakil dari golongan-golongan ini ingin mengemukakan pandangannya. Selain itu pemerintah Belanda menghendaki agar organisasi separatis Twapro di Minahasa dan Partai Timur Besar (PTB) masuk dalam golongan tersebut. Partai Timur Besar sebagai suatu Badan Gabungan dari semua aliran di Indonesia Timur, yang terdiri atas Minahasa, Ambon (Maluku Selatan) dan Timor. Golongan ini ingin memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur untuk membentuk hubungan hukum dan ketatanegaraan dengan Kerajaan Belanda.

Di Manado timbul pula suatu kelompok yang menamakan dirinya Komite Ketatanegaraan Minahasa, yang bertujuan memisahkan daerah Minahasa dari wilayah NIT. Dalam hal ini delegasi Belanda mendesak agar Twapro dan PTB didengar suaranya oleh KMB, namun Pemerintah Belanda kemudian menemui kesulitan menghadapi masalah "kepentingan-kepentingan berharga" tersebut di atas. Partai Timur Besar Trapro dan Komite Ketatanegaraan Minahasa mendesak kepada Pemerintah Belanda agar suara mereka didengar oleh KMB sebagai "peserta resmi yang sejajar kedudukannya" dengan delegasi-delegasi dalam KMB. Permintaan itu tentu tidak dapat dipenuhi

karena bertentangan dengan Peraturan Tatatertib KMB dan Memorandum KMB 23 Juni 1949.

Kegtidakberhasilan itu menyebabkan kekecewaan, sehingga mereka menuduh Pemerintah Belanda telah meninggalkan mereka. Padahal dahulunya mereka diberi janji-janji muluk oleh Pemerintah Belanda, karena mereka dianggap sebagai pendukung kepentingan Belanda yang sangat setia.<sup>4</sup>

Di samping ketiga kelompok di atas, ada pula kelompok-kelompok lain yang ingin didengar pendapatnya juga oleh KMB, yaitu daerah Tapanuli, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Inderagiri, dan Sumatera Barat.

Pada akhirnya tercapai juga kesepakatan antara delegasi-delegasi RI, Belanda, dan Pertemuan Musyawarah Federal (BFO). Terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pengesahan Undang-Undang Dasarnya, kemudian diikuti dengan Pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.



*Delegasi RI di KMB*



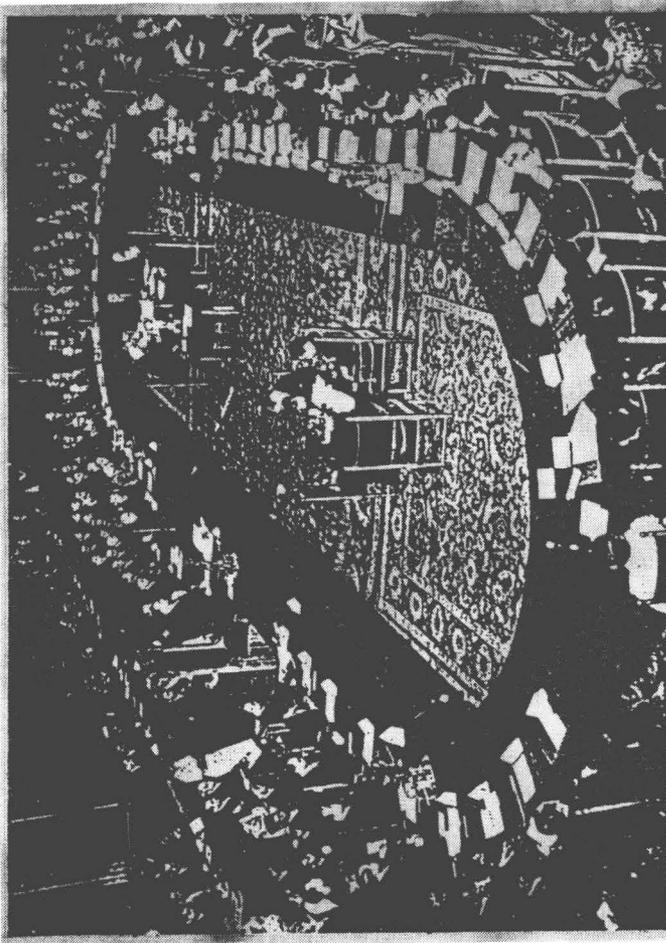
*Delegasi BFO di KMB*



*Delegasi Belanda di KMB*

Republik Indonesia Serikat kemudian menentukan bahwa dalam waktu satu tahun akan dibentuk Dewan Konstituante. Dewan ini akan bertugas membahas Undang-Undang Dasar negara, namun sebelum waktunya negara-negara bagian telah menyatakan peleburan dirinya ke dalam Republik Indonesia, kecuali Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Barat, dan NIT yang prosesnya alot. Proses pemasukan NIT agak terlambat karena ada perbedaan-perbedaan dan pertentangan sengit antara golongan republiken dan golongan federalis. Golongan Republiken (unitaris) menentang kelanjutan berdirinya NIT, dan menghendaki penggabungan dengan Republik Indonesia. Keadaan ini ditambah lagi dengan keputusan presiden 8 Maret 1950, untuk membubarkan negara-negara dan daerah, dan menggabungkannya dalam Negara Republik Indonesia.

Sementara itu hubungan PTB dengan sejumlah politisi dan tokoh-tokoh militer Belanda yang terhimpun dalam "gerakan kesatuan kerajaan", sebagian besar bertanggung jawab atas kelangsungan hidup PTB. Itulah sebabnya mereka mendukung keikutsertaannya sebagai golongan penting dalam KMB di Den Haag. Dalam petisinya kepada Pemerintah Belanda, PTB menuntut hak untuk berpemerintahan sendiri bagi Ambon, Manado, dan Timor Dengan merujuk pada Persetujuan Linggar jati Pasal 3 dan Pasal 4, PTB bermaksud mewakili rakyat Ambon dan bukan Dewan Maluku selatan,<sup>5</sup> tetapi bagi Belanda,



*Suasana Sidang Konferensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal  
(Bangsal Satria) Den Haag.*

yang dipertahankan bukan hanya perasaan dan pilihan rakyat Ambon, melainkan lebih dari itu, yakni kesinambungan hidup Negara Indonesia Timur di mana Ambon, Manado dan Timor berada di dalamnya.

Selain itu Pemerintah NIT di Makassar menghadapi keadaan kritis, karena ketidakmampuan kepala daerah Ambon menangani kaum muda yang bergolak melawan para serdadu Ambon. Para serdadu yang secara teoritis masih berada di bawah komando Belanda ini menantikan reorganisasi KNIL, namun banyak dari mereka merasa kecewa karena ternyata Pemerintah Belanda tidak banyak melakukan perubahan apa lagi perbaikan, pada hal ada anggapan bahwa mereka itu sudah mempertaruhkan nyawa mereka dan membuka kemungkinan untuk menjadi sasaran dendam golongan republik. karena itu mereka diliputi daerah Ambon tidak dapat mengendalikan situasi, sehingga di mata Pemerintah NIT ia dianggap bertanggung jawab atas semua insiden yang terjadi, karena insiden-insiden itu merupakan ancaman bagi kelanjutan NIT.

## **2.2 Pemikiran-pemikiran Soumokil Cs. tentang Pembentukan RIS**

Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan hasil kesepakatan dalam KMB. RIS terdiri atas 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Pembentukan RIS diikuti oleh pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan TNI sebagai intinya, bersama-sama bangsa Indonesia lain dari bekas anggota Angkatan Perang Belanda (KNIL).



*A. Wairisal*



*J H Maruhutu*



*Ir. J A Manusama*



*Mr Dr. Chr Soumokil*

Pembentukan RIS dan APRIS ini ternyata telah menimbulkan masalah psikologis yang menegangkan. Di satu pihak di dalam negara-negara bikinan Belanda terdapat gerakan "republikan" yang berhasrat menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan di dalam APRIS, TNI berkeberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuh-musuhnya. Di pihak lain di antaranya dalam badan pemerintahan RIS sendiri, masih terdapat orang-orang yang mendukung sistem federal dan cenderung menolak usaha menuju Negara Kesatuan.<sup>6</sup> Di pihak KNIL terdapat tuntutan agar ditetapkan sebagai alat negara bagian, sedangkan mereka menentang masuknya TNI ke dalam negara bagian, sedangkan mereka menentang masuknya TNI ke dalam negara bagian tersebut. Keadaan ini terutama terjadi di Indonesia Timur (NIT):

Sebagian besar KNIL Ambon cenderung ingin kembali ke masyarakat, tetapi karena beberapa sebab yang kurang jelas, maka pelaksanaan demobilisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini telah mengakibatkan kekacauan yang kemudian digunakan dengan sangat baik oleh para politisi yang beraliran separatis seperti Soumokil, Manusama dan lain-lain untuk menghasut rakyat menentang Republik.

Soumokil yang nama lengkapnya Christian Robert Soumokil adalah pencetus gagasan RMS. Ia adalah lulusan Rechts Hoge School di Jakarta sehingga berhasil menyandang gelar Meester. Kemudian ia melanjutkan studi di Leiden sehingga mencapai gelar Doktor dalam Ilmu Hukum. Soumokil adalah salah seorang dari intelektual Ambon yang mempunyai pandangan politis sangat separatis. Ia adalah salah seorang Ambon yang mendambakan kemajuan seperti setiap intelektual lainnya. Sebagai seorang ahli hukum dan hakim yang terhormat dalam masyarakat Hindia Belanda, kepentingan-kepentingannya sangat bertolak belakang dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Pada tahun 1930 an, ia termasuk salah satu dari kelompok kecil "bumiputera" yang mendapat status *gelijkgesteld*, yaitu mereka yang statusnya disamakan dengan warganegara Belanda. Pada tahun 1938 ia dicalonkan juga sebagai anggota *Volksraad*

bersama Dr. Apituley, namun pencalonannya mendapat tantangan keras karena ia tidak mengambil bagian dalam Sarekat Ambon ataupun organisasi lainnya, karena itu dengan terbentuknya NIT, Soumokil merasa bahwa sistem itulah yang dapat menjamin kepentingannya.<sup>7</sup> Ia beranggapan bahwa dengan adanya sentralisasi administrasi di Batavia (Jakarta) merupakan bahaya yang mengancam ketika itu, karena ia berpikir bahwa di sini bisa terjadi suatu proses yang disebutnya sebagai "Ekspansi Jawa". Cita cita politiknya dari tahun 1930 an yang wujudnya dapat dilihat di Negara Indonesia Timur (NIT), dianggap merupakan hal yang hakiki dalam perkembangan wilayah itu. Tidaklah heran apabila Soumokil merupakan salah seorang penentang utama terhadap proses pembubaran NIT, kembali ke Negara Kesatuan RI.

Di dalam NIT ia adalah seorang jaksa agung yang menjatuhkan hukuman mati atas Wolter Monginsidi, seorang pemimpin pejuang muda yang gigih menentang kekuasaan Belanda . Soumokil memandangnya sebagai seorang pengacau rakyat yang harus mendapat hukuman yang setimpal. Walaupun berbagai pihak telah menyarankan agar hukuman mati diubah menjadi hukuman seumur hidup, Soumokil tetap pada pendiriannya.

Langkah-langkahnya dalam pencetusan gagasan pembentukan RMS sangat tertutup, sehingga tidak banyak diketahui. Mungkin sekali ia sering berhubungan dengan kaum separatis di Ambon dan juga kaum separatis di daerah lain. Di duga ia turut memainkan peranan penting dalam peristiwa Andi Aziz di Makassar (Ujung Pandang) pada 5 April 1950. Pemberontakan mana dianggap mempunyai hubungan dengan pemberontakan Westerling di Bandung. Seperti diketahui Westerling adalah tokoh yang berperan dalam peristiwa korban 40.000 di Sulawesi Selatan pada Desember 1947.

Peristiwa Andi Aziz itu menggunakan unsur KNIL yang sedang bimbang karena ketidakpastian status mereka sesuai KMB. Mereka beranggapan bahwa RIS tidak memperdulikan mereka untuk diintegrasikan dengan pasukan TNI dari Jawa.

Bersamaan dengan peristiwa Andi Aziz itu, terjadi pula krisis dalam Kabinet NIT. Golongan nasionalis (republik) berusaha membubarkan NIT dan memasukannya ke dalam Negara Kesatuan RI. Usaha-usaha itu berupa mosi tidak percaya kepada Kabinet NIT, di masa JE. Tatengkeng dan Diapari.

Pasukan-pasukan TNI yang dikirim dari Jawa di bawah pimpinan Kawilarang berusaha menguasai keadaan dan memadamkan pemberontakan. Koordinasi yang baik dari TNI memaksa Andi Aziz menyerahkan diri. Pada saat yang sama Kabinet Diapari meletakkan jabatan dan diteruskan oleh perdanamenteri yang "diangkat" oleh RIS yakni Ir. M. Putuhena.

Keadaan itu memberi alamat kepada Soumokil bahwa NIT akan tamat riwayatnya. Walaupun demikian ia tidak melepaskan cita-citanya untuk mejamin status otonomi bagi Maluku Tengah. Ia lalu meninggalkan Ujung Pandang dengan alasan yang tidak jelas pada 12 April dan tiba di Ambon 13 April dari Manado. Menurut beberapa pihak, ia mengadakan inspeksi kepolisian karena ia adalah menteri kehakiman dan jaksa agung NIT.

Setibanya di Ambon Soumikil mengadakan pertemuan dengan golongan separatis. Keadaan di Ambon dewasa itu mulai nampak adanya usaha ke arah pemisahan dari NIT sejak awal April 1950. Di sini pengaruh Ir. JA. Manusama, direktur AMS sangat besar di kalangan masyarakat yang menginginkan kembalinya kekuasaan Belanda.

Pada 4 April 1950, Manusama mengundang para raja pati dari Pulau Ambon untuk mengadakan rapat di kantornya. Pada kesempatan itu Manusama mempropagandakan bahwa penyatuan Maluku Tengah ke wilayah Indonesia lainnya akan mengundang bahaya.<sup>8</sup> Hal itu harus disampaikan para raja pati kepada seluruh rakyatnya agar mereka dapat memahami keadaan sosial politik yang ada dan yang akan berlangsung. Para raja pati menyetujui Manusama untuk mengadakan suatu rapat umum di Kota Ambon. Rapat tersebut diadakan pada 18 April 1950 yang dihadiri pula oleh Soumokil.

Di samping kedua tokoh itu terdapat Dolf Metekohy pemimpin kelompok "Sembilan Serangkai". Sejak pembentukan Negara Indonesia Timur di Denpasar pada Desember 1946 telah nampak bahwa Metekohy mempunyai pandangan yang sangat berbeda dengan kelompok Ambon lainnya seperti Kapten J. Tahiya yang sejak semula menyokong federalisme pada hal mereka berdua sama-sama diangkat oleh Belanda dalam pertemuan federal. Perbedaan ini terus berlanjut sampai tahun 1950, sehingga Metekohy disebut pihak Belanda sebagai *de mist Indonesisch onder de Indonesische broeders*.

Sejak Konferensi Malino ia telah memperlihatkan sikap seolah-olah Maluku Selatan dapat berdiri sendiri tanpa daerah-daerah lain. Jadi, sejak saat itu ia sudah mempunyai pandangan yang skeptis terhadap federalisme Indonesia.

Sementara itu golongan Sembilan Serangkai yang juga merupakan bagian dari PTB menyokong pemikiran dan gagasan Soumokil. Mereka mengadakan teror terhadap rakyat terutama anggota-anggota PIM. Jelas golongan ini tidak menyetujui (menolak) RIS bahkan juga NIT. Golongan ini membuat keadaan menjadi panas dan panasnya keadaan ini diiringi dengan menjalarnya perasaan benci di kalangan rakyat. Kebencian mana ditujukan kepada kekuasaan yang bersandar kepada kekuatan tentara KNIL.

Pada saat inilah Soumokil mengajarkan agar KNIL bertindak. Setiap anggota Dewan Maluku Selatan harus dibunuh. Sesudah itu baru Maluku Selatan dinyatakan sebagai negara Merdeka.

Untunglah ada sebagian anggota yang tidak setuju dengan gagasan yang buas itu, namun dalam pertemuan itu pula lahirlah "gagasan RMS" dan untuk memproklamasikannya diusulkan agar pemerintah daerah yang melakukannya. Hari-hari selanjutnya keadaan sudah dikuasai oleh pihak-pihak separatis PTB. Kepala Daerah Maluku Selatan J. Manuhutu dipaksa untuk hadir di dalam rapat dan di bawah ancaman pasukan istimewa KNIL Manuhutu membaca Proklamasi RMS.

## CATATAN

- 1) Anak Agung, *Dari NIT ke RIS*, 1985, hlm. 485
- 2) *Ibid.*
- 3) *Ibid.*
- 4) *Ibid.* hlm. 637.
- 5) Richard Chauvel, *Bukan Revolusi Melainkan Kontrarevolusi*, dalam Andrey Kahin, hlm 261.
- 6) Nugroho Notosusanto (Ed), SNI, VI, 1982/1983. hlm. 191.
- 7) R.Z. Leirissa, *Pemberontakan RMS*, Majalah *Prisma*, No. 7, hlm. 33.
- 8) *Ibid*, hlm. 34.

## BAB III TIMBULNYA REPUBLIK MALUKU SELATAN

### *3.1 Pembentukan RIS/Pembubaran NIT*

Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung di Den Haag Negeri Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasilnya adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. KNIP yang bersidang pada 6 Desember 1949 berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang. Selanjutnya pada 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Insinyur Soekarno terpilih sebagai presiden RIS pada 16 Desember 1949 dan keesokan harinya, pada 17 Desember 1949, presiden RIS diambil sumpahnya. Pada 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Drs. Mohammad Hatta selaku perdana menteri dilantik oleh presiden. Akhirnya pada 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani "akte penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda. Pada 27 Desember 1949, baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan. Di Nederland

bertempat di Ruang Tahta Amsterdam. Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA. Sassen dan Ketua Delegasi RIS Drs. Mohammad Hatta bersama-sama membubuhkan tandatangannya pada naskah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Pada waktu yang sama di Jakarta Sri Sultan Hamengku Bowono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda AHJ. Lovink dalam suatu upacara membubuhkan tandatangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. Dengan demikian secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh Negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda.

Pada masa RIS tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat. Sebagai suatu negara yang baru diakui kedaulatannya, Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang takut akan kehilangan hak-haknya bila Belanda meninggalkan Indonesia.<sup>1</sup>

Pergolakan politik yang terjadi di Jawa, Madura dan Sumatera yang berkisar pada masalah pertentangan antara federalisme dan unitarisme (kesatuan) dan hasrat untuk mengukuhkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikuti dengan penuh gairah oleh golongan republiken di Indonesia Timur, dan tentunya termasuk Makasar. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi sikap mereka dan menimbulkan kegelisahan serta merupakan perangsang dan dorongan untuk bertindak yang sama. Keadaan demikian mengubah suasana politik di Negara Indonesia Timur. Suasana yang bergelora mewarnai dibukanya sidang Badan Perwakilan Rakyat Negara Indonesia yang baru.

Pada waktu itu keadaan Makasar sedang dalam keadaan tidak tenang, sebab rakyat yang anti federal mengadakan demonstrasi sebagai desakan agar Negara Indonesia Timur secepatnya bergabung dengan Republik Indonesia. Golongan

yang setuju pada sistem federal juga mengadakan demonstrasi, sehingga ketegangan semakin memuncak yang tentunya akan dapat membahayakan ketertiban dan keamanan umum. Berdasarkan atas pertimbangan ini, dan untuk meredakan suasana serta menghindarkan timbulnya bentrokan fisik antargolongan, maka Kabinet Tatengkeng yang telah demisioner mengambil keputusan untuk melarang demonstrasi oleh semua pihak dan golongan dengan penjelasan bahwa masalah penentuan azas federasi atau kesatuan harus diputuskan melalui saluran yang demokratis, yaitu melalui Badan Perwakilan Rakyat, dewan-dewan yang dipilih secara demokratis atau plebisit. Keputusan Kabinet Tatengkeng Demisioner ini ditentang keras oleh golongan unitaris (kesatuan).

Mulai awal Maret 1950 pergolakan dan pertentangan antara golongan federalis dan unitaris di Sulawesi Selatan dan terutama di Makasar berkobar dengan hebat sehingga timbul suasana yang gawat. Kelompok-kelompok pemuda di jalan-jalan mulai menyatakan sikap mereka menentang kelanjutan berdirinya Negara Indonesia Timur untuk menggabungkan diri pada daerah kekuasaan Republik Indonesia.

Dari golongan unitaris yang dipelopori oleh anggota-anggota parlemen Fraksi Kesatuan Nasional dan Fraksi Indonesia, mendesak kepada pemerintah untuk diizinkan mengadakan demonstrasi secara besar-besaran dengan tujuan untuk menyatakan unjuk perasaan agar Negara Indonesia Timur segera dibubarkan dan dimasukkan ke dalam daerah kekuasaan Republik Indonesia.

Dihadapkan pada suasana yang tegang dan tekanan-tekanan keras baik dari kalangan parlemen tertentu maupun dari kalangan masyarakat untuk menyelenggarakan demonstrasi dan berdasarkan atas pemikiran bahwa jika terjadi demonstrasi liar mungkin akan timbul kegaduhan yang akan membawa korban, Pemerintah Diapari membatalkan keputusan Kabinet Tatengkeng mengenai larangan demonstrasi pada 16 Maret 1950, karena itu pada 17 Maret 1950 golongan unitaris menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran di Makasar sebagai suatu

unjuk perasaan mereka untuk mendesak agar Negara Indonesia Timur segera dibabarkan dan dimasukkan ke dalam Negara Republik Indonesia.

Nampaknya ketegangan yang telah timbul dalam parlemen dan meruncingnya suasana di kalangan masyarakat telah merumuskan Negara Indonesia Timur pada suatu krisis politik yang hebat dan bergejolak pada 5 April 1950 yang terkenal dalam sejarah sebagai Peristiwa Andi Aziz, yang merupakan suatu musibah politik. Akibat pemberontakan Andi Aziz timbul krisis kabinet Negara Indonesia Timur. Golongan republiken yang sebelumnya mendukung Negara Indonesia Timur kemudian berusaha membubarkannya dan memasukkan wilayah Indonesia Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berhasilnya APRIS menguasai keadaan pada saat itu telah memperbesar semangat golongan republiken dalam parlemen Negara Indonesia Timur. Pada 20 April 1950 Pupella dari Pemuda Indonesia Maluku mengajukan mosi tidak percaya pada parlemen Negara Indonesia Timur. Mosi itu diterima pada 25 April 1950 dan kemudian kabinet Negara Indonesia Timur meletakkan jabatannya. Sebagai perdana menteri selanjutnya dipilih Ir. Martinus Putuhena. Program kabinet ini adalah pembubaran Negara Indonesia Timur dan penggabungan wilayah ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

### ***3.2 Misi Putuhena yang Dikirim Menteri Pertahanan RIS***

Martinus Putuhena bukan wajah baru dalam masalah pembentukan RIS. Dalam perundingan-perundingan Interindonesia di Yogyakarta bulan Juli sampai Agustus 1949, ia telah muncul mewakili Partai Kristen Indonesia, sebab itu perkembangan perundingan diketahuinya, termasuk keputusan yang menyangkut bidang kemiliteran yang kemudian dimasukkan juga dalam KMB. Bagi pihak Republik Indonesia, Martinus Putuhena adalah seorang yang selama itu berada dalam kubu perjuangan RI. Bagi pihak lawannya di Makasar ia adalah seorang tokoh Maluku yang diharapkan dapat mengerti aspirasi orang-orang Maluku dalam KNIL. Martinus Putuhena tetap melangkah

sesuai dengan garis yang ditentukan pemerintah di Jakarta, yaitu Pemerintah RIS. Pengangkatannya sendiri ditandatangani oleh Koordinator Keamanan. Berarti sudah sejak awal ia akan bertumpu pada kepentingan segolongan kecil tokoh politik NIT yang mulai kehilangan kekuasaan.

Setelah Surat Perintah Koordinator Keamanan dikeluarkan pada 25 Desember 1949, Martinus Putuhena bersama Letnan Kolonel Mokoginta bertolak ke Makasar. Dalam surat perintah itu tidak ditegaskan batas tugasnya. Kesepakatan di Makasar antara Sultan Hamengku Buwono IX, Kolonel Nasution, Presiden NIT Sukawati, dan Wakil Perdana Menteri Dr. Soukokil menegaskan, bahwa :

- (1) Penjagaan keamanan tetap menjadi tugas pemerintah NIT,
- (2) Di NIT tidak ditempatkan seorang Gubernur Militer,
- (3) Kalau keadaan di NIT tidak dapat ditangani pemerintah, dibenarkan mencari bantuan dari tentara RIS,
- (4) Berhubung di NIT belum ada tentara RIS, soal keamanan dan ketertiban dibebankan kepada suatu komisi yang terdiri atas Ir. Martinus Putuhena sebagai ketua dan Letnan Kolonel Mokoginta serta Mayor Nanlohy sebagai anggota.

Tindakan terpenting yang pertama kali dilakukan panitia militer pimpinan Martinus Putuhena ialah mengadakan kunjungan ke daerah-daerah pedalaman Sulawesi, Minahasa, Gorontalo, dan Ternate Maluku Utara.

Pada wal Mei 1950, Putuhena dilantaik sebagai perdana menteri NIT.<sup>2</sup>

### *3.3 Tindakan Mr. Dr. Ch. Soumokil*

Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sebagai salah satu keputusan KMB dengan TNI sebagai intinya, menimbulkan masalah psikologis yang menegangkan. Di satu pihak TNI berkeberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuhnya, sebaliknya dari pihak KNIL terdapat pula tuntutan untuk ditetapkan sebagai alat negara bagian dan me-

nentang masuknya TNI ke dalam negara bagian tersebut. Sebenarnya tidak semua kesatuan KNIL mempunyai pandangan seperti disebut di atas. Pandangan itu terutama terdapat di kalangan KNIL Ambon. Kalangan lain rupanya mempunyai *good will*.

Pada 30 Maret 1950, di Makasar Kapten Andi Aziz melapor bersama kompihnya kepada Letnan Kolonel Mokoginta. Selanjutnya dilangsungkan upacara pelepasan anggota kompi KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Azis ke dalam APRIS. Dengan demikian kesatuan ini bersama kesatuan yang dibawa oleh Mayor Pieters merupakan inti APRIS di Makasar.

Sementara itu telah terjadi suatu perubahan yang tiba-tiba. Rupanya ketakutan pada TNI masih juga terdapat pada kesatuan Andi Azis ini. Pada waktu itu terdengar berita bahwa Batalyon Worang, yang tadinya tergabung dalam Brigade 16 (seberang) TNI akan ditempatkan di Makasar. Memang sejak semula telah ada niat untuk menempatkan kesatuan-kesatuan dari Brigade seberang ini di Indonesia Timur. Terutama kesatuan-kesatuan yang mempunyai basis di Jawa Timur telah merencanakan untuk kembali ke daerah masing-masing untuk mempertahankan Republik di sana. Brigade ini sendiri dibubarkan pada 16 Februari 1950. Kesatuan-kesatuannya diberikan perintah-perintah baru, antara lain Batalyon Worang ditugaskan untuk ke Makasar. Rupanya ini ditafsirkan oleh Kapten Andi Azis sebagai tindakan yang bermusuhan terhadap daerahnya. Pada 5 April 1950 ia bersama kesatuannya yang berkekuatan 800 orang itu menyerang kesatuan TNI yang dipimpin oleh Mayor Pieters di Klapperlaan, sehingga mulailah apa yang dikenal sebagai pemberontakan Andi Azis.

Kapten Andi Azis mengajukan tuntutan pada pihak APRIS, bahwa kesatuan-kesatuan yang ada di NIT tidak boleh dibubarkan dan digabung dengan TNI. Karena hal ini tidak dapat dijamin, maka ia bersama kesatuannya mengangkat senjata. Dengan cara ini diharapkan bahwa NIT sebagai suatu kesatuan politis masih dapat dipertahankan. Dalam pertentangan selanjutnya, tentara Belanda yang masih ada di Makasar sama

sekali tidak berusaha untuk mencari perdamaian. Mereka rupanya sudah tidak mau tahu lagi. Sebagian besar dari mereka sedang menunggu-nunggu untuk diangkut ke daerah asal mereka.

Perlawanan Kapten Andi Azis sebenarnya hanya terpusat di Kota Makasar saja. Sekalipun kesatuan TNI tidak besar, namun mereka mendapat bantuan yang sangat efektif dari kelompok-kelompok bersenjata dari para pemuda. Inilah salah satu dari hasil yang mereka capai dalam Konferensi Polombangkeng dengan membentuk Biro Perjuangan Pengikut Republik Indonesia dahulu. Selain itu ada pula Depot Batalyon Pelajar yang bermaskas di Pandan-pandan. Mereka berkekuatan kira-kira 200 orang.

Pemerintah RIS mula-mula mengajak Kapten Andi Azis untuk menyerah saja. Ia diberi ultimatum yang berlaku selama 4 kali 24 jam. Ia diberi hak untuk ke Jakarta dan menerangkan apa sebabnya ia bertindak demikian. Ternyata ia tidak mempergunakan kesempatan ini dalam waktu yang ditentukan. Sebab itu pada 7 April 1950 APRIS membentuk suatu pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel AE. Kawilarang.

Sementara itu Batalyon Worang telah sampai di Makasar. Mereka tidak diperkenankan turun ke darat sehingga melakukan pendaratan di Janeponto. Dari sini mereka bergerak menuju Makasar. Tidak lama kemudian tentara ekspedisi dari Kolonel Kawilarang juga sampai dan mulai mendaratkan pasukan di sekitar Kota Makasar juga. Segera disusun siasat untuk merebut Kota Makasar dari tangan musuh. Mereka dapat mengepung Kota Makasar dari darat, sedangkan dari laut terdapat "Korvet" Hang Tuah yang mengadakan blokade. Pengepungan itu ternyata berhasil juga karena Kota Makasar mulai menderita kekurangan makanan. Dalam bulan April 1950 juga Kapten Andi Azis menyerah dan diantar ke Jakarta oleh Letnan Kolonel Mokoginta.<sup>3</sup>

### 3.4 Pembentukan Republik Maluku Selatan (RMS)

#### 3.4.1 Keadaan Genting di Ambon

Setelah pengakuan kedaulatan, keadaan di Kota Ambon mulai menjadi tegang. Di sana-sini terjadi kerusuhan dan pertumpahan darah, karena berntrokan-bentrokan antara kelompok-kelompok nasional yang militan melawan kelompok-kelompok reaksioner termasuk anggota-anggota KNIL. Keadaan semakin memburuk ketika satu kompi baret hijau bekas anak buah Westerling mendarat di Abmon pada 17 Januari 1950. Pada 22 Januari 1950 terjadi penyerbuan di dalam kota dan penganiayaan pada rakyat, sehingga membawa banyak korban. Hal ini memberikan gambaran, bahwa aparat pemerintahan dan aparat keamanan tidak dapat berbuat apa-apa atas peristiwa tersebut. Keadaan yang sudah panas dan memburuk ini masih ditambah lagi dengan menjalarnya kebencian masyarakat Ambon terhadap kekuasaan yang bersandar pada KNIL.

Untuk mengatasi keadaan itu, segera Pemerintah Negara Indonesia Timur mengirim menteri dalam negerinya Mohammad Djabir Syah. Pemerintah Republik Indonesia mengirim Putuhena dan Mayor Saleh Lahade, sedangkan pihak KNIL mengirim Kapten J. Thiya dan beberapa perwira Belanda ke Ambon. Di Ambon diadakan pertemuan dengan oerganisasi-organisasi politik dan sosial serta berunding dengan *Troepencommandan Molukken* Koning. Hal itu memberikan harapan, bahwa kekalutan di Ambon segera akan dapat diatasi.

Menurut keterangan Menteri Dalam Negeri Iskandar Djabir Mohammad Syah, perundingan dengan Koning berhasil dengan memuaskan Koning menjanjikan akan berusaha supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Menteri Dalam Negeri Iskandar Djabir Mohammad Syah tampaknya sangat optimis, tetapi di kalangan politik kekecewaan masih ada, sebab walaupun telah diadakan pertemuan, baik dengan Menteri Dalam Negeri Iskandar Djabir Mohammad Syah maupun dengan Komisi Militer, namun belum ada jaminan mengenai keamanan di Kota Ambon.

Keadaan Kota Ambon semakin tidak menentu, hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- (1) Timbulnya salah paham dalam kalangan KNIL di Ambon, yakni antara mereka yang mau masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan yang sebaliknya.
- (2) Infiltrasi golongan belanda yang tetap berpaham kolonial dengan sengaja mengatur kekacauan itu.

Mengenai faktor pertama, orang-orang KNIL bimbang karena tidak tahu apa dan bagaimana kondisi masuknya KNIL ke dalam APRIS. Akibatnya timbul kegelisahan di kalangan KNIL yang kemudian membuat keonaran di Ambon. Keonaran akibat ulah orang-orang KNIL itu baru reda dengan kedatangan Jenderal Mojot. Adapun mengenai faktor kedua, sesungguhnya orang-orang KNIL beserta pasukan baret hijau di Ambon ingin lekas-lekas masuk APRIS, tetapi pimpinan KNIL (orang Belanda.) ternyata hendak melambatkannya, sehingga terjadilah keonaran itu.<sup>6</sup>

Selanjutnya gerakan teror ini ditingkatkan lagi oleh pasukan-pasukan istimewa KNIL yang dinamakan "Baret Hijau". Pasukan ini adalah bagian dari "*Korps Speciale Troepen*" (KST) yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling di Batujajar dekat Bandung dan yang merupakan pasukan penting selama revolusi. Mereka pula yang memainkan peranan utama dalam pemberontakan Westerling di Bandung dan Jakarta pada awal tahun 1950. Mula-mula jumlah mereka hanya 60 orang di Ambon, tetapi kemudian berangsur-angsur bertambah sehingga pada bulan April 1950 ada sekitar 200 orang KST. Mereka inilah yang bertindak sebagai tukang pukul Soumokil dan yang paling kuat menginginkan terbentuknya Republik Maluku Selatan. Tindakan mereka menimbulkan keprihatinan di kalangan kaum republiken setelah melihat Wim Reawaru, ketua Persatuan pemuda Indonesia Maluku ditangkap dan dibunuh. Bukan saja penduduk biasa yang berada dalam keadaan ketakutan, tetapi juga melanda sebagian anggota KNIL biasa. Sampai

bulan April 1950 telah ada sekitar 2000 orang anggota KNIL di Ambon. Sebagian tinggal di Ambon dalam rangka pengembaliannya ke masyarakat dan sebagian lagi ingin bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi ada bukti-bukti bahwa tidak sedikit yang sengaja dikirim ke Ambon lengkap dengan senjata untuk tujuan-tujuan lain. Teror yang dilancarkan oleh satuan-satuan KST dan polisi dibarengi oleh propaganda separatisme yang dilancarkan oleh Gabungan Sembilan Serangkai yang banyak beranggotakan KNIL dan Partai Timur Besar.<sup>7</sup>

### *3.4.2 Tindakan-tindakan Ir. Manusama*

Dalam tiga bulan pertama tahun 1950, bekas pimpinan moderat Gerakan Demokrasi, Manusama, belum giat berpolitik. Baru kira-kira akhir bulan Maret 1950, karena merasa prihatin melihat ambruknya kebanyakan negara bagian RIS dan adanya ancaman terhadap kelanjutan NIT dari gerakan-gerakan pasukan RIS serta kekacauan di Ambon sendiri, Manusama baru sadar, bahwa pertikaian antara pasukan-pasukan RIS melawan KNIL di Ambon hanya akan mengakibatkan banjir darah, dengan rakyat sebagai korbannya, karena itu Manusama memutuskan untuk mengadakan rapat raksasa guna memperlihatkan dukungan Ambon kepada Pemerintah NIT yang pada saat itu sedang berada dalam tahap kritis di dalam perundingan dengan Jakarta, sesudah ada usaha Andi Azis untuk merebut kekuasaan. Pertemuan baru diadakan pada 18 April 1950 yaitu dua hari setelah Dr. Soumokil tiba dari Makasar. Dengan penuh perasaan Manusama dalam rapat itu mempertahankan federalisme, tentang kekejaman-kekejaman revolusi dan ketidakjujuran pemerintah Jakarta dan menyatakan bahwa andaikata Makasar sampai jatuh, Ambon akan menjadi benteng pertahanan terakhir.

*Sinar Lima*

berjuang mempercaatikan, memerdekan dan memperdaulatkan

**RAPAT RAKSASA DI TANAH LAPANG ESPLANADE**  
 di atasnya dari segala rencana jahat kita di Ambon  
**J. A. Manusama menampakkan sifat kerakasaan beliau!**



**WESTERLING, HAMID - AZIS**

**STOP BARR**

The image shows a newspaper page with a large masthead 'Sinar Lima' at the top. Below the masthead is a slogan: 'berjuang mempercaatikan, memerdekan dan memperdaulatkan'. The main headline reads 'RAPAT RAKSASA DI TANAH LAPANG ESPLANADE' followed by a sub-headline: 'di atasnya dari segala rencana jahat kita di Ambon' and 'J. A. Manusama menampakkan sifat kerakasaan beliau!'. To the left of the main text is a portrait of a man, identified as J. A. Manusama. Below the portrait is a small caption. The rest of the page is filled with dense, small text columns. In the lower right section, there are several smaller advertisements or notices, including one for 'WESTERLING, HAMID - AZIS' and another with the heading 'STOP BARR'.

*Halaman Pertama Siwa Lima*

Dalam keadaan yang amat tegang tersebut, pada 23 April 1950 Mr. Dr. Ch. Ir. Soumokil mengadakan rapat rahasia di Tulehu. Dalam rapat itu hadir golongan militer, Pegawai-pegawai polisi dan pemuka-pemuka rakyat lainnya, demikian pula Ir. Manusama. Rapat mengambil kesimpulan bahwa likuidasi dan pembubaran Negara Indonesia Timur dalam waktu yang sangat singkat akan menjadi suatu kenyataan, melihat terjadinya perkembangan-perkembangan di Makasar. Pada saat inilah Soumokil menganjurkan agar KNIL segera bertindak. setiap anggota Dewan Maluku Selatan harus dibunuh, kemudian daerah itu dinyatakan sebagai negara merdeka. Untung saja sebagian dari kawan-kawannya masih sadar dan menolak tindakan yang buas itu. Dalam rapat itu gagasan pembentukan Republik Maluku Selatan telah lahir. Untuk melaksanakan "proklamasi", diputuskan oleh rapat agar segera dihubungi Badan Pemerintahan Harian Daerah Maluku Selatan untuk mendesak kepada mereka agar diproklamasikan kemerdekaan daerah Maluku Selatan. Rapat ditutup sekitar pukul 16.00 dan dilanjutkan lagi sekitar pukul 18.00. Pada hari yang sama, sore harinya diadakan rapat lagi di Ambon. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Daerah/Ketua Dewan Maluku Selatan, Manuhutu, dan Wakil Ketua Dewan Maluku Selatan Wairisan, yang didesak oleh Soumokil dan golongan militer untuk menyelesaikan proklamasi kemerdekaan daerah Maluku Selatan. Keduanya menolak untuk melakukan hal yang demikian luas konsekuensinya, dan mereka mengemukakan bahwa dalam hal yang demikian adalah wajar Dewan Maluku Selatan dipanggil untuk bersidang membicarakan hal tersebut. Kepala Daerah Manuhutu berjanji untuk membicarakan persoalan yang penting ini dengan anggota-anggota Dewan Maluku Selatan yang ada di Kota Ambon dan kepala-kepala jabatannya, tetapi. Manuhutu mempergunakan kesempatan ini untuk menghubungi Menteri Urusan Dalam Negeri dan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur melalui telepon untuk melaporkan perkembangan yang gawat di Ambon dan peranan aktif yang dimainkan oleh Soumokil.

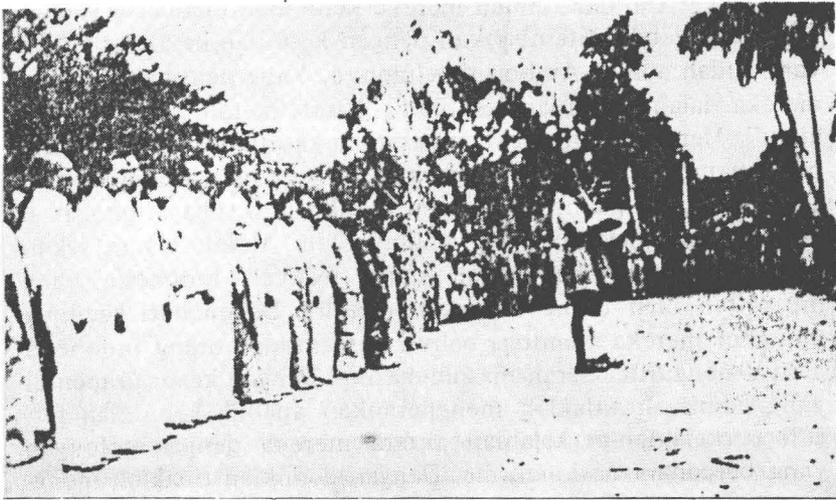
Pada 21 April 1950, Presiden NIT Sukowati secara resmi mengumumkan, bahwa pada prinsipnya NIT siap untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua hari berikutnya, sebuah rapat di Tulehu yang diselenggarakan oleh Manusama mendesak pengurus Dewan Maluku Selatan untuk membuang semua ikatan konstitusional dan politik, baik dengan pemerintah federal RIS maupun dengan NIT. Pertemuan-pertemuan selanjutnya memuncak pada rapat umum 24 April 1950 malam hari. Di situ Pejabat Kepala Daerah Manuhutu akhirnya menghentikan perlawanannya terhadap gerakan tersebut dan memproklamasikan Republik Maluku Selatan.<sup>8</sup>

### *3.4.3 Kronologi Pembentukan Republik Maluku Selatan. (RMS)*

Pemberontakan RMS sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertentangan antara golongan nasionalis republiken melawan golongan federalis ekstrim yang telah berkembang sejak tahun 1946 (Malino). Selain itu pemberontakan ini juga merupakan bagian dari pergolakan di Makasar sejak pemberontakan Andi Azis pada awal April 1950. Dapat dikatakan bahwa kedua pemberontakan itu mempunyai segi yang sama yaitu usaha untuk mempertahankan secara ekstrim ide federalisme dengan cara paksaan senjata. Karena pemberontakan ini melibatkan kesatuan-kesatuan KNIL di Ambon, maka sebenarnya peristiwa itu juga mempunyai segi yang lain, yaitu tindakan yang tidak disipliner dari kesatuan-kesatuan KNIL tersebut. Mereka seharusnya taat pada pimpinan KNIL di Jakarta (untuk seluruh Indonesia) atau di Makasar (untuk Indonesia bagian Timur). Segi lain dari pemberontakan ini ialah keadaan yang sangat goncang di Maluku, khususnya Ambon setelah Konferensi Meja Bundar. Peralihan ke pemerintahan Indonesia yang berwujud RIS itu tidak sedikit menimbulkan ketegangan di kalangan pegawai-pegawai negeri di daerah itu, karena di Ambon juga terdapat pihak-pihak yang pro-republik dan pihak-pihak yang pro-Belanda. Suatu badan yang dapat mengatasi ketegangan-ketegangan ini secara damai tidak ada. Di antara pihak-pihak yang bertentangan itu terdapat organisasi-organisasi

pemuda semi militer yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan bentrokan-bentrokan fisik. Dalam keadaan yang demikian masyarakat tidak aman, apa lagi bila diingat bahwa masyarakat di Ambon sejak dahulu kala hidup dalam semacam dualisme. Pada satu pihak terdapat orang-orang yang mengikuti keyakinan Islam dan pada pihak lain terdapat orang-orang yang mengikuti keyakinan Kristen. Dalam masa-masa sebelumnya keadaan ini tidak terlalu dirasakan sebagai suatu dualisme. Rupanya ada usaha-usaha dari pihak Pemerintah Belanda untuk mencegah timbulnya pertentangan yang nyata antara kedua belah pihak, tetapi setelah Proklamasi Kemerdekaan RI. perbedaan itu nyata. Banyak orang Islam yang memasuki Partai Indonesia Merdeka dan berjuang bersama-sama orang-orang Kristen di dalamnya. Golongan Kristen yang menentang mereka tergabung dalam "Gabungan Sembilan Serangkai" dan "Persatuan Timur Besar". Yang satu berorientasi kepada nasionalisme Indonesia yang sedang bangkit, yang lainnya berorientasi kepada kolonialisme Belanda yang sedang runtuh di Indonesia. Dalam keadaan demikian, pada awal tahun 1950 kesatuan-kesatuan KNIL yang terdiri atas suku Ambon dipindahkan ke Ambon. Jumlah mereka kemudian mencapai sekitar 2000 orang bila ditambahkan dengan kesatuan-kesatuan KNIL yang sudah ada di Ambon sebelumnya. Yang penting di antara mereka ialah kesatuan-kesatuan "baret merah" dan "baret hijau". Mereka ini merupakan kesatuan-kesatuan komando yang berkemampuan tempur tinggi, mereka juga merupakan kesatuan KNIL yang paling mengalami indoktrinasi sebagai pengawal kolonialisme Belanda yang paling gigih. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan suatu wilayah Indonesia yang diperintah oleh orang Indonesia sendiri. Dalam hati kecilnya mungkin mereka menduga bahwa kemampuan orang Indonesia hanya mengurus daerah masing-masing. Dengan keadaan mental yang demikian tidaklah mengherankan apabila kemudian terjadi perkelahian-perkelahian antara mereka dengan golongan yang berpaham nasionalisme. Dengan demikian tidaklah meng-

*Kabinet NIT*



*Upacara Bendera "RMS"*

herankan mengapa ketika Soumokil tiba di Ambon situasinya menguntungkan baginya.

Sebagaimana kita ketahui, pada 13 April 1950 Soukomil mendarat di Ambon dan segera ia bertemu dengan pelbagai pihak. Di Ambon memang sudah nampak adanya usaha-usaha ke arah pemisahan dengan NIT sejak awal bulan April 1950.

Pada 23 April 1950 Soumokil mengadakan suatu rapat rahasia di Tulehu, suatu tempat yang penduduknya beragama Islam. Dalam rapat rahasia itu para pamong praja tidak diikutsertakan, tetapi pemuka-pemuka KNIL jelas hadir, demikian pula Ir. Manusama. Pada saat itulah Soumokil menganjurkan agar KNIL segera bertindak untuk membunuh setiap anggota Dewan Maluku Selatan, kemudian daerah itu dinyatakan sebagai negara merdeka. Untung saja sebagian dari kawan-kawan Soumokil masih sadar dan menolak tindakan yang buas itu namun, dalam rapat rahasia di Tulehu, gagasan untuk mendirikan Republik Maluku Selatan telah lahir. Selanjutnya timbul gagasan untuk melaksanakan "Proklamasi", yakni yang melakukan Proklamasi adalah pemerintah daerah. Pada sekitar pukul 16.00 untuk sementara rapat rahasia ditutup dan akan dilanjutkan lagi sekitar pukul 18.00 hari itu juga. Pada rapat rahasia sore itu, Kepala Daerah Maluku Selatan, J. Manuhutu dipaksa untuk hadir. Di bawah ancaman pasukan-pasukan istimewa KNIL, J. Manuhutu terpaksa menerima perintah itu. Diputuskan pula agar "Proklamasi" dilakukan pada keesokan hari dalam suatu rapat lengkap para kepala kedinasan Maluku Selatan.

Dalam rapat 23 April 1950 sore hari, di kantor Pemernintah Daerah Maluku Selatan diputuskan agar pada keesokan harinya yakni 24 April 1950 kepala daerah menyatakan terbentuknya negara merdeka di Maluku Tengah. Hal ini akan dilakukan di depan semua pejabat resmi. Pada saat yang telah ditentukan siaplah para pejabat resmi. Sebagian dari mereka telah terpengaruh oleh propaganda Soumokil atau provokasi satuan-satuan *Korps Speciale Troepen* (KST). Pada rapat itu Soumokil

tidak hadir dengan alasan ia bukan pejabat resmi di Maluku Tengah. Yang nampak hadir ialah Ir. Manusama dan kawan-kawan yang sepaham. Dengan sendirinya satuan-satuan KST hadir pula untuk menjaga agar sidang berjalan sesuai dengan rencana sehari sebelumnya. Kira-kira pukul 08.30 kepala daerah menyatakan, **"Sejak hari ini saya memproklamkan Daerah Maluku Selatan sebagai suatu Republik, suatu negara merdeka terlepas dari Republik Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Timur"**. Pada keesokan harinya, yakni 25 April 1950 dikeluarkan proklamasi tertulis mengenai Republik Maluku Selatan.<sup>9</sup>

## CATATAN

1. Sartono Kartodirdjo et. Al., *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid VI, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 171–172, 205–206.
2. R.Z. Leirissa, *Ir. Martinus Putuhena Karya dan Pengabdianannya*. Proyek IDSN, Depdikbud, Jakarta, 1985, hal. 65–66.
3. R.Z. Leirissa, Pergolakan Politik Dalam Sejarah : Republik Maluku Selatan, dalam *Prisma*, Agustus 1978.
4. R.Z. Leirissa, *ibid*.
5. I.O. Nanulaitta, *Johannes Latuharhary SH, Hasil Karya dan Pengabdianannya*, Proyek IDSN, Depdikbud, Jakarta, 1982/1983, hal. 181.
6. R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI, Jakarta, 1975, hal. 174–175; R. Z. Leirissa, Republik Maluku Selatan dalam *Prisma*, *op. cit*.
7. R.Z. Leirissa, *ibid*
8. Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke RIS*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hal. 747–749.
9. Ide Anak Agung Gde Agung, *ibid*, hal. 700–757.

#### **BAB IV**

### **PENUMPASAN REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)**

Republik Maluku Selatan (RMS) yang diproklamasikan pada 26 April 1950 yang didalangi oleh Soumokil bukanlah aspirasi dan kehendak hati nurani seluruh rakyat Maluku Selatan. Proklamasi itu lebih merupakan keinginan Soumokil dan beberapa gelintir orang agen imperialis yang sejak lama tidak menghendaki kemerdekaan bangsa Indonesia dan tidak menginginkan keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pelaku makar RSM secara hakiki dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, adalah kelompok yang dengan sadar menentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Serikat, sedangkan yang kedua, adalah kelompok orang yang terhasut oleh propaganda politik *divide et impera* kaum kolonialis.

Agen-agen imperialis yang didukung oleh tentara KNIL yang di bawah kontrol Pemerintah Hindia Belanda setelah perjanjian KMB, terus melakukan tindak kerusuhan dan pembangkangan, menyiksa penduduk yang tidak berdosa, dan mengintimidasi rakyat yang tidak sepaham sehingga suasana mencekam dan rasa takut terus menghantui rakyat Maluku Selatan Selatan hingga RMS diproklamasikan.

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana upaya pemerintah dan bangsa Indonesia menegakkan kedaulatan di Maluku Selatan. Ada tiga jalan yang secara hirarki ditempuh oleh pemerintah guna menyelesaikan masalah Republik Maluku Selatan. Pertama, penyelesaian secara damai yang berkisar pada penolakan wakil PBB ataupun pihak Belanda untuk campur tangan, dan kemudian misi perdamaian yang dikirim pemerintah seperti Misi Leimena dan misi yang dikirim berbagai kelompok masyarakat Maluku di Jawa dan Sumatera, dan bagaimana hasilnya. Kedua, penyelesaian secara militer yang berkisar pada bagaimana rencana pihak TNI, dan pelaksanaan rencana itu, jalannya perang, dan ditambahkan dengan penangkapan Soumokil pada tahun 1962. Ketiga, pembentukan aparat kekuatan Republik di Maluku Selatan berupa PEMDA dan KODIM.

#### *4.1 Penyelesaian Secara Damai.*

Sejarah panjang bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh kaum imperialis menyadarkan para pemimpin RI dalam menghadapi setiap gejolak dan kerusuhan yang bermaksud memecah-belah rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pun telah paham betul bagaimana watak kaum kolonialis yang punya seribu muka. Pemerintah Indonesia yang tahu persis bahwa Pemerintah Hindia Belanda ada di belakang aksi RMS, tidak kaget ketika Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees menghimbau Pemerintah Indonesia agar soal pemberontakan RMS diselesaikan secara damai. Bangsa Indonesia sadar akan tanggung-jawabnya untuk menjaga kedaulatan bangsanya, sadar akan hak dan kewajibannya menjamin keselamatan rakyat, serta sadar akan pentingnya keutuhan bangsa, karena itu jalan pertama yang dipilih untuk menyelesaikan aksi makar RMS, dengan ada atau tidak ada imbauan dari luar, adalah melalui jalan damai dan membuang jauh-jauh aksi militer.

Penyelesaian damai yang ditempuh pemerintah Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Mengutus pemuka-pemuka Indonesia yang berasal dari Maluku pada 27 April 1950, yang dipimpin Dr. Leimena dengan anggota Ir. Putuhena, Pellaupessy, dan Dr. Rehatan. Rombongan Dr. Leimena sampai di Makasar 28 April 1950, dan terus melanjutkan perjalanannya menuju Ambon guna membujuk para pelaku makar untuk kembalike pangkuan ibu Pertiwi, dengan menumpang korvet (kapal terbang kecil cepat) Hangtuhah. Ajakan Dr. Leimena dipandang sebelah mata dan Soumokil serta kawan-kawan, melalui surat yang dibawa utusannya pada 1 Mei 1950, menolak pembicaraan damai, dengan tetap berpegang pada pendiriannya semula, serta hanya bersedia melakukan pembicaraan damai jika disertai oleh pihak UNCI bahkan para pelaku makar menyatakan bahwa mereka merencanakan untuk menempatkan zaakgelastigdenya di Amerika. Dr. Leimena sangat prihatin atas penolakan Soumokil untuk berbicara di meja perundingan, hingga Dr. Leimena pun berkata, "kami sesalkan bahwa mereka tidak mau menerima dan berbicara yang datang melulu untuk merundingkan hingga soal Maluku dapat diselesaikan dengan baik untuk kepentingan dan keselamatan seluruh nusa dan bangsa. Saya persoanlijk merasa ini menyedihkan . . . !". Menanggapi penolakan Soumokil, Kementerian Pertahanan berpendirian, bahwa oleh karena pengacau-pengacau politik dan militer yang dipimpin Soumokil menolak untuk berbicara dengan suatu delegasi yang dikirim oleh Pemerintah RIS yang diketahui oleh Dr. Leimena itu, maka dengan demikian mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kesulitan dan penderitaan rakyat yang menjadi tanggung jawab moral terhadap penderitaan itu. Semua penderitaan itu adalah sebagai akibat pengangkutan Soumokil ke Ambon dengan pesawat terbang Belanda untuk menempatkan pasukan-pasukannya ke bawah disiplinnya.
- (2) Menyelenggarakan Konferensi Maluku pada 12 dan 13 juni 1950 yang dihadiri oleh wakil-wakil penduduk Maluku dari seluruh Indonesia, yang kemudian membentuk satu

misi persaudaraan yang terdiri atas Domine Siahaja, Sapulete, J. Fernandes, J. Tamasale, dan A Kailola. Konferensi yang dihadiri oleh sembilan organisasi rakyat Maluku di Jawa dan Sumatera itu, membuat tujuh butir pernyataan untuk dimajukan kepada pemerintah sebagai masukan dalam menyelesaikan peristiwa RMS. Pernyataan yang dimaksud, yaitu :

- (a) supaya Maluku diberi otonomi seluas-luasnya menurut pendapat konperensi sebagai syarat mutlak dalam penyelesaian;
- (b) supaya pemerintah memberikan bantuan-bantuan sosial kepada rakyat terbanyak yang menderita dan tidak bersalah di Maluku Selatan,
- (c) supaya bangsa Indonesia khususnya ; dunia umumnya, memperjuangkan nasib rakyat Maluku Selatan terhadap perbuatan-perbuatan tidak mengenal perikemanusiaan;
- (d) supaya Pemerintah Belanda didesak dengan segera dan sangat untuk melucuti rombongan KNIL di Maluku Selatan, yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Belanda, di mana perlu dengan bantuan UNCI,
- (e) supaya pemerintah menyokong sedapatnya kepada misi persaudaraan dari rakyat Maluku Selatan,
- (f) supaya pemerintah atas dasar keadilan sosial mempergunakan seluas-luasnya kecerdasan dan kecakapan baik militer maupun sosial, tenaga-tenaga golongan Maluku khususnya, dan
- (g) supaya dalam tindakan pemerintah hendaknya dibedakan antara rakyat Maluku Selatan dengan kaum proklamasi RMS.

Pernyataan yang dimajukan kepada pemerintah itu menegaskan bahwa peristiwa RMS bukanlah dilakukan oleh rakyat Maluku Selatan, tetapi oleh kaum reaksioner yang tidak lain adalah agen-agen imperialis yang tidak menghendaki eksistensi RI dalam satu kesatuan yang utuh. Konferensi menghimbau kepada pemerintah agar mengutamakan

penyelesaian damai, karena sebagian besar rakyat Maluku Selatan tidak bertanggung jawab atas makar itu, dan tetap menjadi bagian yang utuh dari bangsa Indonesia. Misi persaudaraan yang diutus ke konferensi pun tidak mendapat tanggapan yang positif dari Soumokil dan kawan-kawannya, sehingga langkah kedua pun gagal.

- (3) Kegagalan langkah pertama dan kedua tidak membuat pemerintah mengesampingkan alternatif damai, karena itu pada akhir Agustus 1950, Dr. Rehata mencari hubungan lagi dengan Soumokil dan kawan-kawan untuk penyelesaian damai. Karena belum juga ada kabar, maka pemerintah mengutus Menteri Kesehatan Dr. Rehatta pun gagal, karena Soumokil tetap menolak untuk damai.

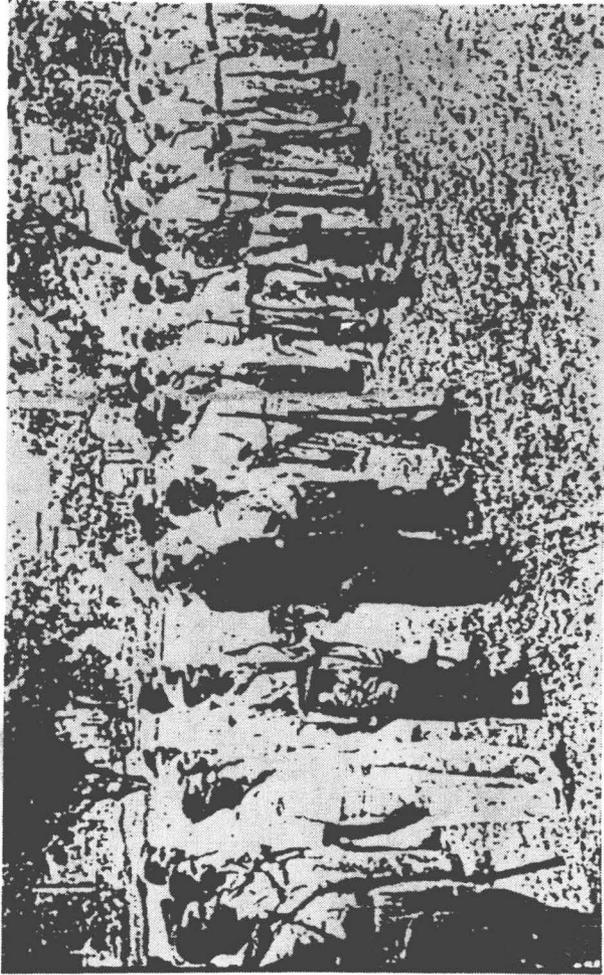
Langkah-langkah itu membuktikan kesungguhan dari pemerintah dan bangsa Indonesia secara keseluruhannya untuk menyelesaikan masalah RMS dengan jalan musyawarah, tetapi RMS dalam setiap pernyataannya selalu menolak misi yang didatangkan dengan mempergunakan alat pengangkutan RIS dalam corak dan bentuk apa pun. Mereka hanya akan menerima misi yang diangkut memakai kendaraan berkebangsaan Belanda atau Amerika.

Peristiwa RMS adalah masalah dalam negeri RI, karena itu penyelesaiannya menjadi hak dan kewajiban pemerintah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bangsa Indonesia secara tegas menolak segala bentuk campurtangan asing. Dalam menghadapi masalah RMS, pemerintah dan Angkatan Perang RIS telah menetapkan tiga alternatif jalan penyelesaian yang akan diterapkan secara hirarki, yaitu (1) melalui pembicaraan damai, (2) jika tidak berhasil, melalui tindakan blokade, (3) jika tidak berhasil juga, diambil tindakan militer.

Mengingat ajakan penyelesaian damai selalu ditolak kaum reaksioner, Kementerian Pertahanan RIS pada 16 Mei 1950 melalui juru bicaranya menerangkan, bahwa operasi militer untuk menyelesaikan soal RMS sampai sekarang belum dilakukan, tetapi sejak beberapa hari tindakan blokade terhadap RMS telah diambil.



Laskar Pemuda Indonesia  
Maluku (PIIM).



## *4.2 Pelaksanaan Operasi Militer*

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa pemerintah dan Angkatan Perang RIS menetapkan tiga alternatif jalan penyelesaian peristiwa RMS, yaitu penyelesaian damai, tindakan blokade, dan tindakan militer.

Setelah melalui berbagai upaya, penyelesaian damai tampaknya tidak mendapat tempat dalam benak para pelaku makar. Soumokil dan kawan-kawan tetap bersikukuh pada pendiriannya mempertanahkan RMS yang terpisah dari wilayah kedaulatan RIS.

Dengan tetap berharap bahwa peristiwa RMS akan dapat diselesaikan secara damai, tetapi pemerintah juga tidak menghendaki keadaan bertambah parah, karena itu pemerintah dan Angkatan Perang RIS memutuskan untuk melakukan pendaratan Angkatan Perang di Maluku Selatan dalam waktu dekat.

Angkatan Darat RIS dengan dibantu oleh beberapa kapal perang Angkatan Laut RIS mendaratkan pasukan-pasukannya di Pulau Buru pada 14 Juli 1950 pukul 09.00 waktu Maluku. Dua hari berikutnya, 16 Juli 1950 jam 08.30 waktu Maluku, pasukan-pasukan RIS memasuki Namlea, sehingga pasukan RIS telah tersebar di seluruh Pulau Buru.

Rakyat Maluku Selatan yang secara berkepanjangan diteror oleh para perusuh, menyambut gembira kehadiran Angkatan Perang RIS yang datang untuk memelihara dan menjamin suasana aman, serta menumpas habis para pelaku makar hingga ke akar-akarnya. Angkatan Perang RIS bahu-membahu dengan rakyat menyingkirkan para perusuh dan menangkap mereka untuk diajukan ke pengadilan.



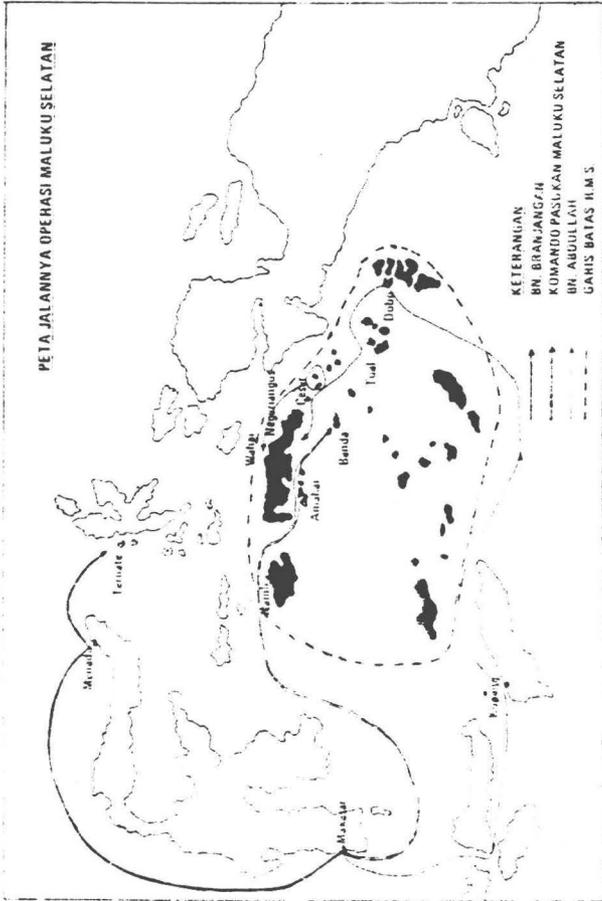
**Letnan Kolonel Ign. Slamet Rijadi**  
**Komandan Brigade V Divisi III/Komando Pasukan**  
**Maluku Selatan**

Setelah pemerintah dengan segala usahanya mengadakan musyawarah dengan kelompok orang RMS menemukan kegagalan, pemerintah memutuskan untuk melakukan operasi militer terhadap petualangan-petualangan Soumokil. Menteri Pertahanan menunjuk Kolonel Kawilarang sebagai komandan ekspedisi. Demi keamanan nasional, disusunlah gerakan operasi militer dalam suatu Komando Pasukan Maluku Selatan atau Kompas Malsel di bawah pimpinan Panglima Ko TT IT Kolonel Kawilarang kemudian diserahkan kepada Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Dengan Komando Pasukan Maluku Selatan mulai dilancarkan gerakan-gerakan operasi militer, yaitu: (1) Operasi Malam, (2) Operasi Fajar, (3) Operasi Senopati, (4) Operasi Pulau Maluku, (5) Operasi Bintang Siang, dan (6) Pasukan Penutup.

Operasi Malam adalah operasi yang disusun dan dilaksanakan oleh Komando Pasukan Maluku Selatan untuk merebut Pulau Buru dari tangan RMS guna dijadikan gerakan-gerakan selanjutnya ke Pulau Seram dan Pulau Ambon. Operasi ini dijalankan sesuai dengan PO No. 117/PO/KTT/VII/50, 13 Juli 1950. Pasukan yang dikerahkan sesuai PO terdiri atas:

- (a) Angkatan Darat, yang terbagi menjadi tiga batalyon, yaitu Bn Pattimura di bawah komando Pelupessy dan Bn 352 di bawah komando Mayor Suradji serta BN 3 Mei di bawah komando Mayor Mengho.
- (b) Angkatan Laut, juga terbagi menjadi tiga, yaitu RI Patti Unus, RI Hang Tuah, dan RI Banteng.

Pistiwa pendaratan ini terjadi pada pagi hari pukul 09.30 di dekat Lala, Pulau Buru, 14 Juli 1950, dengan mendaratkan 850 orang TNI. Pendaratan ini dilindungi oleh korvet patti Unus. Mungkin karena kurang pengalaman untuk bertempur di laut, kapal-kapal pendarat kandas sehingga keadaan sangat berbahaya, tetapi tentara TNI tetap maju terus ke tempat tujuan. Pendaratan fase pertama dilakukan oleh Bn Pattimura dan fase kedua oleh Bn-352, serta fase ketiga oleh BN-3 Mei. Dari awal sampai akhir pendaratan pasukan kita tidak mendapat perlawanan dari pihak musuh. Dari pantai Lala Ubun, Bn Pattimura yang



*Sumber*

berhasil dalam pendaratan pertama, mulai bergerak menuju Kota Namiea. Dalam gerakan ini formasi batalyon diubah menjadi dua kompi, yaitu Kompi D di bawah pimpinan Lettu Diponegoro dan Kompi L di bawah pimpinan Lettu Lumenta.

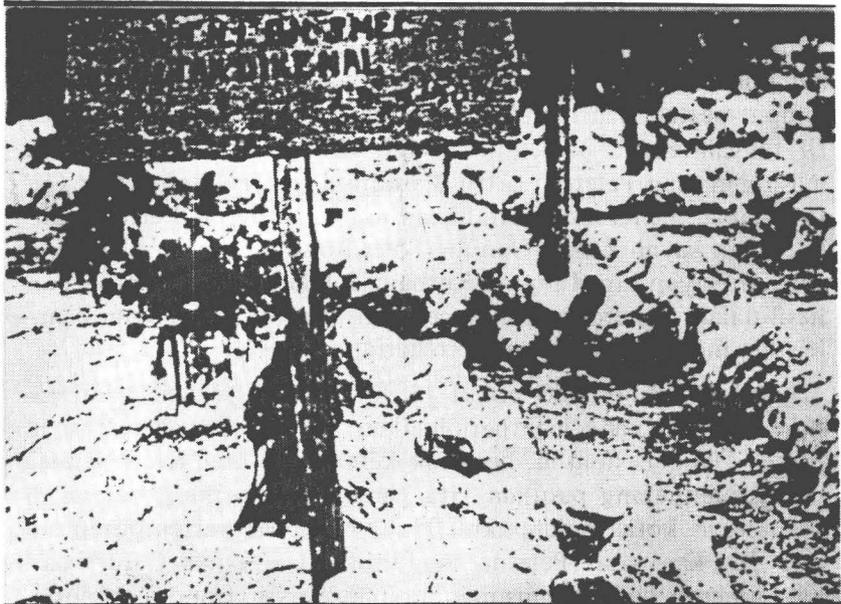
Sesampainya Bn. Patimura di Pal 4 dari Kota Namlea, pasukan kita sudah bertemu dengan pertahanan musuh. Di sinilah mulai berkobar pertempuran sengit antara pasukan kita dengan musuh (RMS). Karena musuh sebagai pihak yang bertahan dan menguasai medan, sedangkan pasukan kita sebagai pihak yang menyerang dan berada pada *terrein* yang terbuka, maka dalam pertempuran ini pasukan kita mendapat tembakan-tembakan yang hebat dari pihak musuh yang telah disiapkan. Dalam pertempuran pertama ini pasukan kita menderita kerugian tiga orang gugur, yaitu Sersan Mayor Paliama, Sersan Teraju dan seorang prajurit lain dari Kompi Lumenta.

Tembakan-tembakan hebat yang mendadak ini membuat pasukan kita di front depan menjadi panik, namun tidak berarti bahwa pasukan kita tidak memberi perlawanan yang seimbang. Tembakan-tembakan seru segera dilepaskan, dan setelah menguasai keadaan, pasukan kita kembali menyerang musuh di tempat pertahanan mereka. Pertempuran sengit berkobar terus. Di tengah-tengah pertempuran ini, dua peleton pasukan kita masing-masing Peleton Lettu Manuhutu dan Peleton Umar Gafur, dapat menerobos pertahanan musuh. Peleton Lettu Manuhutu dari sayap kanan Gunung Batu Boi dan Peleton Umar Gafur dari sayap kiri Tanjung Kerbau. Setelah kedua peleton berhasil dalam penerobosannya, gerakan diteruskan ke Kota Namlea dan memasukinya pada sore harinya.

Pada 15 Juli 1950 pukul 13.00 dini hari sebagian dari pasukan musuh yang mempertahankan Pal 4 di bawah pimpinan Sersan Daud Lesteluhu, bergerak kembali ke arah Kota Namlea untuk menyerang pasukan kita yang sudah berhasil berada di perbatasan kota. Pada pukul 05.30 berkobar pertempuran antara pasukan kita (Peleton Manuhutu dan Umar Gafur) dari Ki Lumenta dengan musuh pimpinan Sersan Daud Lesteluhu.



*APRIS mendarat*



*Makam Prajurit tidak dikenal*

Dalam pertempuran ini Sersan Daud Lesteluhu dapat disergap oleh dua prajurit kita masing-masing Prajurit Muhammad Said dan Prajurit A. Karim dari Regu Sersan Abdurahim Maruapey. Dengan disergapnya Sersan Daud Lesteluhu, pertempuran di dalam Kota Namlea dapat dihentikan, sedangkan pertempuran di Pal 4 masih berkobar terus. Meskipun tembak-menembak sudah dihentikan, tetapi Sersan Daud Lesteluhu sebagai Komandan pasukan RMS di Namlea masih terus berkeras kepala dan tidak mau menyerah begitu saja pada pasukan kita. Atas ajakan dari Sersan Maruapey untuk bertemu dengan Panglima KO TT IT Kolonel Kawilarang guna bekerja sama dengan TNI, Sersan Lesteluhu meyakini akan hal itu. Rupanya kata kerja sama yang diucapkan Sersan Maruapey ini ditafsirkan oleh Sersan Daud Lesteluhu dianggap kerja sama untuk mempertahankan RMS. Karena pada saat itu baik pasukan kita maupun musuh sama-sama putera Maluku atau putera-putera Pattimura, maka lebih bertambah yakin adanya kerjasama itu bagi Sersan Lesteluhu. Untuk itu, Sersan Maruapey bersama dua anggotanya masing-masing Prajurit Pattikawa dan Prajurit Pattinama serta Lettu Manuhutu dengan perahu naik ke kapal Patti Unus yang pada saat itu berada di Pelabuhan Namlea meminta bantuan sebuah motor untuk mengangkut Sersan Lesteluhu guna bertemu dengan Panglima KO TT IT.

Dengan bantuan motor dari RI Patti Unus Sersan Maruapey kembali ke darat menjemput Sersan Lesteluhu dan Komandan Detasemen Polisi Namlea P. Huku Ubun. Pada pukul 12.00 siang hari Sersan Maruapey kembali ke kapal membawa Sersan Lesteluhu dengan Komandan Detasemen Polisi Namlea F. Huku Ubun bersama satu regu pengawal anak buah Sersan Lesteluhu untuk ke Lala Ubun. Lesteluhu bersama seluruh pengawalnya dapat dilucuti dan dijadikan tawanan perang.

Selama peristiwa ini terjadi, di dalam Kota Namlea, pertempuran di Pal 4 masih berlangsung terus. Dengan mendapat bantuan dari Bn 352 dan Bn 3 Mei, pada pukul 15.00, musuh dapat dipukul mundur ke arah Kota Namlea. Dalam gerakan mundur ini pasukan musuh dapat bertemu dengan pasukan kita

dari Kompi Lumenta di Gunung Batu Boi sehingga berkobar lagi pertempuran sengit. Dengan berhasilnya pertahanan musuh dipatahkan di Pal 4, gerakan bersama antara ketiga batalyon diteruskan ke Kota Namlea. Dalam gerakan ini pasukan kita dapat menguasai daerah sepanjang pesisir pantai dan sepanjang bukit-bukit yang mengelilingi Kota Namlea, sedangkan musuh hanya dapat mengadakan pertahanan di perbatasan kota. Pada 16 Juli 1950 pukul 05.30, dengan menyeruak hutan alang-alang dan kayu putih mulailah dilakukan gerakan penyerangan masuk Kota Namlea, dengan melalui pertempuran-pertempuran sengit. Dalam pertempuran ini musuh tidak dapat menahan serangan pasukan kita dan mereka lari kocar-kacir mengundurkan diri ke luar kota dengan mempergunakan perahu-perahu dan perahu motor, tetapi di tengah laut dapat ditembak dan ditenggelamkan oleh kapal-kapal perang kita yang selalu siap dalam formasi tempur. Pada pukul 07.00 seluruh Kota Namlea telah jatuh ke tangan pasukan kita. Setelah tembakan-tembakan reda dan diadakan konsolidasi, selama pertempuran di Pal 4 sampai merebut Namlea dari tangan musuh, ternyata kerugian pasukan kita 61 orang gugur dan yang lain mengalami luka-luka. Keenam-puluh satu orang yang gugur itu ialah 44 orang dari Bn Patti-mura, tiga orang dari Bn 3 Mei, dan 14 orang dari Bn 352.

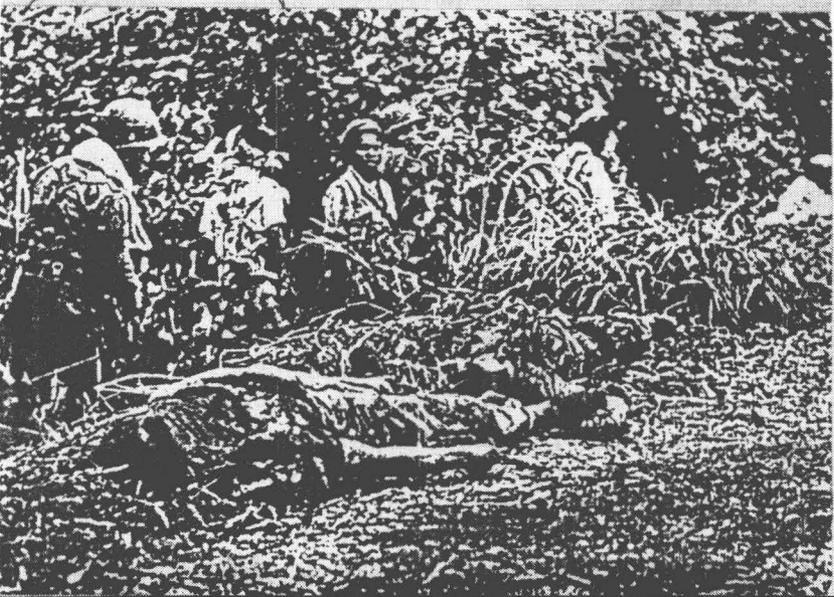
Operasi Fajar adalah gerakan operasi kedua yang dilakukan oleh Komando Operasi Maluku Selatan untuk membebaskan Pulau Seram dari cengkeraman perusuh-perusuh RMS. Operasi Fajar dilakukan pada 21 Juli 1950, dengan kesatuan inti pendaratan Bn 3 Mei. Satuan pendarat ini mempergunakan *LC I Stormvogel* dan *Higgins motorboat*, dengan dikawal oleh kapal-kapal perang RI Patti Unus dan Rajawali. Pendaratan dimulai pukul 10.00 waktu setempat di Kampung Telaga yang terletak 14 Km dari Kota Piru. Di samping Komandan Batalyon 3 Mei Mayor Mengko, juga ikut serta melakukan pendaratan Panglima KO TT IT Kolonel Kawilarang dan Panglima Operasi KOMPAS MALSEL Letnan Kolonel Slamet Riyadi bersama staf.

Dari Telaga gerakan operasi diteruskan menuju Kota Piru. Sampai pada jarak kira-kira 10 km dari Piru, pasukan diistirahat-

kan guna mengutus Lettu Langi bersama dua tawanan RMS masing-masing Sersan D. Lestaluhu dan Kaitjili ke Piru untuk mengadakan hubungan dengan RMS yang ada di Piru, agar dapat diusahakan perundingan guna menghindari pertempuran. RMS tetap tidak mau mengadakan perundingan, bahkan ketiga utusan tersebut dibunuh dengan sadis oleh RMS, karena itu tidak ada jalan lain, kecuali meneruskan gerakan operasi militer terhadap para perusuh. Tiba di pertigaan antara Kota dan Piru, gerakan pasukan dibagi dua. Kompi bantuan dengan pimpinan Kapten Saerang menuju Kotania sedangkan pasukan lain bergerak menuju Kota Piru. Pada pukul 14.00 pasukan yang bergerak ke Piru tiba di Km 6 dan berhasil menawan dua anggota RMS yang ditemukan dari sebuah bivak. Pada pukul 17.50 pasukan mulai melakukan penyerbuan ke Kota Piru. Bersamaan dengan itu dari arah laut, kapal perang RI Rajawali mulai memuntahkan pelurunya ke darat untuk menghancurkan kubukubu musuh. Pada pukul 18.30 kota dapat diduduki tanpa perlawanan yang berarti dari musuh, dengan demikian pada 22 Juli 1950 seluruh Kota Piru dapat dibebaskan dari tangan RMS.

Sehari setelah Kota Piru dibebaskan, pada 23 Juli 1950 pasukan Bn 352 pimpinan Suradji juga berhasil membebaskan Kota Amahai yang terletak di pantai selatan Seram. Para perusuh lari ke luar kota masuk hutan dan ada juga yang lari menuju daerah Tehoru, namun karena medan daerah Seram terlalu luas, maka tidak bisa semua kekuatan RMS dapat dihancurkan. Daerah yang masih mampu dipertahankan oleh RMS adalah pesisir pantai daerah Seram Selatan mulai dari daerah Tehoru sampai Negeri Angus.

Pada bulan September 1950, Bn 711 (Bn. Mayor Abdullah) setelah berhasil dalam operasinya dari Maluku Tenggara, Seram utara (Wahai), dan Seram Timur (Geser) kemudian meneruskan gerakan operasi ke daerah Seram Selatan. Pada 9 September 1950, Bn 711 telah mencapai Kilmuri. Keesokan harinya Atiaho telah dapat diduduki. Dalam gerakan-gerakan ini Bn 711 selalu dihadapi dengan pertempuran dan selalu dimenangkan. Setelah Atiaho menyusul Werinama, dan dari sini gerakan dilanjutkan ke Polim, Laha, serta Lalim. Untuk mencapai stabilitas keamanan, kemudian dilakukan serangan terhadap Tehoru.



*Korban RMS*

Sebelum dilakukan serangan terhadap Tehoru, Lafa dekat Negeri Angus harus diduduki. Kekuatan Bn 711 yang ditugaskan untuk merebut Lafa terdiri atas dua peleton pasukan dan Detasemen Markas. Satu peleton berjalan kaki menyusur pantai di bawah pimpinan Lattu Malada, sedangkan satu peleton lagi menyusur pantai dengan perahu kole-kole, sedangkan Detasemen Markas di bawah pimpinan Letda Saleh Arifin menggunakan *motorboat* BO27. Pendaratan segera dilkakukan untuk kemudian berkobarlah pertempuran yang sengit di tepi pantai Negeri Angus. Dalam pertempuran tersebut, Mayor Abdullah gugur dan tiga prajurit lainnya menderita luka berat. Setelah kurang-lebih dua jam pertempuran, RMS yang terdiri atas Baret Hijau KNIL dan polisi dapat dipukul mundur.

**Operasi Senopati** dengan sasaran Kota Ambon, bertujuan untuk menghancurkan pusat pemberontakan RMS di pulau Ambon dan membebaskan rakyat dari kelaparan dan penindasan RMS serta untuk menguasai pulau itu sebenarnya. Pasukan yang dikerahkan sesuai Perintah operasi adalah

- (1) Angkatan darat, yang terdiri atas Bn 352 (Komandan Mayor Suradji) Bn 3 Mei (Komandan Mayor Mengko), Bn Claport (Komdandan Kapten Claproth) Bn Worang (Komandan Kapten Worang), Kompi Pisok (komandan Lettu Kapojos), Kompi Pask. Terpendam (Komandan Lettu MQ Maruapey) Co. Troep (Komandan Lettu Lumanau), Bn Banteng Merah (Komandan Mayor Yusmin), Bn Tengkorak Putih (Komandan Mayor Suryo Subandrio) dan Sie Staf Dekking 35 (Komandan Letda Sumardi).
- (2) Angkatan Laut, terdiri atas RI Patti Unus, RI Rajawali, RI Hantuah, RI Banteng, RI Namlea, RI Anggang, RI Andres, RI Amahai, RI Piru, LST-4 LCVP 10 buah, dan tiga buah kapal KPM masing-masing yaitu Waikelo, Waingapu, dan Waibalong.
- (3) Angkatan Udara, yang terdiri atas 2 buah Bomber B 25,2 buah Catalina (berpangkalan di Namlea).

Operasi Senopati yang bertujuan untuk membebaskan Pulau Ambon, sesuai Perintah Operasi ditetapkan jangka waktunya empat atau lima hari, tetapi karena waktu yang ditetapkan dalam Perintah Operasi ini tidak berhasil dan kurang-lebih satu setengah bulan baru Ambon seluruhnya dapat dibebaskan, maka operasi Senopati dibagi atas dua fase, yaitu

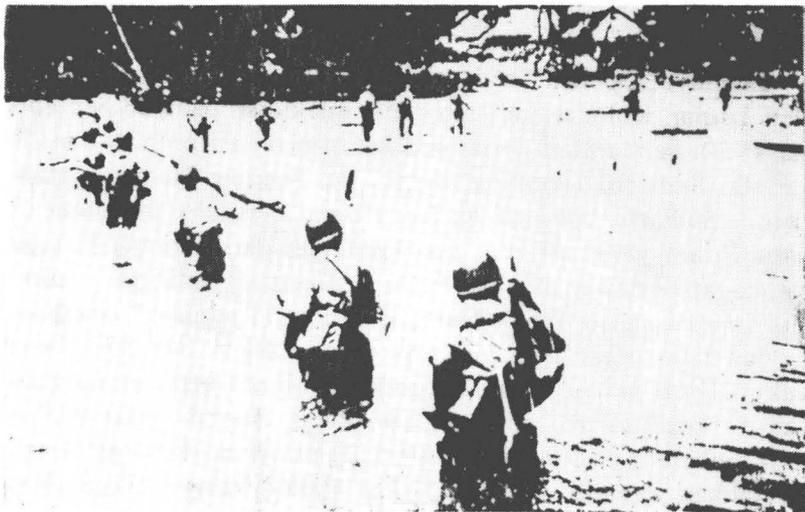
- (a) Gerakan Operasi Senopati fase I dilakukan pada 28 September 1950 sampai 2 Nopember 1950.
- (b) Gerakan Operasi Senopati Fase II, dilakukan pada 3 Nopember 1950 sampai dikuasainya Pulau Ambon.

**Gerakan Operasi Senopati Fase I** dibagi atas dua sektor, yaitu **Sektor Tulehu dan Sektor Hitu. Jalannya Operasi/Pendaratan Sektor Tulehu** dilakukan di tiga tempat, yaitu di daerah Wairuton, Air Panas, dan Pelabuhan Tulehu, di bawah Komandan Pasukan Maluku Selatan Letnan kolonel Slamet Riyadi. Pasukan yang mendarat di Wairaton ialah Bn 352 pimpinan Mayor Suradji dan Kompi Pasukan terpendam pimpinan Lettu MO Maruapey. Pasukan yang mendarat di Air Panas adalah Bn 3 Mei, sedangkan yang mendarat di pelabuhan Tulehu adalah Bn Worang, Bn Claproth, Kompi Pisok, Skunadron berlapis baja, dan Staf Komando Operasi Maluku Selatan.

Pendaratan di lindungi oleh kapal-kapal perang Ri Rajawali dan Ri Patti Unus. Pendaratan yang dilakukan pada pukul 06.00 di pantai Wairuton disambut dengan tembakan musuh, sehingga mengakibatkan gugurnya seorang prajurit bernama Anwar dari Bn 352. Adapun pendaratan di Air Panas tidak mendapat perlawanan yang berarti. Karena medan pertempuran sangat menguntungkan musuh, maka pertempuran berjalan dengan sengit, walaupun pada akhirnya musuh dapat dipukul mundur dan lari menuju Suli. Hari berikutnya, 29 September 1950, pasukan menuju Suli, dan hari itu juga musuh dapat diusir dari Suli, sedangkan Partai Netsepa dapat dikuasai pada 30 September 1950.

Usaha berikurnya dari pasukan kita untuk menembus daerah Waitatiri yang penuh parit dan kubu-kubu peninggalan

*Pendaratan APRIS*



*APRIS memasuki kota Ambon*

Belanda dari 1 sampai 6 Oktober 1950 belum berhasil, karena itu, sejak 8 Oktober 1950 dimulai Gerakan Operasi Senopati Fase II.

Jalannya Operasi/Pendaratan Sektor Hitu yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sudiarto dapat dilakukan pada 28 September 1950. Pendaratan pertama dilakukan oleh Kompi II dan III dari Bn Sudiarto (Banteng Merah) di Tanjung Mamua, tetapi Letkol Sudiarto bersama Kompi I yang berusaha mendarat di Batu Hitam yang berjarak dua kilometer dari Tanjung Mamua mendapat perlawanan yang hebat dari musuh sehingga menimbulkan kerugian di pihak TNI, yaitu seorang gugur, 11 orang luka dan lima orang luka berat termasuk Letkol. Sudiarto, Pada pukul 21.00 akibat luka yang diderita terlalu berat menyebabkan Letkol Sudiarto gugur di atas kapal Rumah Sakit Waibalong. Sebelum Letkol Sudiarto gugur, pimpinan Banteng Merah diserahkan kepada wakilnya yakni Mayor Yusmin merangkap sebagai komdan Operasi Jazirah Hitu.

Setelah melalui pertempuran yang sengit, pada 29 September 1950 pukul 06 00 Hitu dapat dikuasai oleh TNI. Gerakan Operasi diteruskan untuk menguasai Kota Ambon. Setelah Hitu dikuasai, sasaran berikutnya adalah daerah Hasal, Wanat, Telaga Kodok, dan Durian Patah. Karena medan pertempuran yang sangat menguntungkan musuh, maka hingga 7 Oktober 1950 daerah Wanat dan Telaga Kodok sebelum dapat dikuasai oleh TNI

#### ***4.3 Pembentukan Aparat Kekuasaan Republik di Maluku Berupa Pemda dan Kodir***

Rakyat dan wilayah Maluku Selatan adalah bagian integral bangsa Indonesia yang tak terpisahkan, karena itu semua yang terjadi dan dialami oleh rakyat Maluku Selatan menjadi tugas dan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu bangsa Indonesia secara keseluruhan tidak dapat tinggal diam terhadap para perusuh yang telah berbuat makar memproklamasikan RMS dan memisahkan rakyat Maluku Selatan dari

wilayah kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Maluku Selatan harus dibebaskan dari rasa takut dan teror dari para penghianat bangsa, karena itu guna menjamin keamanan dan menumpas habis para pengacau hingga keakar-akarnya, Komando Tentara dan Territorium VII Indonesia Timur membentuk Komando Pasukan Maluku Selatan (KPMS) di bawah komandan operasi Kolonel AE. Kawilarang (Panglima TT VII Indonesia Timur) yang kemudian diteruskan oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi berhasil merebut Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Lease.

Sesuai dengan tuntutan dan relevansinya dengan kebutuhan pembangunan, KPMS kemudian mengalami perubahan nama dan fungsi, yaitu:

- (1) Berdasarkan penetapan KASAD No. PNT-161/KASAD tanggal 30 Agustus 1950 dan Surat PNT TT VII No. 30006/VII/1950 17 September 1950, KPMS diubah menjadi Komando Pasukan "D" atau Kompas "D" di bawah pimpinan Letnan Kolonel JF Warrow.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TT VII Indonesia Timur No. 80042/7/VII/1952 5 Juli 1952 Kompas "D" diubah menjadi Resimen Infantri 25 atau RI "25" dengan komandan Letnan Kolonel Sokowati dan Kepala Staf Jono Sewojo.

## BAB V

### RMS DI NEGERI BELANDA

Pokok bahasan dalam bab ini adalah mengapa sampai RMS berkembang demikian pesat di Negeri Belanda? Faktor-faktor apa yang memungkinkan perkembangan itu? Bagaimana keadaan sekarang? Permasalahan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti, (1) mengapa sampai satuan-satuan KNIL asal Maluku berangkat ke Negeri Belanda (2) bagaimana penerimaan mereka di sana (3) mengapa ideologi RMS muncul dan bertahan di kalangan bekas tentara itu (4) mengapa timbul, dan apa maksudnya, "revolusi kebudayaan", dan (5) bagaimana relevansi ideologi RMS pada masa kini di antara turunan bekas KNIL itu?

#### *5.1 Berangkat ke Negeri Belanda*

Antara Maret sampai Juni 1951 sekitar 4000 anggota tentara KNIL beserta keluarganya yang berjumlah kurang lebih 12.500 jiwa tiba di Negeri Belanda. Mengapa hal itu terjadi pada hal menurut keputusan KMB bekas tentara Belanda itu harus didemobilisasi di tempat yang mereka pilih, yaitu tempat asal mereka atau di Jawa.

KNIL yang kepanjangannya adalah *Koninklijk Nederlands Indische Leger* (Tentara Kerajaan di Hindia Belanda) secara resmi berdiri pada tahun 1830, tetapi beberapa tahun sebelumnya telah ada kontingen-kontingen yang berperang dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825 – 1830). Satuan ini pada pokoknya terdiri atas dua bagian utama; pertama, perwiranya terdiri atas orang Belanda, kedua anak buah terdiri selain dari orang Belanda juga berbagai kontingen suku-suku di Nusantara. Selain orang yang berasal dari Maluku, khususnya "orang Ambon", terdapat pula orang Minahasa, orang Bugis, orang Jawa, dan lain-lain. Sejak usianya Perang Dunia II memang diadakan "peremajaan" di mana orang Ambon banyak diterima. Ini sebabnya dalam masa Revolusi mereka sangat menonjol.<sup>1</sup>

Selain KNIL, di Hindia Belanda terdapat pula KL atau *Koninklijke Leger* (Tentara Kerajaan) yang Angkatan Darat Belanda sesungguhnya. Di Indonesia ada pula satuan-satuan ini. Terutama menjelang Angresi I (1947) beberapa kontingen (Devisi 7 Desember) didatangkan untuk mempersiapkan serangan ke Yogyakarta dengan maksud menduduki ibukota RI saat itu dan melenyapkan kekuasaan RI.<sup>2</sup> Kemudian ada pula satuan-satuan dari *Koninklijke Luchtvaart* (Angkatan Udara), dan dari *Koninklijke Marine* (Angkatan Laut) walau jumlahnya sangat kecil.

Mengapa sampai untuk menghadapi RI di masa revolusi pihak Belanda mendatangkan satuan-satuan KL? Pertama, karena KNIL sendiri belum siap semenjak diobrak-abrik oleh Jepang, kedua karena strategi Belanda ketika itu untuk menghadapi RI adalah serangan "linier" seperti pada masa Perang Dunia II. Sebab itulah berbagai senjata berat dari Perang Dunia II didatangkan ke Indonesia, pada hal KNIL sesungguhnya sejak 1830 adalah satuan-satuan "anti gerilya".

Ketika KNIL dibubarkan pada 26 Juli 1950, kekuatannya sekitar 9000 orang, 4000 di antaranya orang Ambon (Maluku). Menunggu demobilisasi yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan lagi (sampai April 1951) KNIL masalah Maluku itu diberi status sementara sebagai KL sehingga dengan demiki-

an mereka masih terikat pada disiplin militer. Selain itu mereka dikumpulkan di sejumlah asrama yang dikawal oleh KL Belanda. Upaya demobilisasi itu pada mulanya diperkirakan akan berjalan lancar. Mereka yang ingin memasuki APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dipersilakan melakukannya secara perorangan. Mereka yang ingin kembali ke masyarakat dipersilakan mencari tempatnya. Persoalan timbul ketika di Indonesia Timur muncul tuntutan bahwa penggabungan dengan APRIS itu dilakukan secara kelompok (satuan tentara). Untuk sebagian ini sudah dilakukan di Makassar (Andi Aziz) dan di Bali, tetapi muncul pula tuntutan agar selama satu tahun satuan-satuan asal TNI tidak dimasukkan dalam wilayah Indonesia Timur. Masalah ini antara lain menimbulkan "peristiwa Andi Aziz". Dengan munculnya RMS pada 25 Mei 1950 sesungguhnya upaya demobilisasi di Maluku Tengah sudah terganggu. Selain itu mendemobilisasi satuan-satuan KNIL dari luar Maluku di Ambon, menurut pihak RIS juga tidak mungkin, terutama sejak Kota Ambon direbut oleh APRIS pada 8 November 1950. Pertempuran-pertempuran sejak itu pindah ke Pulau Seram, di mana Soumokil yang bertindak sebagai "presiden RMS" juga berada.

Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pimpinan KL di Jakarta dengan KSAP Ko. TB. Simatupang tidak menghasilkan jalan keluar yang memuaskan. Pada tingkat lebih tinggi diadakan perundingan pada 25 November 1950 antara Perdana Menteri Beel dengan Mr. Mohammad Roem. Usul agar demobilisasi dilakukan di Maluku tetapi tidak di Ambon juga tidak dapat diterima.

Sementara itu pihak KNIL Ambon juga bertindak. Mereka mengirim sebuah delegasi dipimpin Aponno untuk memperjuangkan agar demobilisasi tidak dilakukan di Jawa, satu-satunya alternatif yang ada ketika itu. Delegasi ini mengusulkan kepada Kabinet Belanda agar KNIL didemobilisasi di Pulau Seram yang ketika itu menjadi pusat pertahanan RMS. Ketika Pemerintah Belanda menolak tuntutan itu, pada bulan Desember 1950 delegasi tersebut mengajukan permasalahannya kepada pengadilan

di S-Gravenhage (*Arrondissements rechtbank*). Tuntutan mereka adalah agar Pemerintah Belanda tidak mendemobilisasi KNIL asal Ambon di Ambon ataupun di wilayah lain di Indonesia. Ketua pengadilan membenarkan serta menerima tuntutan itu dengan alasan bahwa bekas KNIL itu tidak akan terjamin keamanannya di Indonesia. Ketika pemerintah naik banding, pada 2 Maret 1951 Pengadilan Tinggi memperkuat putusan tersebut.

Sementara itu batas waktu kehadiran tentara Belanda di wilayah RIS telah habis (April 1951). Sebagian besar KL telah dipulangkan ke Belanda, sebagian dari KNIL (asal wilayah-wilayah lain) telah didemobilisasi, dan sebagian lagi telah masuk APRIS. Hanya 115 anggota KNIL Ambon yang telah kembali ke Maluku Tengah.

Dengan demikian tidak ada jalan lain bagi Pemerintah Belanda untuk mengusulkan kepada RIS agar bekas KNIL asal Maluku "untuk sementara" dibawa ke Belanda bersama keluarga mereka. Pada 2 Februari 1951, sebelum pengukuhan keputusan Pengadilan S-Gravenhage oleh Pengadilan Tinggi Belanda, Pemerintah RI menyampaikan persetujuan atas usul tersebut. Memasuki bulan Mei kapal-kapal pertama mulai mengangkut KNIL asal Ambon itu dari pelabuhan-pelabuhan Surabaya, Semarang, dan Jakarta karena sebelumnya mereka telah dikumpulkan di beberapa asrama di Pulau Jawa.<sup>3</sup>

Pemberangkatan tersebut dimaksudkan sebagai bersifat sementara. Diperkirakan bahwa keadaan akan membaik pada tahun-tahun berikutnya sehingga masalah bekas anggota KNIL itu akan ditinjau kembali. Salah satu alternatifnya adalah mengirim mereka ke Nieuw Guinea (Irian Barat), namun sejak tahun 1952 masalah "Irian Barat" menjadi tertunda-tunda. Hubungan RI dengan Belanda pun semakin memburuk sehingga mencapai puncaknya pada tahun 1957 ketika orang-orang Belanda diusir dari Indonesia dan perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih oleh pemerintah. Persoalan "sementara" itulah yang merupakan salah satu sebab utama mengapa ideo-

logi "RMS" meluas di kalangan bekas tentara KNIL itu sehingga malah menyulitkan pihak Belanda.

## 5.2 *Timbulnya RMS di Negeri Belanda*

Dengan demikian jelaslah bahwa antara pengiriman KNIL asal Maluku ke Belanda pada pertengahan 1951 dan perjuangan RMS terdapat perbedaan dalam asal-usul dan tujuan. Mengapa sampai keduanya dapat menyatu sehingga sampai tahun 1980 an ideologi RMS menjadi dominan di kalangan bekas tentara KNIL dan turunan mereka di Negeri Belanda? Bagaimana RMS bisa muncul di Negeri Belanda dan bagaimana ideologi itu merambat di kalangan bekas KNIL itu?.

Pihak Pemerintah Belanda (Kabinet Drees) tidak mengakui adanya RMS ketika diproklamasikan oleh Soumokil di Ambon pada tahun 1950, tetapi ada pihak-pihak tertentu di Negeri Belanda yang mendukung proklamasi itu dan mempropagandakannya. Salah satu organisasi yang kuat berada di belakang RMS adalah yayasan "DOOR de Eeuwn Trouw" yang didirikan beberapa hari setelah RMS diproklamasikan di Ambon. Selain itu Anti Revolutionere Partij" (ARP) yang konservatif itu secara nominal juga mendukungnya. Dukungan ARP ternyata tidak berarti. Partai itu selama masa revolusi dan sesudahnya memang berada di pihak oposisi karena pemerintah ketika itu dipegang oleh "kiri-katolik" (Partai Sosialis atau yang lazimnya di Negeri Belanda dinamakan partai *van den Arbeid* atau *Pvda* dan *KVP* atau *Katholieke volks Partij* atau partai Katolik. *ARP* yang sebelumnya sangat berkuasa di Belanda, yang melahirkan *Se-thische Politiek* di Hindia Belanda, tetapi yang menjadi sangat reaksioner pada tahun 1920an, memang telah banyak kehilangan kekuasaan terutama sejak 1945. Sikap mereka yang menentang politik Kabinet Drees yang terus-menerus mengusahakan perundingan dengan pihak RI dianggap sebagai kelemahan. Jadi dukungan yang mereka berikan pada RMS sekedar embel-embel dari sikap politik itu.<sup>4</sup>

Pihak yang secara positif mendukung RMS adalah yayasan yang didirikan oleh sejumlah ahli hukum dan manager bersama

sejumlah mantan jenderal Belanda di Eindhoven pada tahun 1950 yang dinamakan *DOOR de Eeuwn Trouw*.<sup>5</sup> Selain itu ada sejumlah tokoh politik tingkat tinggi Belanda yang untuk kepentingan-kepentingan lain, juga mendukungnya, seperti PS. Gerbrandi (*PvdA*), Ch. JIM. Welter (*KVP*), dan JM. Meyer Raneeft, serta Prof. Serritson. Tokoh-tokoh ini sekalipun bukan anggota *DOOR de Eeuwn Trouw* banyak mendukungnya melalui parlemen ataupun pers.<sup>6</sup>

*Door de Eeuwn Trouw* didirikan di kota industri Eindhoven pada 29 April 1950 (RMS diproklamasikan pada 25 April). Tujuannya, sesuai anggaran dasarnya adalah, "Membangun perhatian di Negeri Belanda dan tempat-tempat lain bagi kepentingan bangsa Ambon, Timor, dan Minahasa serta berbagai kelompok kepentingan lainnya di bekas Kepulauan Hindia Belanda, serta mengusahakan realisasi hak penentuan nasib sendiri (*zelfbeschikingsrecht*) agar tujuan itu tercapai".<sup>7</sup> Organisasi ini jelas dibentuk untuk menentang keputusan KMB yang menyerahkan kekuasaan kepada RIS. Ketuanya adalah Herman Coenradi (pegawai tinggi di perusahaan Phillips di Eindhoven) yang memegang jabatan ini sampai tahun 1968. Sebagai pengurus pusat di Eindhoven, pimpinan dinamakan *scomite van Aanbeveling* yang terdiri juga atas sejumlah guru besar seperti Prof. JJ. Brugmans, Prof. RP. Cleveringa, Prof. FJFM. Duynstee, Prof. Gezina van der Moler, Prof. JHW. Verzijl, dan Prof. SU. Zuidema. Terdapat pula sejumlah ahli hukum, beberapa mantan perwira tinggi seperti H. Behrens, CEL. Helfrich (mantan panglima Belanda di Hindia Belanda) dan HC. Winkelman. Juga seorang pastor bernama W. Loop dan seorang pendeta bernama J.C. Koningsberger. Cabang-cabang kemudian muncul di berbagai kota besar, tetapi orang-orang yang paling penting dalam organisasi itu selain Coenradi juga Gerrit Buiten. Sebuah media juga segera muncul dengan nama *De Stem van Ambon* (Suara Ambon).<sup>8</sup>

Organisasi ini mengadakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuannya. Untuk memperluas dasar-dasarnya pada masyarakat, cabang-cabang menyelenggarakan *Ambon-avond* (malam Ambon) berupa malam kesenian dan upaya mengumpulkan da-

na. Selain itu organisasi ini juga berusaha mempengaruhi anggota-anggota parlemen. Media massanya bertugas menjangkau lapisan yang lebih luas. Upaya untuk mengirim bantuan kepada RMS di Seram juga dilakukan beberapa kali, tetapi pengiriman senjata, mesiu, dan sebuah kapal terbang melalui Belgia ternyata dapat digagalkan oleh Pemerintah Belanda. Hubungan dengan RMS di Ambon dilakukan hanya sampai bulan November tahun 1950 ketika Kota Ambon direbut APRIS dan unit siaran di kota itu dibekukan, bahkan ada upaya untuk menarik Westering, yang ketika itu berdiam di Paris, untuk memimpin suatu pasukan yang akan dikirim dari Belanda. Usaha ini juga gagal, tetapi salah satu usaha lainnya yaitu mengirim seorang utusan berhasil dilakukan sekalipun utusan itu hanya sampai di Kepulauan Raja Ampat melalui Manila. Utusan itu, Hazelhoff Roelfzema yang juga dijuluki *soldaat van oranje*, berhasil kembali ke Negeri Belanda dan mendapat sambutan sebagai pahlawan dari pihak RMS.<sup>9</sup>

Dukungan lain untuk RMS datang dari suatu organisasi yang sesungguhnya bertujuan membantu para mahasiswa dari Indonesia Timur yang belajar dengan biaya dari apa yang dinamakan *Malino-beurz* (Basiswa Malino). Setelah NIT menjadi bagian dari RIS (Agustus 1950) banyak di antara mahasiswa itu kehilangan biasiswa. Untuk membantu mereka pendeta GJ. Ziedzes des Plantes membentuk organisasi yang dinamakannya *Help Ambon in Nood* disingkat HAIN (Membantu Ambon di saat Darurat). Selain Plantes juga Pendeta Ritzema Bos menjadi pengurus utamanya. Beberapa orang mahasiswa Ambon kemudian juga bergabung dalam pengurus organisasi itu.<sup>10</sup>

Kedua organisasi itulah yang kemudian mengadakan hubungan tetap dengan para wakil RMS di Negeri Belanda. Salah seorang wakil RMS yang diangkat oleh Soumokil adalah dr. Vigelij Nikiuluw, salah seorang pejabat Hindia Belanda yang telah pindah ke Negeri Belanda sebelumnya. Kemudian menyusul P. Lokollo yang sebelumnya menjadi anggota kabinet Soumokil di Ambon. Vigelij Nikiuluw mendapat dukungan dari *Door de Eeuwn, Trouw*, sedangkan Lokollo di dukung oleh HAIN.

Antara kedua organisasi itu sering terdapat saingan yang kuat untuk menduduki tempat utama sebagai pendukung RMS. Pada umumnya dukungan dari *Door de Eeuwn Trouw*, yang memiliki cabang-cabang di seluruh Negeri Belanda dan mendapat simpati dari berbagai lapisan masyarakat itu, lebih efektif dibandingkan dengan HAIN. Namun demikian agaknya motivasi HAIN hanyalah sosial, sedangkan *Door de Eeuwn Trouw* mempunyai kepentingan-kepentingan lain yang sampai saat ini belum dapat diungkapkan dengan jelas karena sumber sejarahnya masih tertutup.

Terutama *Door de Eeuwn Trouw*-lah yang turut mempertahankan ideologi RMS di Negeri Belanda. Landasan moral yang digunakan adalah semboyan bahwa Belanda mempunyai hutang budi pada orang Ambon yang berabad-abad setia padanya, karena itu membantu perjuangan RMS di Maluku dianggapnya sebagai suatu keharusan. Cara perjuangannya dianggap legal karena menekankan pada hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) yang dalam saat-saat sesudah Perang Dunia II sangat populer. Organisasi ini juga yang turut membantu delegasi Aponno sehingga menghasilkan keputusan pengadilan yang melarang Pemerintah Belanda mendemobilisasi bekas KNIL asal Ambon di Indonesia.

Ketika kapal-kapal laut membawa bekas KNIL tersebut ke Belanda, *Door de Eeuwn Trouw* pulalah yang mengorganisasi panitia-panitia penyambutannya di Pelabuhan Rotterdam dan Amsterdam. Para anggotanya berbondong-bondong datang di pelabuhan-pelabuhan itu dengan membawa spanduk serta bendera RMS dan bendera Belanda. Mereka menyebarkan pamflet-pamflet yang pada dasarnya memuat uraian-uraian bahkan ajakan-ajakan pada bekas tentara itu untuk menjadi RMS. Mereka menekankan bahwa RMS-lah wadah yang sesungguhnya bagi para bekas tentara itu. Mereka menjanjikan bahwa pada saatnya bekas tentara dan keluarganya akan dipulangkan ke Ambon untuk menjadi bagian dari RMS yang merdeka.<sup>11</sup>

Selain itu mereka juga mendukung upaya RMS untuk mendapat perhatian PBB. Doktor Nikiuluw diutus oleh RMS

ke Luke Success dengan biaya dari *Door de Eeuwn Trouw* untuk mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh dunia. Sampai tahun 1965 berbagai upaya RMS di Negeri Belanda dibiayai oleh *Door de Eeuwn Trouw*<sup>12</sup>, bahkan sesudah itu organisasi itu selalu mengadakan semacam lokakarya tahunan untuk membicarakan perkembangan RMS. Organisasi ini mulai mundur pengaruhnya sejak sekitar tahun 1970an. Terutama sejak ketuanya, Coenradi, meninggal dunia pada tahun 1986 tidak terdengar lagi kegiatannya. Suratkabarnya, *Stem Van Ambon*, sudah jauh sebelumnya menghilang karena merosotnya langganannya. Mulai pertengahan tahun 1970an perkembangan orang Maluku di Belanda memang telah berubah. Sejak itu mereka, terutama turunan ketiga, mengambil langkah sendiri dan mulai beralih dari ideologi RMS seperti yang akan dikemukakan dalam bagian lain dari bab ini.

### 5.3 *Pemukiman di Negeri Belanda*

Ketika tiba di Negeri Belanda pada pertengahan 1951 bekas tentara KNIL dan keluarganya yakin benar bahwa mereka berada di negeri itu untuk sementara saja. Memang demikian yang dikemukakan kepada mereka ketika bertolak dari Indonesia, istilah Belandanya adalah *tijdelijk verblijf*<sup>13</sup>. Pernyataan itu bukan sekedar janji tetapi didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan antara Belanda dan Indonesia. Menurut hukum mereka masih tetap dianggap sebagai warga negara RIS. Ini mungkin salah satu sebab mengapa segera setelah mereka tiba di Belanda, dikeluarkan keputusan untuk membebaskan mereka dari dinas militer sehingga status mereka di Belanda adalah sebagai sipil warga Negara Indonesia. Namun demikian mereka juga tidak dianggap sebagai orang asing karena adanya ikatan-ikatan berdasarkan KMB. Di Negeri Belanda mereka dianggap berada di bawah "hukum adat Belanda" atau *commune recht*. Selain itu bagi mereka tidak dikenakan istilah "demobilisasi" tetapi "demiliterisasi". Istilah demobilisasi oleh pimpinan tentara Belanda gap proses pemulangan dalam masyarakat sendiri atau *de plaats van eigen koeze* (tempat pilihan sendiri)<sup>14</sup>. Tidak disadari

ketika itu bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan kenyataan. Hubungan Indonesia-Belanda tidak pernah pulih lagi sampai tahun 1967. Dengan demikian sifat "sementara" berangsur-angsur beralih ke sifat tetap, namun kesadaran ini berlangsung lambat, baik di kalangan pemerintah Belanda maupun di kalangan bekas KNIL itu sendiri.

Sesungguhnya, sifat "sementara" itu pula yang menentukan cara Pemerintah Belanda menangani masalah "demiliterisasi" tersebut. Ketika pemerintah memutuskan untuk mendatangkan bekas tentara KNIL asal Ambon itu, langkah-langkah yang diambil tidak berbeda dengan langkah-langkah yang diambil untuk menampung warga negara Belanda yang pulang akibat KMB. Mereka dilihat sebagai *repatrianten* atau warga yang pulang, namun karena jumlah KNIL dan keluarganya yang datang dengan tiba-tiba itu jauh lebih besar, maka berbagai departemen bekerjasama untuk menyiapkan penampungan dan makanan. Pertama tama yang berkepentingan dalam hal ini adalah *Dienst Maatschappelijke Zorg* (DMZ) atau Dinas Sosial dari Departemen Dalam Negeri yang mengutus *repatrianten* tersebut. Organisasi inilah yang ditugaskan untuk menyediakan perumahan, pakaian, makanan, dan kesejahteraan sosial bagi tentara KIL dan keluarganya. Masalah politik yang berkaitan dengan orang-orang Ambon itu ditangani oleh suatu Departemen yang disebut *Uniezen en Overzeesche Rijksdeelen* (Urusan Uni dan Wilayah Kerajaan di seberang Lautan). Selain itu Departemen Pertahanan, Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, dan Departemen Kesehatan juga terlibat dalam persiapan-persiapan pertama. Pada akhir tahun 1951 dibentuk suatu dewan penasihat yang dinamakan *Advies Commissie Ambonezen* yang diketuai oleh J. Rombach, kepala Kabinet Perdana Menteri dengan Mr. BM. Smulders sebagai sekretaris.<sup>15</sup>

Para pendatang itu ditampung dalam berbagai asrama dan perumahan yang disewa oleh pemerintah atau yang dimiliki oleh pemerintah. Pada mulanya sekitar 50 buah, tetapi kemudian bertambah menjadi 91 buah.<sup>16</sup> Seorang ahli sejarah kesenian yang juga turunan dari para pendatang itu, Drs. H. Akihary

pernah ditugaskan oleh Museum Maluku di Utrech untuk mempelajari sejarah pemukiman tersebut. Ia membaginya dalam beberapa bagian, yaitu (1) Kamp konsentrasi Nazi seperti di Vucht (asrama Lunetten dan Schattenborg), (2) Biara Katolik seperti Capucijnerklooster dan Rijckhof Klooster yang diperuntukkan bagi warga Katolik (asal Kei-Aru), (3) Vila (*landhuizen*) seperti "De Zwaluwburg" dekat Desa Elburg, Schaffelaar di Barbevelt, (4) Kamp dari Dinas Penempatan Tenaga seperti Wydemerck di Desa Balk dan Donzel di Desa Nistelrode serta Marum di Nuis, (5) Kamp dari Departemen Sosial, (6) Kamp Militer seperti di Woerden.<sup>17</sup>

Masalah yang pertama-tama menonjol adalah kekacauan. Tidak adanya pengurusan yang jelas menyebabkan penghuni perumahan-perumahan yang beraneka ragam itu menjadi kacau. Perkelahian dan konflik-konflik besar dan kecil mencul di mana-mana. Untuk mengatasi pemerintah lalu membentuk suatu lembaga dengan pimpinannya bekas perwira tinggi P. Scholten yang segera pula mendapat julukan dari para penghuni sebagai "Oom Piet", namun *Hoofdleider de Ambonezenwoodnoorden in Nederland* (HAWIM) atau pimpinan pemukiman orang Ambon di Negeri Belanda itu, tidak bertahan lama pula karena setahun kemudian dibubarkan.<sup>18</sup>

Arah yang ditempuh oleh HAWIM memang tidak memuaskan banyak pihak. Sholten atau Oom Piet berusaha untuk mengembalikan suasana "tangsi" yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang KNIL tersebut. Ini seolah-olah merupakan gerakan ke arah "militerisasi" para bekas tentara itu, bahkan ada usul untuk menggunakan sebagian dari mereka dalam dinas ketenteraan Belanda atau mengirim mereka untuk berperang di bawah bendera PBB di Korea bersama kontingen Belanda lainnya.

Setelah dibicarakan panjang lebar dalam kabinet, kemudian diputuskan untuk membentuk suatu organ lain untuk menangani orang-orang KNIL di berbagai kamp itu. Pada bulan November 1952 terbentuklah *Commissaris Van Ambonezenroorg* (CAZ) dengan Ir. J. Van Ringen sebagai ketua. Organisasi pemerintah ini bertahan sampai tahun 1970an. Salah satu usa-

hanya yang berhasil dan bertolak belakang dengan kebijaksanaan Scholten adalah memindahkan penghuni kamp-kamp tersebut dalam *wijk* atau gugusan rumah-rumah di kota-kota kecil di seluruh Negeri Belanda. Usaha ini mulai dilakukan sejak tahun 1960an ketika muncul berbagai protes di kalangan penghuni kamp-kamp yang merasa tidak nyaman dan diperlakukan buruk oleh pemerintah. Tidak semua penghuni kamp bersedia dipindahkan karena mereka harus membayar sewa rumah dan segala peralatannya dari uang tunjangan bulanan yang juga mulai diterima dari CAZ. Kamp terakhir yang dipindahkan pada tahun 1980an terletak di Woerden, sebuah kota militer dengan kamp yang dihuni oleh bekas KNIL yang ngotot status tentaranya dipulihkan kembali.

Pembubaran kamp-kamp tersebut (91 jumlahnya) dan pemindahan penghuni ke berbagai kota kecil terutama berlangsung pesat sejak insiden-insiden pembajakan dan teorisme di pertengahan tahun 1970an. Ketika itu terjadi perubahan-perubahan yang besar tidak saja dalam upaya mengelola orang-orang Ambon di Negeri Belanda, tetapi juga dalam sikap orang-orang Ambon sendiri, terutama generasi ketiganya.

Sesungguhnya di kalangan orang Ambon sendiri ada upaya untuk mengorganisasikan dirinya. Pertama-tama, pada bulan Februari 1952 sejumlah pimpinan, yaitu Dr. H.A Kainama (dokter tentara dengan pangkat kolonel), pendeta H. Supusepa, dan J Hitiahubessy mengambil inisiatif untuk membentuk Badan Perwakilan Rakyat Maluku Selatan (BPRMS). Organisasi ini berdiri, selain karna kekacauan yang timbul dalam kamp-kamp tersebut di atas, juga karena perselisihan yang tidak kunjung reda antara dua wakil resmi RMS di Negeri Belanda. Nikiuluw dan Lokollo.

Pada tahun 1953 Ir. Manusama tiba di Negeri Belanda dari Seram melalui Irian Barat. Ia berhasil mendamaikan kedua pihak itu, di kemudian hari, setelah Soumokil tertangkap di Seram pada tahun 1962 Manusama dijadikan presiden RMS. Kedudukan itu secara resmi dipegangnya sampai sekarang, sekalipun kekuasaannya sudah jauh menurun dibandingkan tahun 1950an.

Peranan yang lebih aktif kini dipegang oleh Pendeta Metiari. Sesudah pembajakan dan teriorisme 1970an Metiari berhasil merundingkan suatu kesepakatan dengan Perdana Menteri Lubber untuk menentukan nasib orang Ambon di Negeri Belanda. Persetujuan Lubber-Mettiari (1986) itu menentukan tanggungjawab Pemerintah Belanda, pertama-tama kepada orang Ambon generasi pertama (bekas tentara) yang diberi pengakuan sebagai tentara (bekas). diberi tunjangan tetap, serta diberi tanda penghargaan oleh Ratu Belanda. Selanjutnya juga diatur berbagai hal mengenai perumahan, kerja, dan pendidikan untuk kepentingan generasi ketiga dan keempat.

Sudah sejak akhir tahun 1970an pemerintah telah membubarkan CAZ dan membentuk suatu badan dalam tubuh Departemen Sosial untuk mengurus masalah Maluku di Negeri Belanda. Badan yang dinamakan *Inspraak Orgaan Welzijn Molukken* disingkat IWM, atau badan Penasehat Kesejahteraan Maluku, tidak saja terdiri atas orang-orang Belanda, tetapi juga terdapat wakil-wakil Maluku. Badan inilah yang menilai semua kebijaksanaan pemerintah bagi orang Maluku dan memberi saran saran bagi pelaksanaannya.

Inspraak Orgaan Welzijn Molukken berhasil dalam banyak hal. Masalah pendudukan, pekerjaan, malah sebuah Museum Maluku telah beridiri pula di Utrecht. Museum inilah yang bertugas mengkoordinasikan penelitian-penelitian mengenai sejarah orang-orang Ambon di Negeri Belanda. Selain itu ada pula bagian yang ditugaskan untuk menyusun buku-buku pelajaran bahasa Melayu untuk kepentingan pendidikan di sekolah-sekolah<sup>19</sup> Sejumlah sejarawan Maluku bekerja di sini seperti Drs.W. Manuhutu, Drs. Habibu, dan juga sejumlah finguist dipimpin Dr. Bert Tahitu. Perkmebangan sejak tahun 1970an akan dibahas lagi dalam bagian lain dari bab ini.

#### **5.4 Generasi Baru**

Tahun-tahun 1970an merupakan awal dari suatu periode baru dalam sejarah orang-orang Maluku di Negeri Belanda. Periode ini ditandai oleh sejumlah tindakan kekerasan berupa pemba-

jakan kereta api dan terorisme serta demonstrasi-demonstrasi dengan tindakan kekerasan. Sebenarnya pada tahun 1966 telah terjadi suatu tindakan kekerasan pula, tetapi nampaknya peristiwa itu terpisah dengan yang menyusul kemudian. Pada 26 Juli 1966, malam hari, sejumlah pemuda militan membakar gedung Kedutaan Besar RI di Den Haag. Hal ini dilakukan beberapa jam setelah isteri Dr. Soumokil, yang telah dilaksanakan hukuman matinya di Jakarta pada 12 April 1966, tiba di Negeri Belanda.

Pada 31 Agustus 1970 terjadi kekerasan pertama yang membawa dampak yang kuat. "Peristiwa Wassenaar" itu terjadi menjelang kedatangan Presiden Suharto di Negeri Belanda sebagai protes atas ketidaksediaan RI membicarakan masalah pemulangan orang-orang bekas KNIL itu ke Indonesia.

Situasi internasional rupanya mempengaruhi pemilihan cara protes yang terjadi di tahun 1970an itu. Pada waktu itu sedang ramai-ramainya dan terjadi tindakan-tindakan terorisme oleh PLO berupa penculikan dan pembajakan. Keadaan inilah yang rupanya memberi ilham pada sejumlah pemuda yang militan untuk ikut bertindak. Apakah benar sebagian dari mereka dilatih oleh para teroris internasional seperti dituduhkan orang, tidak dapat dibuktikan, namun nampaknya kamp-kamp yang terisolasi itu memberi kesempatan yang cukup luas bagi persiapan-persiapan terorisme.

Pada tahun 1975 terbetik berita yang lebih gawat lagi, yaitu adanya rencana-rencana untuk menculik Ratu Yuliana sebagai cara untuk memaksakan Pemerintah Belanda mencari jalan keluar bagi masyarakat Ambon untuk mewujudkan RMS serta kembali ke Maluku, namun rencana itu terbongkar sehingga tidak jadi dilaksanakan. Tindakan kekerasan kemudian dialihkan pada hal-hal lain. Pada bulan Desember tahun itu juga terjadilah peristiwa pembajakan kereta api di Kota Assen, kota yang memiliki komposisi orang Ambon yang cukup besar. Dua hari kemudian terjadi lagi suatu peristiwa kekerasan, yaitu perebutan gedung konsulat RI di Amsterdam. Polisi berhasil mengatasi tindakan itu dan empat pemuda Maluku tewas dalam upaya itu. Kemudian pada tahun 1977 terjadi lagi tindakan kekerasan

ketika dua kelompok pemuda Maluku merebut dan menduduki sebuah sekolah dasar dan membajak kereta api sekalipun menyedera sekitar 105 murid sekolah dasar itu serta 59 orang dewasa. Peristiwa ini berlangsung selama 20 hari. Baru setelah tentara Belanda dikerahkan dengan dilindungi pesawat-pesawat termurnya, kereta api sekolah itu dapat direbut kembali. Selain dua orang sendera yang meninggal, juga empat orang teroris terbunuh oleh tentara. Satu tahun berikutnya, 13 Maret 1978, tiga orang pemuda ekstremis yang menamakan dirinya "Komando Bunuh Diri Maluku Selatan" menyerbu dan menduduki Balai Kota di Drenthe yang terletak tidak jauh dari Assen. Mereka menuntut sejumlah uang, sebuah pesawat terbang untuk mengangkut mereka keluar negeri dan membebaskan sekitar 21 orang Maluku yang sedang dipenjarakan karena aksi-aksi sebelumnya, namun dalam waktu 28 jam tentara Belanda dapat merebut gedung itu kembali, dan dua di antara teroris itu terbunuh. Dalam tahun-tahun berikutnya hanya terjadi beberapa demonstrasi dengan kekerasan, terutama pada saat pawai memperingati hari proklamasi RMS<sup>20</sup>

Masalah kekerasan itu sudah menghasilkan sejumlah tulisan baik dari kalangan pendukung RMS<sup>21</sup> maupun para ilmuwan sosial.<sup>22</sup> Pertanyaan yang diajukan sekarang adalah mengapa sampai para pemuda tiba-tiba menjadi militan dan menuntut terbentuknya RMS secara kekerasan?

Bagaimana reaksi generasi tua, para bekas KNIL yang datang pada tahun 1951 itu, atas tindakan-tindakan anak-anak mereka, terutama dari generasi yang Belanda? Sesungguhnya pimpinan generasi tua mengalami pergantian yang penting pula. Pada mulanya hanya terdapat sebuah organisasi yang agak longgar, yaitu Badan Perwakilan Rakyat Maluku Selatan yang didirikan pada tahun 1952. Sekalipun Ir. JA Manusama yang tiba dari Seram melalui Irian Barat pada tahun 1953 berhasil mengatasi pertikaian di antara berbagai fraksi, tetapi keadaan tidak selalu mulus, karena itu pada Desember 1962 berbagai fraksi itu bertemu kemabli untuk berunding. Langkah ini terutama berkaitan dengan tertangkapnya Dr. Soumokil di Seram Barat tahun itu juga

dan lenyapnya perlawanan RMS di Maluku. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam mendekatkan berbagai fraksi itu adalah seorang pendeta tentara, S. Metiari, yang berdiam di Assen. Selanjutnya pada bulan itu pula terbentuklah suatu wadah baru yang dinamakan Badan Persatuan dengan Metiari sebagai ketuanya. Namun demikian nampaknya keadaan belum mereda terutama karena Ir. JA. Manusama belum mendapat dukungan formal. Ada yang menghendaki agar dia dipilih menjadi presiden RMS yang baru menggantikan Soumokil yang sedang dipejarkan dengan vonis hukuman mati (baru dilaksanakan pada tahun 1966) Berbagai fraksi sekali lagi berunding dengan pimpinan Metiari sehingga menghasilkan suatu badan federasi baru yang diberni nama Badan Persatuan Rakyat Maluku Selatan dengan Metiari Sebagai ketua. Pada pertemuan itu pula Manusama diangkat sebagai presiden dan membentuk "Pemerintah Darurat". Badan Persatuan agaknya bertindak sebagai perwakilan rakyat (atau perwakilan berbagai fraksi) Tidak lama kemudian ketidaksenangan dari bekas tentara atas pemerintahan dan perwakilan yang didominasi sipil atau orang-orang yang memiliki karier militer. Pada tahun 1968, seorang bekas sersan bernama IJ. Tamaela membentuk organisasi sendiri yang dinamakan Front Siwa Lima, dan setahun kemudian mengangkat dirinya sebagai presiden RMS. Ia lalu mencoba memperjuangkan RMS pada forum internasional dan berdiam di New York. Perpecahan ini lenyap setelah Tamaela meninggal di New York pada tahun 1978. Sementara itu kedudukan Manusama pun makin bergoyah karena tidak mendapat dukungan yang penuh. Jadi ketika berbagai tindakan terorisme itu terjadi, kalangan bekas tentara KNIL memang sedang tidak puas dengan pimpinan mereka.

Bagaimana sikap Pemerintah Belanda menghadapi keadaan yang baru itu? Seperti dikemukakan di atas, sejak tahun 1951 Pemerintah Belanda berpijak pada pendapat bahwa kedatangan bekas KNIL asal Ambon itu hanya sementara saja (*tijdelijk verblijf*). Sikap ini memang sangat mempengaruhi bekas tentara tersebut dan keluarga mereka. Propaganda RMS

dari pihak *Door de Eeuwn Trouw* serta orang-orang RMS seperti Nikiuluw Lokollo, dan Manusama lalu memberi arti khusus pada sikap itu. Muncullah suatu kepercayaan yang sangat kuat di kalangan tentara bahwa ada kiatan antara RMS dan *tijdelijk Verblijf*. Maksudnya, mereka yakin benar bahwa pada suatu saat mereka akan dikembalikan ke Maluku dalam konteks RMS, bahwa RMS akan diwujudkan di Maluku sebagai wadah bagi pengembalian mereka dari Negeri Belanda. Dengan demikian ideologi RMS terjalinlah dengan sikap 'sementara' tersebut. Keadaan inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya tindakan-tindakan kekerasan tersebut di atas. Kaum radikal yang terwujud dalam organisasi-organisasi pemuda itu, lalu mencoba memakai kekerasan untuk mewujudkan idealis "kembali dan 'RMS'" tersebut. Pada awalnya mereka berharap bahwa orde baru akan memahami kepentingan mereka, namun ternyata orde baru tidak mengubah sikap mengenai hal ini. Inilah yang melatarbelakangi 'peristiwa Wassenaar' ketika rumah duta besar RI disebut pada 31 Agustus 1970 menjelang kunjungan persahabatan Presiden Suharto di Negeri Belanda. Tindakan-tindakan teror setelah itu ditujukan kepada pemerintah Belanda.

Sesungguhnya sudah sejak tahun 1956 kabinet Drees mulai mengambil kesimpulan bahwa keputusan penampungan "sementara" tidak tepat lagi. Republik Indonesia tidak bersedia membicarakan masalah itu karena masalah Irian Barat saja tidak kunjung beres, karena itu pada bulan September 1957 Drees membentuk suatu panitia untuk mempelajari masalah "orang Ambon dan melapor kepada kabinet serta dilengkapi dengan usul-usul yang konkret. Sebagai ketua panitia dipilih Hilda Verwey Jonker, seorang anggota parlemen dari partai Van den Arbeid (partai sosialis) yang sesungguhnya kurang simpati (ketika itu) pada masalah itu seperti yang ditangani kabinet. Pada tahun 1959 Verwey Jonker memasukkan laporan dan sarannya. Pada dasarnya disarankan agar politik *tijdelijk verblijf* dibuang. Sebagai gantinya harus diusahakan agar orang-orang Ambon berintegrasi dengan masyarakat Belanda. Ini berarti pemerintah jangan sekali-sekali mendukung apalagi mengakui RMS.<sup>2 3</sup>

Sekalipun saran tersebut diterima, namun pelaksanaannya terkatung-katung. Seperti disebut di atas pada saat itu kepentingan orang-orang Ambon di kamp-kamp yang tersebar di seluruh Negara Belanda itu (sekitar 91 buah) diurus oleh sebuah komisi yang dipimpin seorang pejabat sekretariat kabinet (*Commissie Ambon Zorg* (CAZ) atau komisi Urusan orang Ambon) Komisi ini berhasil, pertama memperjuangkan setiap bulan menggantikan yang saku yang sangat minim yang mereka terima sejak tahun 1951. Kedua sejak tahun 1960an diusahakan untuk memindahkan penghuni-penghuni kamp atau asrama-asrama tersebut ke wilayah kota-kota kecil agar mereka dapat berbaur dengan masyarakat umum. Namun demikian *resettlement* ini berjalan tersendat-sendat karena pihak orang Ambon masih mencurigai tindakan-tindakan itu. Salah satu alasannya ialah bahwa 'asimilasi' akan menghambat ideologi RMS.

Ketika orang-orang Ambon mulai mengambil tindakan kekerasan untuk memperjuangkan nasib mereka (pertama kali berupa pembakaran kedutaan Besar RI pada bulan April 1966). Pemerintah Belanda lalu bertindak lagi. Tindakan itu terutama berkaitan dengan terbentuknya Badan Persatuan pada tahun 1966 pula. Upaya meningkatkan kebijaksanaan "integrasi" itu dilakukan dengan membentuk suatu badan khusus dalam tubuh Departemen Sosial (*Minsiterie Van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk* atau Kementerian Kebudayaan, Rekreasi, dan Pekerjaan Sosial) yang dinamakan *Afdeeling Molukkres* (aksi orang Maluku) Seksi inilah yang diharapkan akan mengambil alih tugas-tugas dari CAZ dan meningkatkan pekerjaan. *Commissaris Van Ambonezenzorg* yang berada pada jajaran perdana menteri itu memang dibubarkan pada tahun 1970.<sup>24</sup>

Menyusul tindakan-tindakan teror pada tahun 1970an itu, Pemerintah Lubbers meningkatkan lagi upaya "integrasi" tersebut. Kini para pemimpin Maluku sendiri diajak untuk menilai dan memberi saran-saran pada pemerintah. Untuk itu, seperti disebut di atas, dibentuklah *Inspraak Orgaan Welzijn Molukkers* (IWM) atau Badan Penasehat Kesejahteraan orang

Maluku. Sudah sejak tahun 1967 pihak Belanda menerima usul orang Maluku untuk tidak menggunakan istilah Ambon bagi mereka, tetapi istilah Maluku. Ini disebabkan para bekas KNIL itu tidak saja terdiri atas orang Ambon, tetapi ada pula yang berasal dari bagian-bagian lain dari Maluku seperti orang Kei-Aru.

Puncak dari upaya meletakkan landasan untuk "integrasi" itu adalah perundingan-perundingan antara pimpinan badan perjuangan, yaitu Pendeta Metiari dan Perdana Menteri Lubbers pada tahun 1986, dan menghasilkan persetujuan Lubbers-Metiari tersebut di atas. Namun demikian jalan ke arah integrasi belum mulus. Perbedaan-perbedaan penting masih terdapat di kalangan orang Maluku sendiri. Upaya Metiari untuk mengatasi pertentangan antara fraksi memang tetap dilakukan, namun hal itu juga tidak dapat berhasil seketika. Masalahnya adalah mengenai pengertian integrasi itu sendiri.

Karena kekacauan dalam pengertian integrasi, terutama bagaimana masyarakat Maluku di Negeri Belanda sendiri memahaminya, maka pada tahun 1983 IMW bersama Universitas Leiden mengerahkan seorang antropolog Amerika untuk mempelajari masalah itu selama dua tahun di Negeri Belanda. Dieter Bartels yang terpilih itu sesungguhnya bukan orang baru bagi masyarakat Maluku. Ia telah menghasilkan sebuah disertasi antropologi mengenai institusi "pela" di Maluku yang sudah ada berabad-abad lamanya. Bartels dengan kacamata sinkritismenya menyimpulkan bahwa di belakang semua upacara dari institusi pela tersebut adalah apa yang dia namakan "agama nunusaku" yaitu suatu mitos mengenai suatu asal-asal yang sama dari semua orang Maluku Tengah (orang Ambon) di Gunung Nunusaku di Seram Barat. Gunung misterius yang tidak pernah nampak itu dikatakan sebagai asal-usul yang tempat terciptanya manusia. Dari sana manusia Ambon menyebar ke berbagai pulau melalui tiga buah aliran sungai (sungai-sungai Tala, Eti, dan Sopalewa). Daerah asal itu dilambangkan juga sebagai pohon beringin, atau ada juga yang mengatakan bahwa bentuknya seperti kulit mutiara raksasa yang terbalik letaknya. Karena

dalam setiap upacara pela mitos asal-usul itu biasa diceritakan, maka tidak mengherankan, demikian Bartels, bahwa bisa terdapat pela antara desa-desa yang berlainan agamanya (Islam dan Kristen). Ini disebabkan di setiap orang Ambon merasa berasal dari satu tempat yang sama.<sup>25</sup>

Dalam mempelajari integrasi orang Maluku di Negeri Belanda Bartels menggunakan kaca mata sinkritisme pula tetapi tidak medasarkan pada institusi pela karena orang Maluku di Belanda tidak hanya berasal dari Kepulauan Ambon. Ia sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan harus dibuat pada generasi pertama yang datang pada tahun 1951 dan generasi kedua dan ketiga yang kini (1980-an) telah dewasa dan telah dapat mengambil jalan sendiri. Tekanannya adalah pada generasi ketiga, yaitu mereka yang lahir di Negeri Belanda dan memainkan peranan utama dalam peristiwa-peristiwa di tahun 1970-an itu. Sebagai antropolog ia melihat bahwa permasalahan pada generasi itu adalah sosialisasi dalam keluarga dan sosialisasi dalam masyarakat Belanda. Sosialisasi dalam keluarga tidak berjalan mulus karena orang tua (generasi pertama dan generasi kedua) ingin mempertahankan identitas dan budaya Maluku, namun mereka sendiri tidak banyak mengetahui mengenai hal-hal itu karena dibesarkan dalam tangsi-tangsi di Hindia Belanda. Pengetahuan mereka tentang adat dan budaya Maluku hanya sepotong-potong, tidak jelas. Ini menyebabkan generasi ketiga tidak puas dengan keterangan dan keadaan mereka sebagai orang Ambon. Kesenjangan antargenerasi itu juga menyebabkan banyak pemuda kehilangan kepercayaan kepada pimpinan mereka seperti Manusama dan Badan Persatuan. Sebaliknya sosialisasi dalam masyarakat Belanda terjadi cukup lancar karena generasi ini mendapat pendidikan yang luas, bahkan banyak yang telah mendapat gelar serjana dari berbagai universitas di Negeri Belanda. Generasi ini, seperti generasi-generasi sebelumnya, menolak "asimilasi" sebagai jalan keluar. Bagi mereka "asimilasi" berarti kehilangan identitas sebagai orang Maluku, tetapi integrasi juga terbatas, yaitu integrasi fungsional (pekerjaan, sekolah, kawin campuran) dan integrasi kognitif

(pengetahuan barat yang diperoleh di sekolah-sekolah, berpikir rasional dalam masyarakat diperoleh di sekolah-sekolah, berpikir rasional dalam masyarakat luas). Namun demikian integrasi emosional dengan nasib angsa Belanda tidak terjadi, bahkan mungkin juga tidak akan terjadi, karena itu Bartels mengajukan saran-saran kepada Pemerintah Belanda agar kebijaksanaan yang ditempuh adalah meningkatkan kesadaran budaya etnik Maluku dan pada saat yang sama memperlakukan prinsip persamaan hak bagi orang Maluku. Dengan demikian generasi-generasi berikutnya akan tumbuh dengan kesadaran etnik yang tepat, bukan versi kamp militernya, serta persamaan hak dalam masyarakat Belanda. Hal ini disebabkan terutama karena generasi ketiga sudah sangat meragukan cita-cita atau ideologi generasi pertama yaitu *ijdelijk verblijf* dan RMS. Mereka tidak memiliki keinginan yang kuat untuk kembali ke Maluku dan juga tidak lagi menginginkan adanya RMS. Kehadiran di Negeri Belanda bagi mereka adalah suatu kenyataan, dan hal itu mereka teruskan pada anak-anak mereka (generasi keempat). Pentingnya pengembangan budaya etnik adalah untuk mengatasi keraguan yang ada di sementara generasi ketiga bahwa tanpa budaya etnik itu mereka sekedar akan berubah dari "Belanda Hitam" (seperti generasi pertama di Hindia Belanda) menjadi "Maluku Putih" di Negeri Belanda. Keadaan seperti itu, dari segi ilmiah, memang tidak baik karena akan menghasilkan anomie, demikian Dieter Bartels.<sup>2 6</sup>

Kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas pada dasarnya mengandung kebenaran. Hasil penelitian Dr. R.Z. Leirissa yang selama sebulan berada di Negeri Belanda pada tahun 1991, sedikit banyaknya menggarisbawahi kesimpulan tanpa harus menerima teori-teori sinkritisme budayanya. Generasi pertama (tentara dan isteri mereka) serta generasi kedua (anak-anak yang lahir di Indonesia) memang memiliki peran yang terbatas dalam masyarakat. Mereka dilatih dan diatur sebagai tentara, militer, karena itu hanya peran sebagai militer yang tertanam dalam sistem kepribadian mereka. Ketika diangkut ke Negeri Belanda, mereka pun tetap berada dalam lingkungan asrama, tidak jauh

berbeda dengan asrama-asrama KNIL di Hindia Belanda sebelumnya. Selama di Negeri Belanda mereka tidak diberi peran lain, kecuali sebagai pekerja dalam membantu para petani Belanda, tetapi generasi ketiga mendapat pengalaman lain. Mereka bergaul rapat dengan masyarakat Belanda, sekolah di sekolah-sekolah Belanda, berbicara bahasa Belanda, berbicara bahasa Belanda dengan sangat fasih, bekerja di berbagai tempat dan kantor Belanda, bahkan sering menikah dengan gadis-gadis Belanda. Mereka telah mengalami diferensiasi peran, bukan saja sebagai anggota kamp atau pemukim di kota-kota kecil, tetapi berbagai peran dalam masyarakat Belanda. Dengan demikian mereka telah terintegrasi (sekalipun mungkin saja integrasi fungsional dan integrasi kognitif saja, belum integrasi emosional-tetapi aspek ini memerlukan penelitian lebih lanjut). Inilah sebabnya bagi mereka. Negeri Belanda adalah tempat tinggal yang tetap, bukan sekedar *tijdelijk verblijf* seperti anggapan generasi pertama dan kedua. Sekalipun demikian mereka masih tetap mempersoalkan asal-usul mereka, ethnitas mereka. Karena betapa pun mereka berbeda dengan anggota masyarakat Belanda pada umumnya. Seperti terbukti dari fisik, warna kulit, dan lain-lain (kondisi psikologis).<sup>27</sup>

Agaknya, pada waktunya soal "integrasi emosional" itu pun akan terjadi. Ini masalah partisipasi dalam lembaga-lembaga nasional Belanda, seperti dalam paratai politik, kantor-kantor pemerintah, dan dinas-dinas ketentaraan. Dalam pandangan generasi pertama dan kedua (sebagian), partisipasi semacam itu memang tidak dianjurkan perancangan mengenai *tijdelijk verblijf* tersebut di atas. Bagi mereka partisipasi pada taraf nasional, bahkan lokal sekalipun, tidak perlu karena mereka pasti akan meninggalkan Negeri Belanda kembali ke Maluku. Dalam konteks RMS, bagi mereka, terdapat kesempatan yang luas untuk partisipasi semacam itu.

Namun demikian, generasi ketiga sudah mulai menerobos tembok ideologis itu dan berpartisipasi secara lebih luas dalam masyarakat Belanda. Memang pada taraf politik hal itu masih sangat terbatas. Justru partisipasi secara politiklah yang memungkinkan diatasinya hambatan-hambatan bagi "integrasi emosional" tersebut. Suatu prototipe bagi perkembangan di masa depan, kalau boleh dilihat begitu, adalah pengalaman John Lilipali. Ia adalah seorang anggota generasi kedua yang telah mengalami tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan akibat tindakan-tindakan kekerasan pertengahan 1970-an itu. Ia tidak dapat menyetujui tindakan-tindakan itu sekalipun ia dapat memahami mengapa hal-hal itu dapat terjadi di kalangan segenerasinya. Ia nampaknya memilih kesadaran bahwa integrasi penuh adalah jalan keluar yang terbaik. Selain beristerikan seorang Belanda, ia juga terjun dalam bidang politik. Dalam hal ini *Partij Van den Arbeid* pula yang menjadi pelopor. John Lilipali diterima sebagai anggota, dan dalam pemilihan umum tahun 1986 ia dicalonkan sebagai anggota parlemen oleh partainya (*Partij Van den Arbeid*) sebagai wakil dari Propinsi Zeeland dan ternyata terpilih. Sampai sekarang ia masih mewakili propinsi itu dalam Parlemen Belanda (*Tweede Kamer, Staten Generaal*).

### **5.5 Semangat Baru**

Tindakan-tindakan kekerasan pada pertengahan 1970an merupakan tindakan orang-orang dari generasi kedua dan ketiga yang putus asa. Keputusan itu sesungguhnya melambangkan pula kebangkurtan dari ideologi *tijdelijk verblijf* dan RMS di kalangan orang Maluku di Negeri Belanda. Kekerasan semacam itu tidak akan berulang kalau proses integrasi yang sangat didambakan generasi ketiga tersebut di atas dapat terlaksana, kalau perlu dengan "integrasi emosional" pula, karena itu yang lebih penting dikemukakan adalah kecenderungan-kecenderungan yang memungkinkan terjadinya integrasi tersebut di masa depan. Kalau "integrasi emosional" memang bergantung pada banyak faktor di luar masyarakat Maluku seperti

hambatan-hambatan yang terdapat dalam masyarakat Belanda sendiri.<sup>28</sup> maka dalam masyarakat Maluku di Negeri Belanda sendiri terdapat faktor-faktor yang mendorong ke arah integrasi itu. Faktor-faktor itu di sini disebut secara umum dan termanifestasi sebagai "Revolusi Kebudayaan" yang berlangsung sejak tahun-tahun 1970an dan kini masih terus berlangsung sebagai "Semangat Baru".

Salah satu manifestasi dari "Semangat Baru" ini adalah kegiatan dari *Stichting* (Yayasan)Tjengke" yang kini dipimpin oleh sejumlah pemuda dan mahasiswa generasi ketiga dengan pusatnya di Amsterdam Yayasan ini mengeluarkan sebuah majalah dengan nama *Tjengke* pula pada tahun 1978 (terbit setiap bulan sampai tahun 1987) untuk menyuarakan semangat baru itu. Pada tahun 1990 yayasan ini menyelenggarakan serangkaian ceramah ilmiah dengan mengundang berbagai pakar dari manca negara. Pertama-tama muncul tiga orang pakar pada bulan April 1990, yaitu Dr. Dieter Bartels (antropolog), Dr. GJ. Knaap (sejarawan Belanda), dan Dr. R. Chauvel (sejarawan dari Australia) yang mengemukakan hasil penelitian mereka dalam rangka "Semangat Baru" atau *Nieuwe Tijden Nieuwe Helden* (Zaman Berganti Pahlawan Berganti). Pada dasarnya dikemukakan bahwa budaya Maluku berubah dengan perubahan zaman. Rangkaian ceramah kedua (November 1990) ditampilkan Dr. Jim Collins (*linguist dari University of Hawaii*) yang ahli bahasa-bahasa Maluku itu, serta Dr. Matthew Spriggs arkeolog dari *Australian National University of Canberra*, yang pernah mempelajari tembikar di Maluku. Keduanya juga menampilkan kenyataan perubahan budaya yang terjadi dalam sejarah Maluku. Terakhir (April 1991) tampil Dr. RZ. Leirissa dan Drs. John Pattiselano dari Universitas Pattimura yang ahli dalam Ilmu Budaya Dasar. Di sini pun tekanan diberikan pada perubahan kultural tersebut.

Menurut penelitian Dieter Bartels tersebut di atas<sup>29</sup> Yayasan Tjengke tersebut hanyalah salah satu wadah dari kelompok intelektual Maluku muda yang termasuk *avant garde* (pelopor dalam budaya). Selain media mereka yang juga ber-

nama *Tjengke* itu, terdapat kelompok-kelompok lain yang juga menggunakan media cetak sebagai alat komunikasi. Suatu organisasi yang menamakan dirinya Pattimura dan beraliran Marxis menerbitkan *majalah Pattimura*. Kemudian ada pula *Kora-kora* yang membawa berita-berita dari Indonesia. Program *Suara Maluku* dari Radio Helversum juga bertujuan mengembangkan budaya Maluku, tetapi bersama majalah *Marinjo* saluran itu disponsori oleh IWM, karena itu sering dianggap sebagai corong pemerintah.

Bahwa Amsterdam menjadi pusat *avant garde* Maluku tidak mengherankan karena suasana budaya *avant garde* kota itu serta banyaknya pendatang asing yang mewakili keanekaragaman budaya. Selain itu terdapat pula kelompok lain, yaitu para pekerja sosial lulusan akademi-akademi Pekerjaan Sosial di Belanda. Selain mencoba memberantas berbagai penyakit sosial seperti narkotik, pengangguran, dan buta huruf, mereka pun mencoba membuka tabir rahasia budaya Maluku. Ada pula kelompok-kelompok studi yang dengan rajin mempelajari berbagai hasil penelitian mengenai budaya Maluku baik yang berasal dari masa Hindia Belanda maupun dari masa sekarang.

Penelitian ilmiah mengenai budaya Maluku kini dipusatkan di Museum Maluku (*Moluksche Museum*) yang dibangun di Utrecht oleh IWM. Ketua dan wakil ketuanya adalah sejarawan-sejarawan (Drs. Henk Smeets dan Drs. Wim Manuhutu . Manuhutu adalah lulusan Universitas Utrecht yang menulis disertasi mengenai perang kolonial di Seram. Selain itu ada pula sejarawan lain yakni Drs. Habiboe, yang kini sedang menyiapkan disertasinya mengenai Maluku dalam abad ke-19. Salah satu tulisan yang dikeluarkan kelompok sejarawan ini, seperti telah disinggung di atas adalah hasil penelitian mereka mengenai kedatangan orang Maluku pada tahun 1951.<sup>30</sup> Dalam gedung yang sama pula terdapat sejumlah *linguist* dengan pimpinan Dr. Bert Tahitu, seorang lulusan Universitas Leiden yang mempelajari "Melaju Sini" atau bahasa Melayu yang digunakan masyarakat Maluku di Negeri Belanda. Tujuan mereka adalah

menerbitkan berbagai buku pelajaran bahasa Melayu untuk kepentingan sekolah-sekolah di Negeri Belanda yang menampung orang Maluku. Dari berbagai penerbitan mereka nampak jelas bahwa ada upaya untuk mengikuti perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Ini disebabkan sifat bahasa Melayu Sini terlalu terbatas pada kehidupan tangsi yang tidak karuan.<sup>31</sup>

Kemajuan-kemajuan lain tercapai dalam bidang seni. Seni tari umpamanya cukup maju, baik tradisional maupun kontemporer. Seni tari tradisional dipelopori oleh Willy Nanlohy yang mencoba antara lain mengaktualkan kembali tari perang Maluku (cakalele) bagi anggota-anggota generasi ketiga. Seni tari modern dipelopori oleh Yvon Tomaso dengan sekolah tari jazznya (*Jazzdance School Yvon Tomaso*). Bahwa seni patung muncul di kalangan orang Kei-Aru tidak terlalu mengherankan, mengingat perkembangan yang terdapat di kepulauan itu sejak dahulu kala. Pelopor dalam bidang seni ini adalah Fanoebi (asal Tanimbar) yang berdiam di Cijkk (Provinsi Brabant Utara-Nord Brabant) yang berspesialisasi dengan perunggu. Dalam seni musik tentu saja tidak kurang contoh. Daniel Sahuleka dan Julya Loko terkenal sampai di luar Negeri Belanda. Suatu group penyanyi yang juga sangat terkenal di Negeri Belanda adalah "Massada" yang kini telah bubar, kemudian juga terdapat "Moloccan Sound", suatu band yang juga telah banyak membuat nama di berbagai kota di Belanda.

Tidak kurang penting adalah kesusasteraan. Dari bidang ini yang paling berkembang adalah seni puisi. Abe Sahetapy yang ikut dalam pembajakan kereta api pada tahun 1975 di Wijster itu, telah menerbitkan buku kumpulan puisinya pada tahun 1985. Kemudian nama-nama lain yang menonjol adalah Frankie Berhitsu, Rachel Haurissa, Anis Sihasale, Brigitte Parinusa, dan Tania Sihasale.<sup>32</sup>

Bentuk novel belum banyak menapat peminat. Frans Lopulalan dengan novel yang diterbitkan tahun 1985 dengan judul, *Onder de Sneeuw Een Indiche Graf* (Kuburan Melayu yang Tertimbun Salju), mengambil cerita tentang pengalaman-

nya ketika masih hidup dalam kamp. Betapa dominannya keluarga dalam mengasuh anak sangat jelas ditonjolkan dalam buku ini. Ideologi *tijdelijk verblijf* itu diilustrasikan dengan sangat baik melalui sebuah dialog yang sudah sering dikutip, "Nak, kalau ditanya kau berasal dari mana, jangan sekali-kali menjawab, dari Woerden, tetapi dari Porto di Saparua" (*Jongen, als ze je vragen je vandaan komkt, zeg daan nooit dat je uit Woerden komt, maar uit Porto op Saparua*".)

Pada dasarnya budaya baru ini, "samangat baru" ini, adalah upaya mengaktualkan budaya etnik Maluku dalam konteks Barat/Belanda. Bahasa Melayu Sini diberi tata bahasa (gramatika) modern, ungkapan tari tradisional mengikuti pola ritme dan gerak tari modern, lagu-lagu tradisional diungkapkan dengan beat modern seperti regge, jazz, dan lain-lain. Inilah upaya generasi ketiga memberi makna pada kehadirannya di Negeri Belanda. Seluruhnya bertentangan sama sekali dengan alam pikiran dan ideologi generasi pertama yang berintikan *tijdelijk verblijf* dan RMS itu. Mereka ingin menemukan jati diri mereka sebagai orang Maluku di Negeri Belanda, bukan sebagai orang asing, tetapi warga Beanda dengan identitas Maluku. Bagi mereka, seperti diungkapkan Frans Lopulalan, budaya generasi pertama telah mati dan bahkan kuburannya telah tertimbun salju, tidak jelas lagi bentuknya. Kalau dipikirkan bahwa generasi ketiga ini pula yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat Maluku di Negeri Belanda di masa-masa kemudian, sudah bisa diperkirakan arah gejala yang akan mereka tempuh. Pemikiran mereka itu pun, seperti dibuktikan oleh Dr. Dieter Bartels, diteruskan dengan konsekuensi kepada anak-anak mereka (generasi keempat) yang seperti mereka juga lahir di Negeri Belanda.

## CATATAN

- 1) J.A.A. Van Doorn & W.J. Hendrix, *Het Nederlands Indonesisch Conflict. Ontsporing Van Geweld*. Bataavshe Leeuw, 1985, hlm. 201-217
- 2) P.M.H. Groen, *Marsroutes en Dwaalsporen, He Nederlands Militair Strategisch Beleid in Indonesie, 1945-1950*. S Gravenhade SDU Uitgeverij 1991, hlm. 51-75.
- 3) W. Manuhutu & H. Smeet (eds), *Tijdelijk Verblijf. De opvang Van Molukkers in Nederlands, 1951*, Bataavshe Leew 1991. hlm. 13
- 4) D. Bosscher & B. Waaldijk, *Ambon Eer en schuld. Politiek en Pressie Rond de Republiek Zuid-Molukken*, Weesp Van Holkema & Warendorf 1985, hlm. 61-106.
- 5) *Ibid.* hlm 107-170.
- 6) *Ibid.* hlm 110-116.
- 7) *Ibid.* hlm 119
- 8) *Ibid.* hlm 123
- 9) *Ibid.* hlm 135-137, 141, 142
- 10) *Ibid.* hlm 131-133
- 11) *Ibid. passim*

- 12) *Ibid.* hlm 162.
- 13) Lihat catatan Nomer 23 (Manuhutu & Smeets)
- 14) Manuhutu & Smeets, *op cit.* hlm. 20, 21.
- 15) *Ibid.* hlm 24, 25
- 16) Daftar kamp-kamp ini terdapat dalam Manuhutu & Smeets, *Ibid* hlm 62, 63.
- 17) Manuhutu & Smeets, *Ibid.* hlm 40--70
- 18) *Ibid.* hlm 27
- 19) Dewan Redaksi terdiri atas Dr. Bert Tahitu, Kitty Luhulima dan Hans Straver (lay out buku) Buku-buku itu diterbitkan oleh Sleunpunt Educatic Molukkers.
- 20) Dieter Bartels, *Moluccans ini Exile. A Truggle for Ethnic Survival.* Publication No. 32. Center for the study of Social Conflicts, Faculty of Social Sciences. University of Lenden 1989, hlm 17, 18.
- 21) Bung Penonton, *De Zuidmolukse Republiek.* Amstram Buytend & Schipperheyn, 1977.
- 22) Selain buku Dieter Bartels tsh. dalam cacatan no. 20 terdapat pula studi dari Alex Smid & Janny de Graaf. *Insurgent Terrorism and the Western News Media.* Leiden. COMT 1980. Suatu buku bercorak populer adalah dari Ralph Barker, *Not Here, But in Another Place A Treu Story of Captors and Hostages,* New York St. Martin s Press 1980
- 23) Bosscher & Waaldjijk, *op.cit.* hlm 233
- 24) Dieter Barteles, *op cit.* hlm. 17
- 25) Dieter Bartels, *Guarding the Invisible Mountain. Intervillage Alliances, Religius Syncretism and Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas.* Ithaca Cornell University Press, 1977.
- 26) Dieter Bartels, *Moluccans ini Exile, op cit.*
- 27) Kunjungan ke Ngeri Belanda atas undangan dari Yayasan

(Stichting) "Tjengke" pada bulan April/Mei 1991. Selain memberi ceramah dan berbincang-bincang, juga diadakan kunjungan-kunjungan ke bekas kamp-kamp Maluku dari tahun-tahun 1950an dan 1960an. Yayasan tersebut telah mengeluarkan sebuah buku dengan foto-foto yang menarik mengenai kamp Lunetten di Vugt yang direncanakan sebagiannya akan dipertahankan sebagai monumen sejarah orang Maluku di Negeri Belanda (*Lunetten. Muluks Dorp in Nederland*, 1986).

- 28) Mengenai faktor-faktor hambatan itu lihat Dieter Bartels, *Moluccans in Exile*, *op cit.* hlm 475 -- 485.
- 29) Dieter Bartels, *op. cit.* hlm 276 – 278
- 30) Manuhutu & Smeets, *loc cit.*
- 31) Lihat juga catatan no. 19 Judul buku tentang tata bahasa adalah '*Atur bahasa/Taal in Orde*' (Pusat Edukasi Maluku, Utrecht, 1990) dan mengenai daftar kata '*Daftar kata/Woordelinjst*' (Pusat Edukasi Maluku, Utrecht, 1990).
- 32) Dieter Bartels, *Moluccans in Exile*, *op. cit.* hlm. 293.

## BIBLIOGRAFI

Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press 1985.

Anak Agung Gde Agung *Twenty Years Indonesias Foreign policy 1945 – 1965*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press 1990.

Audry R. Kahim. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan* (terjemahan). Jakarta : Grafiti Press 1990.

Ben Van Kaam. *Ambon Door de Eenwen*. Baarn : Anthos Voek. 1977.

Dieter Barsels. *Moluccans in Eile A Struggle For Ethnic Survival*. Publication No. 32, Center For the Study of Social Conflicts. Faculty of Socieal Siences, University of Leiden 1989.

Dooke Bosscher dan Berteks Waaldrjk. *Ambon : Eer en Schuld Politiek en Pressie Rond de Republiek Zuid Molukken*. Weeps : Van Holkema dan Warendoprpf 1985.

Groen .P.M.H. *Marsrouten en Dwaalsporen. Het Nederlands Militair Strategish Beleid in Indonesie, 1945–1950*, s-Gravenhage : ADU Uitgeverij 1991.

Hatipeuw Frans. *Dr. Johannes Leimena hary, S.H. Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta : IDSN 1982/1983.

Leirissa R.Z. *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta : Lembaga Sejarah FSUI 1975.

Leirissa R.Z. *Sejarah Sosial di Daerah Maluku*. Jakarta : IDSN 1983/1984.

Leirissa R.Z. *Ir. Martinus Patuhena. Karya dan Pengabdian*. Jakarta : IDSN 1985.

Nanulaita I.O. *Johannes Latuharhary, S.H. Hasil Karya dan Pengabdian*. Jakarta : IDSN 1982/1993.

Richard Ohauvel. *Nationalist, Soldiers and Separatist. The Ambonese Islands From Colonialism to Revolt 1880–1950*. Leiden : KITLV Press 1990.

Leiden : KITLV Press 1990.

Siwabessy Fr. G.A. *Upuleru Memoar Dr. G.A. Siwabessy*. Jakarta : Gunung Agung 1879.

Soe Hok Gie. *Kisah Penumpasan "RMS"* (Gerakan Operasi Militer). Jakarta : Mega Bookstore dan Pusdjarah ABRI tanpa tahun.

Suhadi : *Ignatius Slamet Rijadi*, Jakarta : P.T. INALTU, 1976.

Yusuf. A. Puar. *Peristiwa Republik Maluku Selatan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1956.

## Lampiran 1

### LAPORAN POLITIK KEPALA DAERAH MALUKU SELATAN PERIODE 16-31 DESEMBER 1948 OLEH AM. PELLAU PESSY, 6 JANUARI 1949.

(Laporan Departemen Seberang Laut Belanda)

De verkiezingen die op 16 December plaats vonden hadden een buitengewoon ordelijk verloop. Noch in de stad noch in de negorijen op Ambon de den zich incidenten voor. Kleine onaangenaamheden ontstonden in negorijen met een overwegend analfabetische bevolking tussen de personen die zich aanboden behulpzaam te zijn bij de invulling der stembiljetten.

Klachten over gebrek aan geheimhouding bij stemming in de negorijen verliezen aan betekenis indien men bedenkt dat meestentijds niet de minste prijs op geheimhouding gesteld wordt, een verschijnsel dat zich ook voordoet bij verkiezingen van sanirileden, kepala soa's en regenten. Enigszins gold dit bezwaar voor de Boetonnezen, een bevolkingsgroep die zonder enige kennis van kandidaten of doestellingen aan zware druk van buiten is blootgesteld geweest. In de zuiver Boetonnese kampongs waren dan ook alle biljetten eensluidend ingevuld.

De uitslag als geheel is voor wat stad en lande van Amboina betreft een grote overwinning van de Partai Indonesia Merdeka geworden. Deze partij heeft ook de zwaarste financiële en persoonlijke offers voor dit resultaat over gehad. De regentenbond wist alleen haar kandidaat D. J. Gaspersz verkozen te krijgen. De groep intellectuelen (Gerakan demokrat) leed een geweldige nederlaag; het is wel gebleken dat haar voorstelling als zou de volking geneigd zijn intellectuelen te kiezen, zonder dat deze nauw contact met het kiezersvolk hebben gezocht en intensief propaganda voor hen gemaakt is, niet opgaat. De tot op heden bekend geworden verkiezingsuitslagen zijn als volgt :

## Stad Amboina

Aantal stemgerechtigden :	11 582
Aantal uitgebrachte stemmen:	4 032

### Aantal stemman

Hamid bin Hamid (PIM)	1 606	(verkozen)
W. Reawaru (PIM)	1 505	
F.H. Pieter	1 477	
Mevrouw J. Sahusilawane		
Tommasoa	1 240	

## Amboina (Onderafdeling)

Aantal stemgerechtigden :	21 969
Aantal uitgebrachte stemmen :	15 684

E. U. Pupella (PIM)	8 693	(verkozen)
S. Tjokro (PIM)	5 282	(verkozen)
D.J. Gaspersz	4 825	(verkozen)

### Aantal stemmen

Hamid bin Hamid (PIM)	4 636	(verkozen)
J.B. Sitanala (PIM)	4 542	
W. Reawaru (PIM)	4 528	

## Saparoea

A. Wairisal	6 969	(verkozen)
H.A. Risakotta	5 437	(verkozen)
W. A. Lokollo	3 990	(verkozen)
Said Bachmid (PIM)	3 502	(verkozen)
A.B. Latuconsina	2 988	

West-Ceram enz.

## Lampiran 2

### LAPORAN POLITIK KEPALA DAERAH MALUKU SELATAN PERIODE 1--15 ZOMEI 1949 OLEH A.M. PELLAU PESSY, ZONEI 1949 (Arsip Departemen Seberang Laut Belanda)

D. Staatkundige  
Reconstructie  
(Daerahvorming)

Op 12 Mei werd de openingszitting van de nieuwe Zuid-Molukken-Raad met enige plechtigheid gehouden. Er was grote belangstelling op de publieke tribune, ook van ambtelijke en particuliere instanties; vele bloemstukken gaven de zaal een feestelijk aanzien.

Behalve door de Voorzitter van het college weden korte toespraken gehouden o.m. door het lid Soulisa uit naam van de nieuw gevormde fractie Persatuan en de Heer Pupella namens de fractie Indonesia (resp. 12 en 14 leden tellende). De fractie Persatuan, vni. gevormd door raadsleden van de Zuid-eilanden stelt zich ten doel de steeds bestaande klove tussen de bewoners dier eilanden en de eigenlijke Ambonezen te overbruggen en uiteindelijk tot een eenheidsfront te geraken.

In deze fractie zitten reeds enige leden van noordelijke gebieden o.a. van Ceram.

Hoewel de constructie tot de voorgenomen samenwerking wat vreemd aandoet, schijnt de bedoeling welgemeend te zijn. Niettemin werden in het college van gecommitteerden gekozen de heren Pupella, Wairisal, Hamid en Manuhutu (thans hoofd plaatselijk bestuur van Geser, Oost-Ceram), alle van fractie Indonesia afkomstig van Ambon en Saparua.

Het valt te voorzien dat het concentreren van alle zetels van gecommitteerden in deze ene fractie kwaad bloed zal zetten in de boezem van de fractie Persatuan; stemmen in

die richting werden reeds gehoord : de leden der Zuid-eilanden voelen zich gegriefd door deze kortzichtige politiek der Ambonse fractie. Getracht zal worden in deze samenstelling een wijziging te doen aanbrengen, middels vrijwillige terugtrekking van een der gecommiteerden, opdat op deze wijze de Zuid-eilanden mede vertegenwoordigd zullen zijn.

In de lopende zitting welke vermoedelijk tegen 30 dezer beëindigd zal zijn, wordt vnl. de ontwerp-begroting 1949 behandeld.

De voorbereidingen voor de verkiezing van parlementsleden zijn thans in een gevorderd stadium. De candidaatstelling zal echter niet eerder dan in Juli kunnen plaats hebben.

De moesson t/m Augustus is jammer genoeg zeer ongunstig, in tegenstelling met de verkiezingen voor de Z.M.R. die vorig jaar in het goede jaargetijde konden plaatsvinden.

Geen bijzonderheden.

E. Werking Gezagsapparaat  
Bestuurs, politie mil.  
macht.

**LAPORAN PJ. PERWAKILAN KERAJAAN DI  
MAKASAR (DR L.B. VAN STRATEN), 13 MEI 1950  
(Arsip Departemen Seberang Laut Belanda)**

D. Staatskundige  
reconstructie  
(Daerahvorming)

Hoewel gestreefd werd naar een vlotte afhandeling van zaken – mede met het oog op de voorbereidingen voor de parlementsverkiezing – kon deze zitting van de Zuid-Molukken-Raad pas op 2 Juni beëindigd worden.

Na de verkiezing van de in het vorig verslag genoemde leden van het college van gecommitteerden, werden inderdaad ernstige bezwaren bij den Voorzitter voorgebracht door leden van de fractie Persatuan. Gelukkig kon na enig overleg een schikking getroffen worden, waardoor de Heer Hamid zich vrijwillig uit het college terugtrok en vervangen werd door de Heer Norimarina, die ook reeds in het oude college zitting had, als plv. gecommitteerde.

Is dus de gang van zaken in dit politieke spel weinig elegant geweest, het resultaat is dan toch dat beide fracties thans in het dagelijks bestuur van de Zuid-Molukken-Raad vertegenwoordigd zijn, hetgeen niet anders dan bevorderlijk geweest is voor een goede sfeer in het verloop der verdere besprekingen. De Zitting werd dan ook in een uitstekende stemming van onderlinge waardering en goede kameraadschap beëindigd.

De fractie Indonesia nam een besluit van de strekking om de gewijzigde en aangevulde begroting 1949 goed te keuren, echter onder protest tegen de subsidievermindering van 6 tot 4½ miljoen. Een motie Pupella cs. van dezelfde strekking werd op 31 Mei aangenomen, waarvan de motivering luidt dat een subsidieverlaging als bedoeld niet gerechtvaardigd wordt geacht t.a.v. een nieuwe autonome gemeenschap, welke nimmer in de gelegenheid geweest is een autonoom bestaan met eigen geldmiddelen te leiden.

Op 24 Mei werd een motie Wairooy c.s. aangenomen waarin met kracht aangedrongen wordt op een snelle uitvoering van de op 1 Maartjl aangenomen motie Pupella c.s. Deze motie houdt in de instelling voor 1 Juli 1949 van lagere oneigenlijke Zelfbesturen onder voorzitterschap van Indonesische Hoofden plaatselijk bestuur.

Een op 28 Mei aangenomen motie Hentihu c.s. (voorgebracht door 18 leden) stelt het spelen van het Indonesia Raja na het "Wilhelmus" bij officiële gelegenheden verplichtend.

De overwegingen welke tot deze motie geleid hebben zijn:

1. het is een officieel ingesteld volkslied.
2. het heeft bij het publiek in de gehele Zuid-Molukken geleidelijk aan een gevestigde plaats ingenomen.
3. het spelen van het lied na het "Wilhelmus" wordt geacht symbolisch uiting te geven aan dexverbondenheid van beide volkeren door de in te stellen Unie Nederland-Indonesia.

**SURAT PERWAKILAN KERAJAAN BELANDA (LOVINK)  
PADA PEMERINTAH BELANDA 27 JUNI 1949  
(Arsip Departemen Luar Negeri belanda)**

1. In gevolge de aanvaarding van de Grondwet door het voorlopige vertegenwoordigend lichaam van Oost-Indonesie en de binnenkort verwachtbare aanvaarding door de voorlopige Senaat, wordt het vraagstuk van zelfbeschikking voor onderscheidene volksgemeenschappen, waarover artikel 5 van de Den Pasar-regeling handelt, acuut.

2. Slechts in de Minahasa is sprake van een krachtige beweging vooruittrekking uit Oost-Indonesie; op het Zuidelijk deel van de Molukken (Ambon) vindt dit separatisme weining weerklank, terwijl het in Timor nagenoeg ontbreekt.

3. In de Minahasa ontwikkelt zich de Twapro, welke aansluit op "Suriname status" voor het betrokken gebiedsdeel, tot een volksbeweging, waarvan de aanhang op een kleine 80.000 leden wordt geschat. Daarnaast ontwikkelt sedert kort het "Komitee Ketatanegaraan Minahasa" een activiteit, gericht op de vorming van de Negara Minahasa, gelijk ook blijkt uit de U bekende resolutie.

4. De Regering van Oost-Indonesie verzocht in haar in afschrift bij mailrapport overgelegde brief van 13 Mei aan de Indische regering haar afkeuring kenbaar te maken over de afscheidingsbewegingen. Op deze brief werd dezerzijds nog niet geantwoord, daar het noodzakelijk is deze kwestie als geheel te behandelen.

5. Ik had derhalve hedenmorgen een bespreking met van der Wal, Enthoven, de Waal en Koets, waarbij wij tot de navolgende gemeenschappelijke conclusie kwamen:

A. De "Suriname status" is voor de Minahasa ongewenst en onuitvoerbaar, terwijl ook een Negara Minahasa op grote praktische bezwaren, speciaal van financieel-economische aard,

stuit; financieel is de Minahasa *niet* bij machte de eigen huishouding te bekostigen; derhalve is ook deze oplossing evenmin gawenst.

B. Evenals andere volksgemeenschappen moeten wij echter het recht van de Minahasa waarborgen om zelf terzake op democratische wijze uitspraak te doen en ons bij de uitslag daarvan neerleggen.

C. Ofschoon theoretisch de regeling van de toepassing van het zelfbeschikkingsrecht voor geheel Indonesie ter Ronde Tafel Conferentie wellicht verkieselijk is, dient om praktische redenen de regeling voor Oost-Indonesie, in verband met de sub 1 vermelde omstandigheid, nu ter hand te worden genomen onder voorbehoud van de overeenstemming als bedoeld sub F.

D. Aangezien een algemeen plebisciet in alle 13 Daerachs van Oost-Indonesie tijdrovend, kostbaar en bovendien overbodig is, daar in de meeste generlei verlangen naar verandering van status aanwezig is, ware een volkstemming te beperken tot de gebieden, waar de wens daartoe bestaat.

E. Dezerzijds is gedacht aan de mogelijkheid tot het doen houden van een plebisciet, waar hetzij de daerahraden, hetzij een zeker percentage kiesgerechtigden van de bevolking de wens daartoe te kennen geeft.

F. Vermoedelijk is de Oostindonesische Regering, welke uiteraard sterk tegen elk separatisme is gekant, wel voor een dergelijke oplossing te vinden.

6. Daar een eventueel plebisciet in de Minahasa een antecedent is voor een volkstemming elders, zal in onderling overleg een regeling moeten worden ontworpen, welke een vrije uitspraak waarborgt. Het is natuurlijk twijfelachtig of alles zijn beslag kan krijgen voor de soevereiniteitsoverdracht, maar ten principale maakt dit geen verschil.

**LAPORAN PJ. PERWAKILAN KERAJAAN BELANDA  
(DR. L.B. VAN STRATEN), 15 MARET 1950  
(Arsip Kementerian Luar Negeri Belanda)**

3. Het kabinet-Tatengkeng bood op de dag van de sluiting van de zittingsperiode van het Voorlopig Vertegenwoordigend Lichaam van Oost-Indonesie, 20 februari jl. zijn ontslag aan. Op 21 februari kwam het nieuwe Parlement voor het eerst bijeen.

Het kabinet-Tatengkeng bleef na zijn aftreden voorlopig als demissionair kabinet aan.

4. De meeste nieuwe Parlementsleden – volgens een districtenstelsel en op basis van absolute meerderheid gekozen (63), aangevuld met 10 correctieve benoemingen – waren reeds een 14 dagen tevoren te Makassar gearriveerd, zodat er ruim tijd bestond om tot fractievorming te komen.

De eerste fractie die zich aandiende was de op basis van het federalisme opgerichte Fractie Nasional Progressief, bestaande uit 20–30 leden.

De op basis van de eenheid van Indonesie opgerichte fractie Kesatuan Nasional – bestaande uit 20–30 leden – is de unitaristische tegenvoeter van de Fractie Nasional Progressief.

De uit een 6-tal leden bestaande Fractie Indonesia – met als geestelijke vaders de Sultan van Sumbawa en H. Mochtar Luthfi – neemt de Islam als uitgangspunt en is een welkome unitaristische aanvulling van de fractie Kesatuan.

De Fractie Kerakjatan, met een 10-tal leden, is meer een daerah-fractie, nl. Zuid-Molukken, Flores, Timor en Sumbawa, en voelt zowel voor het federalisme als voor het unitarisme, al naar het uitkomt. Zij kan een te appreciëren steun, zowel voor de Fractie Nasional Progressief als voor de Fractie Kesatuan vormen, hoewel het merendeel harer leden meer voelt voor hulp aan de Fractie Nasional Progressief.

De laatst gevormde Fractie Socialis – met drie leden – spreekt zich over het federalisme of het unitarisme niet uit, maar is de N.I.T. als deelstaat zeker niet onwelwillend gezind.

7. Verzoeken spoedigst telegrafisch bericht of de Nederlandse Regering instemt met een behandeling als hierboven aangegeven. Met Van Maarseveen is terzake overleg gepleegd.

## Lampiran 6

### **LAPORAN PJ. PERWAKILAN KERAJAAN BELANDA DI MAKASAR (DR. L.B.VAN STRATEN), 13 Mei 1950 (Arsip Kementerian Luar Negeri Belanda)**

2. Op 22 April werd in het Parlement Oost-Indonesie een motie-Pupella c.s. ingediend.

Deze motie drong er bij de Regering op aan, dat het Kabinet-Ir. Diapari zou aftreden en vervangen worden door een alle groepen in het Oost-Indonesische Parlement omvattend nieuw kabinet.

De motie was ondertekend door de voormannen uit de Fracties Kesatuan, Kerakjatan en Indonesia, zodat de aan-neming ervan reeds bij voorbaat verzekerd was.

3. Het Kabinet-Diapari steunde op de Fractie Progressief, Kerakjatan en de dwergfractie Socialis, welke tezamen een kleine meerderheid in de volksvertegenwoordiging hadden.

Door het overlopen van de Fractie Kerakjatan naar het unitaristische kamp, was de val van het federalistische kabinet-Diapari onvermijdelijk.

4. Op 25 April d.a.v. vond de openbare parlementaire behandeling plaats. Vele leden van de uitgesproken federalistische fractie Progressief bleken afwezig. Men dacht het vermoedelijk veiliger absent te zijn, terwijl ook in Zuid-Celebes de verbindingen met Makassar in handen van de gerilja's waren, waardoor vele Zuid-Celebes federalisten er zelfs niet aan konden denken naar Makassar te komen.

5. De woordvoerders van de fracties Kesatuan, Kerakjatan en Indonesia verklaarden zich met de motie geheel akkoord.

In verband met de absentie van zo vele leden van de fractie Progressief, werd de motie met betrekking tot de uitgesproken wens, dat het nieuwe kabinet alle groepen van de volksvertegenwoordiging zou omvatten enigszins afgezwakt.

De woordvoerder van de fractie Progressief deelde mede dat met betrekking tot deze motie geen fractiestandpunt bestond.

zodat ieder fractielid vrij was in zijn stemuitbrenging. Het kwam er dus op neer, dat ieder aanwezig lid van de Fractie Progressief de raad gegeven werd voor de motie te stemmen.

6. Slechts een parlamentslid had de durf zich volledig tegen de motie te stellen. Het was de Heer Maweikere van de Twapro. Hij gaf onverbloemd te kennen, dat in dit parlement geen democratische vrijheid van meningsuiting meer bestond, wyl wapengeweld de boventoon voerde. De Minister-President, Ir. Diapari, deelde mede dat het huidige kabinet "met vreugde" de motie-Pupella begroette. Reeds aanstonds na de coup-Azis had het kabinet zijn mandaat aan de President van Oost-Indonesie ter beschikking gesteld, en slechts de weigering van de President om dit ontslag te aanvaarden, had het kabinet belet af te treden.

De motie-Pupella werd vervolgens aangenomen met 49 stemmen voor en een—, Oom Jan., Maweikere—tegen.

7. Nog dezelfde dag belastte President Sukawati de Heer Pupella met de vorming van een nieuw Kabinet.

De Heer Pupella is leider van de Fractie Kerakjatan. Hij is onderwijzer van origine en was op Ambon leider van een particuliere school. Tijdens de Japanse tijd was hij Resident van Ambon en heeft toen veel voor de bevolking kunnen doen.

Na de capitulatie heeft de Heer Pupella zijn onderwijzersbaan weder opgenomen, maar bleef in de politiek.

Hij is voorzitter van de Partai Indonesia Merdeka (PIM), de pro-Republikeinse (Djocja) politieke groepering op Ambon.

Lampiran 7

**SURAT KOMISARIS TIGGGI KERAJAAN BELANDA  
(HIRSCHFELD), 18 MEI 1950  
(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda)**

Excellentie,

De Nederlandse Regering acht zich verplicht de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesia deelgenoot te maken van de zorg, welke haar vervult met betrekking tot de ter Ronde Tafel Conferentie overeengekomen realisering van het zelfbeschikkingsrecht der volken van Indonesie.

De Nederlandse Regering voelt deze zorg zwaarder wegen in het aangezicht van de staatkundige ontwikkeling, welke zich in Indonesie voltrekt. Zij is er zich van bewust, dat deze staatkundige ontwikkeling een aangelegenheid is, welke in de eerste plaats de soevereine Staat van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie aangaat, zij is er echter van overtuigd bij de Regering van die Republiek begrip te zullen ontmoeten voor het verband tussen deze ontwikkeling en het door Nederland en Indonesie aanvaarde beginsel van het zelfbeschikkingsrecht.

Te dien aanzien moge de Nederlandse Regering wijzen op hetgeen — zoals Uwe Excellentie zich ongetwijfeld zal herinneren — na moeizame en langdurige onderhandelingen, waarbij uiteindelijk de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesie hare succesvolle bemiddeling heeft willen verlenen, in artikel 2 der Overgangsovereenkomst omtrent het zelfbeschikkingsrecht van de bevolkingen van daarvoor in aanmerking komende gebieden is overeengekomen.

Zij reliseert zich daarbij, dat de in dat artikel vervatte regeling uitgaat van een veronderstelde indeling van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie in deelstaten.

De Nederlandse Regering stelt er prijs op de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie — voor zoveel nodig — nadrukkelijk te verklaren, dat de uitslag van een eventueel plebisciet, hetwelk in het kader van toepassing van artikel 2 der Overgangsovereenkomst mocht worden gehouden — hoezeer

ook van eminent belang voor de betrokken bevolking - op zichzelf voor de Nederlandse Regering van minder primair interesse is dan de feitelijke mogelijkheid, omdat deze een onderdeel vormt van de ter Ronde Tafel Conferentie bereikte accoorden tussen Nederland en Indonesie.

Het zal Uwe Excellentie niet onbekend zijn, dat tijdens de behandeling van de Wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesie in de beide Kamers der Staten-Generaal bijzonderlijk de realisering van het zelfbeschikkingsrecht een aangelegenheid was, welke de Volksvertegenwoordiging in hoge mate heeft bezig gehouden.

Het resultaat van de aanvaarding der Wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesie door de beide Kamers der Staten-Generaal kon niet worden bereikt dan op de grondslag van een door de Volksvertegenwoordiging voorgesteld amendement, in het desbetreffend wetsontwerp neergelegd in artikel 2, welk wetsartikel luidt:

“Wij dragen zorg, dat, echter niet zonder voorafgaand overleg met de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie, hetzij bij de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesie, hetzij bij een ander orgaan der Verenigde Naties, die stappen worden gedaan, welke naar Ons inzicht bevorderlijk kunnen zijn aan een volledig tot zijn recht komen van het zelfbeschikkingsrecht, gelijk dat is bedoeld in artikel 2 der Overgangsovereenkomst, behorende bij de in artikel 1 dezer wet vermelde Mantelresolutie”.

Dit artikel brengt op ondubbelzinnige wijze de waarde, welke van Nederlansche zijde aan het beginsel van de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht wordt toegekend, tot uitdrukking. Het legt op de Nederlandse Regering een plicht, waaraan de Nederlandse Regering zich eens te mee niet mag onttrekken, nu deze plicht in harmonie is met de ter Ronde Tafel Conferentie getroffen accoorden. In het aangezicht van deze plicht vraagt de Nederlandse Regering zich met zorg of of en zoja, op welke wijze het beginsel van het zelfbeschikking-

srevht in een eenheidsstaat - gesteld dat de ontwikkeling daartoe leidt—voor verwezenlijking vatbaar zal zijn. Zij stelt zich voor de UNCI deelgenoot van deze zorg te maken en in verband daarmee een schrijven tot de UNCI te richten, waarvan het concept aan deze brief is toegevoegd. Alvorens tot verzending daarvan over te gaan, zou de Nederlandse Regering gaarne vernemen of dit schrijven Uwe Excellentie tot opmerkingen aanleiding geeft.

De Nederlandse Regering zoude het —met het oog op hetgeen in het vorenstaande is vervat—voorts en vooral op hoge prijs stellen indien Uwe Excellentie haar met een beschuwing omtrent de inzichten van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie met betrekking tot het zelfbeschikkingsrecht zou willen doen blijken.

Lampiran 8

**SURAT PEMERINTAH BELANDA PADA PERDANA  
MENTERI RI HATTA, 21 JUNI 1950  
(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda)**

Excellentie,

De Nederlandse Regering heeft kennis genomen van het schrijven van Uwe Excellentie van 6 Juni 1950 betreffende de verwezenlijking van het zelf-beschikkingsrecht in Indonesie, zoals dit bij de RTC is overeengekomen. De Nederlandse Regering verheugt zich erover, dat blijkens gemeld schrijven van Uwe Excellentie de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie de mening is toegedaan dat ook in een unitarisch Indonesie artikel 2 der overeenkomst betreffende de overgangsmaatregelen in principe verwezenlijkt zou kunnen worden. Zij zou gaarne over de mogelijke uitwerking van dit beginsel nader worden ingelicht.

In dit verband moge de Nederlandse Regering opmerken, dat inderdaad artikel 2 voormeld niet de strekking had dat Indonesie verplicht zou zijn de federalistische staatsvorm voor altijd te behouden. Wel echter lag het in de overeengekomen bedoeling, dat de soevereine staat Indonesie vooralsnog federalistisch zou opgebouwd zijn, en blijven. Hierover bestond ter Ronde Tafel Conferentie geen meningsverschil tussen de Nederlandse en Indonesische delegaties. Ook in de boezem van de Indonesische delegaties is dienaangaande van eenstemmigheid gebleken. De Nederlandse Regering moge daarvoor verwijzen naar het Communiqué der Inter-Indonesische Conferentie van 22 Juli 1949, waarin werd medegedeeld, dat overeengekomen was, dat de Republiek Indonesia Serikat o.m. zou gebaseerd zijn op de beginselen van democratie en federalisme. In de voorlopige Constitutie van de Verenigde Staten van Indonesie leest men dat ook dienovereenkomstig reeds in de preambule, dat de Indonesische staat een republikeins-federatieve structuur zal hebben. Uit tal van bepalingen en uit de gehele samenhang der voorlopige Constitutie vloeit verder voort, dat het bestaan

van de Indonesische staat is, welk element ook onder de definitieve constitutie zou behouden blijven.

In artikel 2 der Overgangsovereenkomst werd op die grondslag tussen Nederland en Indonesie overeengekomen, dat de indeling van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie in deelstaten uiteindelijk zou worden bepaald door de Constituanten in overeenstemming met de bepalingen van de voorlopige Constitutie van de RVSI en dat elke deelstaat in de gelegenheid zou worden gesteld de definitieve constitutie te aanvaarden. Deze bepaling is—zo meent de Nederlandse Regering—onverenigbaar met een ontbinding van het federalisme ten gunste van een unitarische staatsvorm voor de totstandkoming en aanvaarding van de definitieve constitutie.

Derhalve moet de Nederlandse Regering van oordeel blijven, dat een zodanige ontbinding onverenigbaar is met hetgeen te dezer zaak ter Ronde Tafel Conferentie is overeengekomen. De Nederlandse Regering ziet niet in, hoe het mogelijk is, na zodanige ontbinding het zelfbeschikkingsrecht in Indonesie te verwezenlijken overeenkomstig de letter van het bepaalde in meergenoemd artikel 2. Immers, door de bevolkingen van de gebieden, die daartoe volgens de in gemeld artikel voorgeschreven procedure worden aangewezen, zou een plebisciet onder toezicht van de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesie of een ander orgaan van de Verenigde Naties moeten worden gehouden over de vraag, of zij zich tot een afzonderlijke deelstaat zullen vormen. Daarna zou elke deelstaat in de gelegenheid worden gesteld de definitieve constitutie te aanvaarden. In geval de deelstaat deze niet aanvaardt zou, zou hij de bevoegdheid hebben te onderhandelen omtrent een speciale verhouding tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden. Aldus is onderscheidenlijk het interne en het externe zelfbeschikkingsrecht der bevolkingen in Indonesie ter Ronde Tafel Conferentie geregeld.

In het schrijven van Uwe Excellentie van 6 Juni 1950 wordt medegedeeld, dat een verandering van de federale staatsvorm tot een unitarische het ideaal verwezenlijkt van het overgrote deel van het Indonesische volk.

De Nederlandse Regering moge in dit verband opmerken, dat de regeling van het zelfbeschikkingsrecht juist is overeengekomen teneinde te voorkomen, dat de bevolkingen van bepaalde gebieden tegen haar wil zouden moeten berusten in datgene, wat de meerderheid van alle inwoners van Indonesie mocht wenssen.

Uit het hierboven tot nu toe gestelde moge Uwe Excellentie zijn gebleken dat de Nederlandse Regering de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie bezwaarlijk kan volgen in Hare, in Uw brief tot uiting gebrachte opvatting als zoude artikel 2 der Overgangsovereenkomst aldus behoren te worden uitgelegd, dat aan de bevolking van de aldaar genoemde gebieden, indien zij daartoe de wens te kennen geven, de gelegenheid wordt gegeven om middels een te houden plebisciet haar wens om in de Indonesische Staat als autonoom gebiedsdeel te worden opgenomen, kenbaar temaken. Veeleer toch is dan de betekenis dier bepaling op grond van de samenhang zoals deze in het eerste lid op de grondslag van een veronderstelde uiteindelijke indeling van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie in deelstaten, met betrekking tot het interne zelfbeschikkingsrecht is uitgewerkt en in het tweede lid ten aanzien van het externe zelfbeschikkingsrecht is vervolgd, een wijdere strekking toe te kennen, welke de Nederlandse Regering in het voorgaande mocht releveren.

Dit brengt ook mede, dat indien de federale staatsvorm mocht worden vervangen door een unitarische, ook al zoude deze niet zijn een staat met een sterk gecentraliseerde bewindvoering, doch ruimte laten voor een ver doorgevoerde decentralisatie in onderdelen met grote mate van autonomie, in deze laatste op zichzelf nog geen verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht zoals dit ter RTC is overeengekomen, is gelegen.

Slechts zoude dit tot op zekere hoogte het geval kunnen zijn indien de bevolking van een bepaald gebiedsdeel zelf de bevoegdheid zoude hebben om te verklaren, dat zij van zodanige eenheidsstaat een autonoom onderdeel wil uitmaken en wanneer voorts dit aldus gevormde autonome

onderdeel het externe zelfbeschikkingsrecht, bedoeld in het tweede lid van meergenoemd artikel 2 der Overgangsovereenkomst, zou toekomen. Daarenboven zou dan nog—zo meent de Nederlandse Regering — de aan het gevormde onderdeel toekomende autonomie op zichzelf van belangrijk gehalte moeten zijn.

Op grond van het vorenstaande moge de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie de bezorgdheid der Nederlandse Regering ten aanzien van de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht in de opvatting zoals zij daarvan hierboven heeft doen blijken, niet onderschatten. Zij zou gaarne zien dat Haar te dien aanzien door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie meerdere geruststelling werd gegeven, dan zij in het schrijven van Uwe Excellentie van 6 Juni 1950 heeft vermogen aan te treffen.

Zodanige meerdere geruststelling zou de Nederlandse Regering kunnen verlangen indien de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie Haar zou willen mededelen:

1. in welke mate zij bereid zou zijn belangrijke inhoud te geven aan de autonomie der onderdelen als waarop hierboven werd gedoeld en welke die inhoud zou zijn;

2. of aan zodanig autonoom onderdeel zou toekomen de bevoegdheid om de definitieve Constitutie van de Indonesische Staat al dan niet te aanvaarden en zo het deze niet zou aanvaarden, het recht tot realisering van het externe zelfbeschikkingsrecht gelijk bedoeld in het tweede lid van artikel 2 der Overgangsovereenkomst;

3. of zij bereid is gezamenlijk dan wel gelijktijdig met de Nederlandse Regering de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesie te verzoeken thans over te gaan tot het doen van haar aanbevelingen omtrent het aanwijzen door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie van gebieden door welke bevolkingen een plebisciet onder toezicht van de Commissie of een ander orgaan van de Verenigde Naties zal worden gehouden, gelijk bedoeld in het eerste lid van artikel 2 der Overgangsovereenkomst.

De Nederlandse Regering vertrouwt gaarne, dat Uwe Excellentie bereid zal zijn Hare informatie omtrent het standpunt van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie ten aanzien van vorenstaande vragen wel te willen bevorderen.

Zij tekent – naar Zij wel meent ten overvloede – daarbij aan dat de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie zich ervan overtuigd moge houden, dat de Nederlandse Regering geenszins begeert of zou kunnen of willen bevorderen dat van het in artikel 2, tweede lid, der Overgangsovereenkomst bedoelde externe zelfbeschikkingsrecht, door de bevolking van enig gebied van Indonesie ook de facto gebruik wordt gemaakt. Slechts begeert zij – naar Hare overtuigingen rechte – dat de mogelijkheid tot het tot gelding brengen ook van dit externe zelfbeschikkingsrecht geëerbiedigd zal blijven.

De Nederlandse Regering gevoelt tenslotte de behoefte nader in te gaan op hetgeen Uwe Excellentie in fine van Haar meergenoemde brief van 6 Juni 1950 heeft gesteld ten aanzien van de stap welke Zij bij de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesie heeft gemeend te moeten doen door deze door middel van een nota deelgenoot te maken van Haar zorg omtrent de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht.

Zij doet dit te gereder omdat bij de verwezenlijking van dit recht de Unci krachtens de Overeenkomst ter RTC niet kan worden voorbijgezien.

Zowel immers het bepaalde sub VI der Mantelresolutie als artikel 2 der Overgangsovereenkomst schakelen deze Commissie of een ander orgaan der Verenigde Naties in bij de Handhaving van het overeengekomen zelfbeschikkingsrecht. Laatstgenoemd artikel legt in de procedurale uitwerking van de verwezenlijking van dit recht op de Unci een zelfstandige taak in zoverre van Haar aanbevelingen dienen uit te gaan tot het houden van een plebisiet onder toezicht van dit orgaan, door de bevolking van enig, naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komend gebied van Indonesie. Waar het vraagstuk van het zelfbeschikkingsrecht ter RTC in het bijzonder in het geding is geweest ten aan-

zien van de Minahassa, Ambon (Zuid-Molukken), Timor en gebieden op Sumatra, meent de Nederlandse Regering dat de Uncibij het doen van aanbevelingen daarmee ongetwijfeld ook rekening zal willen houden.

De Nederlandse Regering, die van mening is, dat zij terecht de aandacht van de Unci op de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht heeft gevestigd—de taak welke deze Commissie ter RTC daarbij is toegedeeld in aanmerking genomen — is voorts van gevoelen, dat zij dit ook op een juist tijdstip heeft gedaan, omdat—gezien de staatkundige ontwikkelingen in Indonesie—het ogenblik waarop van de Unci aanbevelingen als bedoeld zouden mogen worden verwacht, niet meer veraf schijnt te zijn gelegen.

Het is daarom met leedwezen dat de Nederlandse Regering heeft moeten kennis nemen van de opvatting van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie als zoude in Nederlandse Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie als zoude in Nederlandse Regering—mede om wille van de door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie op enig.ander gebied der betrekkingen tussen Nederland en Indonesie te overwegen stappen bij de Unci—zich ontijdig tot deze hebben gewend.

De Nederlandse Regering zal het op prijs stellen van de beschouwingen waartoe het vorenstaande de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie aanleiding geeft, te mogen kennis nemen en verzoekt Uwe Excellentie hierbij de hemieuwde verzekering etc.

**SURAT PEMERINTAH BELANDA PADA KTN 21 JUNI  
1950**

**NEDERLANDSE TEKST VAN DE BRIEF VAN DE  
NEDERLANDSE REGERING AAN DE UNCI, D.D.  
21 JUNI 1950**

(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda)

(Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken)

De Nederlandse Regering dankt de commissie der Verenigde Naties van Indonesie voor haar brief van 10 Juni 1950 met bijlage, zijnde een afschrift van het schrijven, hetwelk de Minister-President van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie onder dagtekening van 8 Juni 1950 der Unci deed worden in antwoord op haar aan hem gerichte brief van 3 Juni 1950 betreffende de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht in Indonesie, waaromtrent de Nederlandse Regering zich bij brief van 25 Mei 1950 tot Uwe Commissie wendde.

Reeds op 18 Mei 1950 richtte de Nederlandse Regering zich terzake van de realisering van het zelfbeschikkingsrecht tot Minister-President Hatta met een schrijven waarvan de inhoud in grote trekken gelijk is aan Haar voormelde brief van 25 Mei j.l. aan Uwe Commissie.

Inmiddels heeft Zij van de Minister-President van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie daarop onder dagtekening van 6 Juni 1950 een antwoord mogen ontwangen, waarvan de inhoud materieel identiek is met diens schrijven aan Uwe Commissie van 8 Juni j.l. ten aanzien van welks inhoud de Commissie van de Verenigde Naties voor Indonesie de Nederlandse Regering heeft uitgenodigd van haar opvattingen te doen blijken.

De Nederlandse Regering meent aan deze uitnodiging op geen betere wijze gevolg te kunnen geven dan door Uwe Commissie te verzoeken kennis te willen nemen van de inhoud van bijgaand afschrift van Haar brief dd. heden aan Minister-President Hatta in antwoord op diens vorengemeld schrijven aan de

Nederlandse Regering dd. 6 Juni 1950. Daaruit moge de Commissie van de Verenigde Naties voor Indonesie ontwaren op welke eijze de Nederlandse Regering zich de vervulling van het bepaalde in artikel 2 van de ter RTC gesloten Overgangsovereenkomst denkt en op welke wijze die vervulling naar Haar oordeel onder de huidige zich in Indonesie ontwikkelende, staatkundige verhoudingen zou kunnen worden bevorderd.

De Nederlandse Regering moge daarnaast—kennis genomen hebbende ook van de brief welke Uwe Commissie onder dagtekening van 3 Juni 1950 tot Minister—President Hatta richtte—aan de Commissie van de Verenigde Naties voor Indonesie mededeling doen van Haar inzichten met betrekking tot de taak der Unci.

De taak welke de Unci ter RTC blijkens het bepaalde sub VI der Mantelresolutie heeft aanvaard, betreft een toezien op de nakoming van de op de Ronde Tafel Conferentie tussen partijen bereikte overeenkomsten. Voorts rust op haar nog een speciale verantwoordelijkheid, ook tegenover de betrokken bevolkingen, met betrekking tot de uitvoering van haar taak ten aanzien van het zelfbeschikkingsrecht. Welke opvatting men met betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van die taak ook moge zijn toegedaan, het komt der Nederlandse Regering onbetwistbaar voor dat de taak van de Unci met betrekking tot het zelfbeschikkingsrecht niet afhankelijk is van het initiatief van een der partijen. Immers deze taak betreft, als gezegd, het belang van bepaalde bevolkingsdelen van Indonesie en juist de neutrale en buiten de partijen staande positie, waarin de Unci zich bevendt, maakt het haar mogelijk deze taak ten uitvoer te leggen en daarmee de goede verhoudingen tussen partijen te bevorderen. Uit dien hoofde zou het naar het oordeel van de Nederlandse Regering voor de hand gelegen hebben, dat de Unci tegen een ontwikkeling van zaken, welke de grondslag van het zelfbeschikkingsrecht dreigt aan te tasten, zelfstandig bezwaar gemaakt zou hebben. De Nederlandse Regering meent thans in ieder geval te mogen vertrouwen, dat de Unci zal toezien, dat artikel 2 der Overgangsovereenkomst, zoal niet naar de letter, dan toch althans naar de geest zal worden nagekomen.

De Commissie van de Verenigde Naties voor Indonesië moge het der Nederlandse Regering ten goede houden dat Zij bij de huidige stand van zaken de vrijheid heeft genomen op dit aspect ten behoeve van een richtige uitvoering van de ter RTC gesloten overeenkomsten, waarvan de aan de Unci toebedeelde taak deel uitmaakt, de aandacht te vestigen.

Zij vertrouwt gaarne dat de Unci aanleiding en gelegenheid moge vinden haar standpunt terzake in nadere overweging te nemen en daarvan aan de Nederlandse Regering mededeling te doen.

**SURAT PEMERINTAH BELANDA PADA PERDANA  
MENTERI RI. HATTA, 15 JULI 1950**

(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda)

De Nederlandse Regering dankt Uwe Excellentie voor Haar brief van 29 Juni 1950 betreffende de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht in Indonesie.

Zij heeft met belangstelling kennis genomen van de daarin vervatte nadere uiteenzetting van het standpunt der Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie ten aanzien van dit onderwerp.

De Regering van de R.V.S.I. moge er zich van verzekerd houden dat de Nederlandse Regering begrip heeft voor de moeilijkheden waarvoor de Indonesische Regering zich in verband met de staatkundige ontwikkelingen in Haar land sedert de Souvereiniteitsoverdracht ziet gesteld, al blijft de Nederlandse Regering het betreuren, dat de Regering van de R.V.S. van mening is, dat zij aan de overeengekomen regeling omtrent het zelfbeschikkingsrecht niet onverkort uitvoering kan geven.

De Regering der R V S.I meent in dit verband een beroep te kunnen doen op de clause "rebus sic stantibus". Deze clause mag naar algemene opvatting slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden, die onafhankelijk van de partij, die daarop beroep doet, zijn ingetreden, worden ingeroepen. Zelfs wanneer op meergenoemde clause terecht beroep mocht worden gedaan, brengt zulks voor de betrokken partij de verplichting mede zich tot de wederpartij te wenden met het verzoek wijziging te brengen in de gesloten overeenkomst voorzover zulks onvermijdelijk is geworden. Met name zal het die partij dus niet vrij staan zichzelf, met een beroep op de clause, zonder meer van enige verplichting ontslagen te verklaren.

Intussen heeft de Nederlandse Regering er akte van genomen dat de Regering der R.V.S.I. op het standpunt staat, dat artikel 2 der Overgangsovereenkomst in elk geval behoort te worden nagekomen naar de ratio dier bepaling.

De Regering der R.V.S.I is daarbij met de Nederlandse Regering van mening dat op de UNCI ten deze een zelfstandige taak rust. In hoeverre de aanbevelingen van de UNCI bindend zijn, is een vraag, die de Nederlandse Regering op dit ogenblik meent te kunnen voorbijgaan, omdat de Regering der R.V.S.I. van mening is, dat zodanige aanbeveling niet zou kunnen opgevolgd worden, indien deze tot chaos in Indonesie zou leiden, indien de Regering der R.V.S.I. van mening is, dat zodanige aanbeveling niet zou kunnen opgevolgd worden, indien deze tot chaos in Indonesie zou leiden, indien de Regering der R.V.S.I. een niet-opvolging van aanbevelingen van de UNCI wil beperken tot deze buitengewone omstandigheden en daarover casu quo overleg met de Nederlandse Regering wil voeren, behoeft tegen deze beperking zijdens de Nederlandse Regering geen bezwaar te bestaan.

De Ned. Reg. heeft met grote belangstelling ervan kennis genomen dat verwezenlijking in principe van artikel 2, lid 1, der Overgangsovereenkomst in een unitarisch Indonesie een zo groot mogelijke autonomie der onderdelen zal medebrengen, al heeft Zij in de brief van Uwe Excellentie geen nadere aanduiding van de inhoud dier autonomie vermogen aan te treffen. De Ned. Regering volgt in dit opzicht daarom met belangstelling de in gang zijnde ontwikkeling.

Wat betreft de tenuitvoerlegging van het tweede lid van meergenoemd artikel 2, legt de Regering der R.V.S.I. blijkens Haar brief, de beslissing bij de Constituante, welke de bevoegdheden van de autonome gebiedsdelen zal bepalen. Het zal der Regering der R.V.S.I. niet ontgaan zijn, dat de UNCI blijkens haar antwoord aan de Ned. Reg. d.d. 24 Juni 1950 ten aanzien van de rechtens op grond van het bepaalde in artikel 2 der Overgangsovereenkomst bestaande situatie, zich gerechtigd acht om de Regering der R.V.S.I. aan te bevelen dat een plebisciet ware te houden over de vraag of enig gebied autonome bevoegdheden moet hebben, en dat, indien er een plebisciet wordt gehouden en de wenselijkheid tot vorming van een autonoom gebiedsdeel daardoor zou komen vast te staan, dit gebiedsdeel — ongeacht of het staat of provincie zal heten—het

recht zou hebben als bedoeld in het tweede lid van artikel 2 der Overgangsovereenkomst.

De Ned. Reg. moet haar standpunt, dat overeenkomt met het standpunt der UNCI, ten deze handhaven.

Aan de Nederlandse Regering is iedere neiging vreemd om zich na de Souvereiniteitsoverdracht in te laten met interne Indonesische aangelegenheden. Niets ware Haar liever geweest dan dat, de afsluiting van de R.T.C. overeenkomsten en de overdracht van de Souvereiniteit, beide partijen er zich toe hadden kunnen bepalen haar eigen aandeel in de uitvoering van deze overeenkomsten naar vermogen te volvoeren. Zij vertrouwt, dat ook de Indonesische Regering deze mening is toegedaan.

De Nederlandse Regering ziet daarom onder de door de Regering der R.V.S.I. gereleveerde omstandigheden met grote belangstelling toe hoe de Indonesische Regering, zowel voor wat betreft het bepaalde in het eerste als in het tweede lid van artikel 2 der Overgangsovereenkomst, uiteindelijk de hier bedoelde materie zal regelen. Zij moge zich voorbehouden om, wanner daartoe nader aanleiding zou bestaan, zich terzake tot de Indonesische Regering te wenden.

**SURAT PEMERINTAH BELANDA PADA KTN, 15 JULI  
1950  
(Arsip Departemen Luar Segeri Belanda)**

De Nederlandse Regering dankt de UNCI voor haar brief dd. 24 Juni 1950 betreffende het zelfbeschikkingsrecht in Indonesië. Zij heeft met belangstelling en waardering van de inhoud daarvan kennis genomen.

Het lijdt—ook naar de mening der Nederlandse Regering—geen twijfel dat de nakoming der ter R.T.C. gesloten overeenkomsten in de eerste plaats zaak is van partijen en voor haar verantwoordelijkheid komt. Dit neemt evenwel—naar de Nederlandse Regering meent—niet weg dat een toezien op de nakoming der overeenkomsten door partijen, welk toezicht aan Uw Commissie ter R.T.C. is opgedragen, als een zelfstandige taak mag worden beschouwd, welke zich uitstrekt over de vraag of en hoe de getroffen overeenkomsten door partijen worden nagekomen.

Wat betreft de procedure, voorzien in artikel 2 der Overgangsovereenkomst, meent de Nederlandse Regering, mede gezien de bij de totstandkoming van dit artikel ter R.T.C. gehouden besprekingen, dat de in dit artikel vervatte regeling niet slechts een recht geeft aan, maar tevens een zelfstandige plicht legt op de UNCI ten aanzien van de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht, al zal het initiatief ten deze ook kunnen uitgaan van een der partijen of de bevolking van enig gebiedsdeel van Indonesië.

Uit het schrijven, hetwelk de Nederlandse Regering onder dagtekening van 29 Juni 1950 van de Minister-President der R.V.S.I. mocht ontvangen, en waarvan door deze afschrift aan Uw Commissie werd gezonden, moge de UNCI zijn gebleken, dat de Regering van de R.V.S.I. het boven uiteengezette standpunt deelt.

De Nederlandse Regering meent tenslotte juist te handelen  
Uw Commissie hierbij afschrift te doen toekomen van het  
antwoord hetwelk zij onder dakekening van heden richtte aan  
Minister-President Hatta naar aanleiding van diensvorenge oemd  
schrijven van 29 Juni 1950 aan de Nederlandse Regering.

**SURAT PERDANA MENTERI PREES PADA PERDANA  
MENTERI RI NATSIR, 3 OKTOBER 1950  
(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda)**

Met grote verontrusting nam de Nederlandse Regering kennis van de militaire actie, welke door de regering ban de Republiek Indonesie tegen Ambon is ingezet.

De teleurstelling over dit bericht was te groter, omdat tot op het laatsete ogenblik niet slechts de hoop, maar ook de verwachting mocht worden gekoesterd, dat Uw regering met het voornemen was beziel om het conflict met Ambon zonder geweld van wapenen tot oplossing te grenen. De zending van Minister Leimena rechtvaardigde deze verwachting.

Lk mag niet nalaten Uwer Ezcellentie mede te delen, dat deze militaire actie niet alleen de Nederlandse Regering, maar het gehele Nederlandse volk diep heeft geschokt en niet het minst hen, die gefreven door oprechte sympathie voor de nationale aspiraties van het Indonesische volk de ontwikkeling van de onafhankelijke Indonesische staat met grote belangstelling hebben gevolgd.

Het Nederlandse volk kan niet onverschilig staan tegenover deze stijd. Niet alleen is Nederland nog steeds belast met de verantwoordelijkheid voor een aantal nog niet gerepatrieerde Ambonnesen militairen, bij wie deze moeiwe pmtwolle?omgem de grootste onrust kunnen verwekken, maar vooral gevoelt ons volk zwaar de verantwoordelijkheid voor het feit, dat het door overdracht van de souvereinitiet de zorg voor het welzijn van de Ambonnesen bevolking uit handen heeft gegeven. Met het oog op de ernst van de situatie, welke door deze ontwikkeling is ontstaan, acht ik het mijn plicht een openlijk persoonlijk beroep te doen op Uwe Excellentie om alsnog ertoe medete werken, dat de strijd wordt gestaakt en langs vreedzame weg naar een oplossing gestreefd wordt.

**SURAT PERDANA MENTERI RI NATSIR KEPADA  
PERDANA MENTERI BELANDA (DREES)  
(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda)**

In verband met Uwer Excellenties telegram betreffende de door de Regering van de R.I. laatstelijk genomen maatregelen in de Zuid-Molukken, heb ik de eer het volgende naar voren te brengen. Zoals Uwer Excellentie bekend, kwam op 25 April j.l. een groep KNIL Militairen in op Stand order leiding van Dr. Soumokil, auctor intellectualis van de opstand in Makassar, die met een Nederlands vliegtuig naar Ambon werd gebracht. De evengenoemde Militairen Stonden volgens de R.T.C. overeenkomst op dat ogenblik nog onder het gezag van de Nederlandse Regering, maar de Nederlandse Regering nam geen strenge maatregelen tegenover hen. Kolonel Schotborgh, die naar Ambon werd gezonden, trad niet op zoals van hem verwacht werd, integendeel hij nam deel aan een plechtigheid van het neerhelan van de Nederlandse vlag en het hijsen van de vlag van de z.g. "Republiek Zuid-Molukken" in de kazernes van voornoemde militairen. Vervolgens werden meervermelde militairen door de Nederlandse Regering uit het K.N.I.L. gestoten en verklaarde de Nederlandse Regering zich niet meer voor hen verantwoordelijk, het aan mijn Regering overlatend het volk van de Zuid-Molukken in het algemeen en dat van Ambon in het bijzonder te beschermen tegen de terreur van die groep militairen. Teneinde de belangen en de veiligheid van het volk te beschermen, heeft de Regering tot op dit ogenblik steeds getracht de kwesties verband houdende met de opstand in de Zuid-Molukken, zonder bloedvergieten op te lossen. De eerste poging werd gedaan op 27 April 1950, twee dagen na de proclamatie van Soumokil, met het zenden van vooraanstaande Indonesiers afkomstig van de Zuid Molukken onder leiding van Dr. Leimena en bestaande uit Ir. Putuhena, R.M.A. Pellau-pessy en Dr. Rehatta als leden. Deze poging mislukte, omdat de missie Dr. Leimena niet door Soumokil c.s. werd ontvangen. Op 12 en 13 Juni werd te Semarang een "Molukken con-

ferentie" van Molukkers uit geheel Indonesie gehouden, die vervolgens een "broedermissie" vromde teneinde te trachten de opstand op vreedzame wijze te beslechten. Deze "broedermissie" bestond uit Dr. Siahaja, Sapuletto, J.E. Fernandus, J. Tanasale en Kaolola. Ook de poging van deze missie liep op niets uit. Eind Augustus probeerde Dr. Rehaata wederom met Soumokil c.s. contact op te nemen teneinde tot een vreedzame oplossing te komen. Daar er nog geen berichten van het resultaat van Dr. Rehatta's pogingen werden ontvangen, heeft op 27 September j.l. de Regering de Minister van Gezondheid, Dr. J. Leimena opgedragen zich met Dr. Rehatta in verbinding te stellen. Intussen bleek echter dat ook deze poging van Dr. Rehatta mislukte, aangezien Dr. Soumokil c.s. standvastig elke toenadering verwirp. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat elke poging die gedaan kan worden om tot een vreedzame oplossing te geraken door de Regering werd gedaan.

Inmiddels kwamen bij de Regering voortdurende rapporten binnen over de terreur die de opstandelingen tegenover de onschuldige bevolking uitoefende. Teneinde in het bijzonder het volk van Ambon te beveiligen en te beschermen en het belang van land en volk van Indonesie in het algemeen te waarborgen, ziet de Regering tot haar spijt zich genoodzaakt positieve maatregelen te nemen. Met spijt doch met de overtuiging, dat die maatregelen aan de bevolking van de eilanden in de Zuid-Molukken de rust en vrijheid zal worden hersteld, zoals zo zeer van hun nationale regering verwacht.

De Indonesische Regering beschouwt de kwesties tegenover welke zij zich in de Zuid-Molukken geplaatst ziet als een deel van de moeilijkheden, die altijd ontstaan in een periode van grote veranderingen, zoals de Indonesische en Nederlandse gemeenschap die thans beleeft als gevolg van de soevereinititsoverdracht.

Een kleine groep gevapende personen, die toenmaals onder verantwoordelijkheid stond van de Nederlandse Regering probeerde zich voortdurend te onttrekken aan de veranderingen van de historie, die zich in Indonesie aan het voltrekken zijn en deze zelfs te weerstreven. De Indonesische Regering spreekt haar verwachting uit, dat de moeilijkheden die zij in de Zuid-Molukken aan het oplossen is, de laatste zullen zijn in de reeks van moeilijkheden, die niet los te maken zijn van het proces van terugtrekking der Nederlandse machtsapparaten uit Indonesie.

